

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS *ISLAMIC*
SOCIAL ENTERPRISE PADA YAYASAN PDHI
(PERSAUDARAAN DJAMAAH HAJI INDONESIA)
YOGYAKARTA**

*(Community Empowerment Based on Islamic Social Enterprise At
PDHI Yogyakarta)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam dari Program Studi Ekonomi Islam



ACC MUNAQSAH
21 April 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizqi Anfanni Fahmi'.

Rizqi Anfanni Fahmi

Oleh:

**UMI DINURRI'ANAH
19423026**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Umi Dinurri'anah
NIM : 19423026
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Islamic Social Enterprise* pada Yayasan PDHI Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulis Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 April 2023



Umi Dinurri'anah



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023
Judul Tugas Akhir : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Islamic Social Enterprise pada Yayasan PDHI Yogyakarta
Disusun oleh : UMI DINURRI'ANAH
Nomor Mahasiswa : 19423026

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Anom Garbo, SEI, ME
Penguji I : Aqida Shohiha, S.E.I., M.E.
Penguji II : Muhammad Iqbal, SEI, MSI
Pembimbing : Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 6 Juni 2023

Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1444 H

13 April 2023 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
DI Yogyakarta

Assalamualikum Wr.Wb.

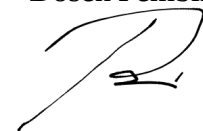
Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1549/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 pada tanggal 2 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Umi Dinurri'annah
NIM : 19423026
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Islamic Social Enterprise* pada Yayasan PDHI Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan siding munaqasah Fkultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan, bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang di maksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing



Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Umi Dinurri'anah
NIM : 19423026
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Islamic Social Enterprise* pada Yayasan PDHI Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti menaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 April 2023



Risqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga saya bisa sampai pada tahap akhir dalam menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi S1 ini. Tanpa Ridho-Nya sungguh saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat beserta Salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik sepanjang masa, idola semua umat. Syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, sehingga sebuah karya yang saya susun ini, saya persembahkan kepada:

Ibu, Bapak, kedua adik saya dan keluarga besar yang tak pernah bosan melangitkan do'a supaya segala yang saya hajatkan tercapai atas izin Allah SWT. Banyak pengorbanan yang sampai saat ini saya belum mampu membalasnya. *Support* yang selalu saya dapatkan dari mereka menjadi sebuah motivasi dan penyemangat dalam menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai Mahasiswa. Semoga Adik-adik saya bisa mengambil sisi positif dari segala hal yang saya.

Teruntuk Dosen Pembimbing saya, Bapak Rizqi Annfani Fahmi, S.E.I, M.S.I. yang begitu sabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih Bapak atas kebaikannya. Bimbingan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi saya untuk melanjutkan perjalanan menuntut ilmu kedepannya. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu dan dimudahkan dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Aamiin. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada para Dosen Ekonomi Islam yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada semua Mahasiswanya, para civitas akademik yang sudah melayani semua Mahasiswa, semoga diberikan kesehatan.

Terakhir untuk sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Atas kebaikan do'a, semangat dan segala bentuk bantuan berupa dukungan dalam setiap langkah saya, sungguh ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak akan mampu membalas itu semua. Semoga segala bentuk kebaikan kalian semua tercatat menjadialam kebaikan oleh Allah SWT, Aamiin. Terima kasih sudah mau berjuang bersama.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

**"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
sesama manusia"**

(H.R. Ath – Thabarani)

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS *ISLAMIC SOCIAL ENTERPRISE* (ISE) PADA YAYASAN PDHI (PERSAUDARAAN DJAMAAH HAJI INDONESIA) YOGYAKARTA

Umi Dinurri'anh

19423026

Pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat. Namun, hal ini belum sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nyatanya masih banyak sekali program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tidak berjalan berkelanjutan secara mandiri, hal ini disebabkan oleh banyak faktor terutama oleh sumber dana yang belum dikelola secara maksimal. Tujuan utama adanya penelitian ini untuk membahas terkait bagaimana Yayasan PDHI mampu memberdayakan masyarakat dengan dana filantropi secara produktif bukan konsumtif atau yang biasa disebut dengan istilah *Islamic Social Enterprise* (ISE) bagi kebermanfaatan masyarakat yang berkelanjutan. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan pihak Yayasan PDHI dan beberapa mitra atau lembaga di bawah naungan Yayasan DHI. Sedangkan data sekunder didapat dari dokumentasi laporan kegiatan dan program - program di Yayasan PDHI. Waktu pengambilan data dalam penelitian ini yaitu bulan Desember 2022 sampai Februari 2023. Penelitian ini menggunakan teknik *interaktif* yaitu melalui wawancara dan *non interaktif* melalui dokumentasi. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program - program yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini memberikan dampak pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan dalam keberlangsungan program melalui kegiatan ekonomi pada mitra atau lembaga dibawah naungan yayasan melalui sistem otonomi yang dilaksanakan oleh pihak Yayasan PDHI. Dengan menerapkan prinsip dasar bahwa *Islamic Social Enterprise* (ISE) pada Yayasan PDHI ini harus mengarah pada *al-falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat) serta menerapkan rasa kemaslahatan umat dalam setiap program kegiatannya.

Kata Kunci : *Islamic Social Enterprise* (ISE), Pemberdayaan Masyarakat, Dana Filantropi

ABSTRAK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ISLAMIC SOCIAL
ENTERPRISE (ISE) PADA YAYASAN PDHI (PERSAUDARAAN
DJAMAAH HAJI INDONESIA)YOGYAKARTA

Umi Dinurri'anh

19423026

Community empowerment has an important role in alleviating poverty in society. However, this is not in accordance with the expected results. In fact there are still many community empowerment programs that are implemented that are not sustainable independently, this is caused by many factors, especially by sources of funds that have not been optimally managed. The main purpose of this research is to discuss how the PDHI Foundation is able to empower the community with philanthropic funds in a productive and not consumptive manner or what is commonly referred to as Islamic Social Enterprise (ISE) for the benefit of sustainable society. This research method is descriptive qualitative using primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews with the PDHI Foundation and several partners or institutions under the auspices of the DHI Foundation. Meanwhile, secondary data was obtained from documentation of activity reports and programs at the PDHI Foundation. The time for collecting data in this study is from December 2022 to February 2023. This research uses interactive techniques, namely through interviews and non-interactive through documentation. This type of research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the programs implemented by the PDHI Foundation have an impact on community empowerment independently and sustainably in the sustainability of the program through economic activities to partners or institutions under the auspices of the foundation through an autonomous system implemented by the PDHI Foundation. By applying the basic principle that the Islamic Social Enterprise (ISE) at the PDHI Foundation must lead to al-falah (happiness in the world and the hereafter) and implement a sense of benefit for the people in each of its activity programs.

Keywords: *Islamic Social Enterprise (ISE), Community Empowerment, Philanthropic Funds*

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158. Th. 187

Nomor : 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

I. Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs.Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

- a. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
- b. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang

dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

II. Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

III. Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
- b. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengancara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
- c. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

IV. Rumusan Pedoman Transliterasi Arab – Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

- a. Konsonan
- b. Vokal (tunggal dan rangkap)
- c. Maddah
- d. Ta'marbutah
- e. Syaddah
- f. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
- g. Hamzah
- h. Penulisan kata
- i. Huruf kapital
- j. Tajwid

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah
al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan limpahan-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul “pemberdayaan wanita pada program csr pt. Vena energy dalam perspektif islam” dengan baik. Sholawat beserta Salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Beliaulah yang menjadi suri tauladan terbaik sepanjang masa, semoga kita semua bisa mengikuti akhlak beliau Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mendapatkan banyak rintangan, namun atas bantuan berbagai pihak yang memberikan arahan, bimbingan, bantuan, maupun juga dorongan maka, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Islam indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis S.Ag. SEI. M. Sh. EC. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Sumber Daya
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag. MA. Selaku Wakil Dekan 2 Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Dr. Anton Priyo Nugroho, SE. MM. selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

6. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., ME. selaku ketua Program Studi Ekonom Islam
7. Bapak Rizqi Anfanni Fahmi, S.E.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing saya telah meluangkan waktu dan tenaganya memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya.
8. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang sudah mengabdikan banyak ilmu kepada para Mahasiswanya, terima kasih banyak atas kebaikannya, semoga dicatat sebagai amal kebaikan dan Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak ibu dosen dengan pahala yang tak terhingga.
9. Kepada Ibu Hj. Nani Nasikah dan Bapak H. Ali Murtadlo dan adik-adik saya M. Haidar, Lutfi Murtandho serta Ahmad Ghazali yang telah mengorbankan banyak hal, melangitkan Do'a dan selalu memberikan saya motivasi dengan kasih sayangnya supaya saya bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Semoga sehat selalu.
10. Kepada para sahabat dan teman – teman seperjuangan saya yang sudah mau berjuang bersama, dan saling memberikan support dalam berbagai kondisi. Semoga kita sukses dan bermanfaat bagi banyak orang, Aamiin.

Yogyakarta, 13 April 2023



Umi Dinurri'annah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR GRAFIK.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
A. Telaah Pustaka	13
B. Landasan Teori.....	22
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	22

2. <i>Islamic Social Enterprise (ISE)</i>	30
3. Yayasan	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	47
D. Subjek & Objek Penelitian.....	47
E. Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Definisi Konseptual.....	52
H. Instrumen Penelitian.....	53
I. Teknik Analisis Data.....	57
J. Uji Keabsahan Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum	60
B. Hasil Penelitian	73
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	75
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	79
3. Konsep Islamic Social Enterprise.....	80
4. Maqasid Syariah Dasar Islamic Social Enterprise.....	85
5. Tujuan adanya Islamic Social Enterprise (ISE).....	88
6. Kerangka Islamic Social Enterprise (ISE).....	89
C. Hasil Pembahasan	95
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99

B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	107
RIWAYAT HIDUP	180

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Lembaga Sampling Yayasan PDHI.....	48
Tabel 3.2. Data Primer Wawancara	49
Tabel 3.3. Definisi Konseptual.....	52
Tabel 3.4. Instrumen Penelitian	54
Tabel 4.5. Jumlah Tanah Wakaf & HGB.....	62
Tabel 4.6.Lembaga & Kegiatan Yayasan PDHI	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Konsep Kondensasi	58
Gambar 4.2. KSUS BMT PDHI Sasonoworo	68
Gambar 4.3. Konsep ISE dalam perspektif Islam	81
Gambar 4.4. Kerangka ISE (Osman bin Muhamad, 2017)	91

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Kemiskinan DIY di Bandingkan Nasional.....	2
--	---

BAB I

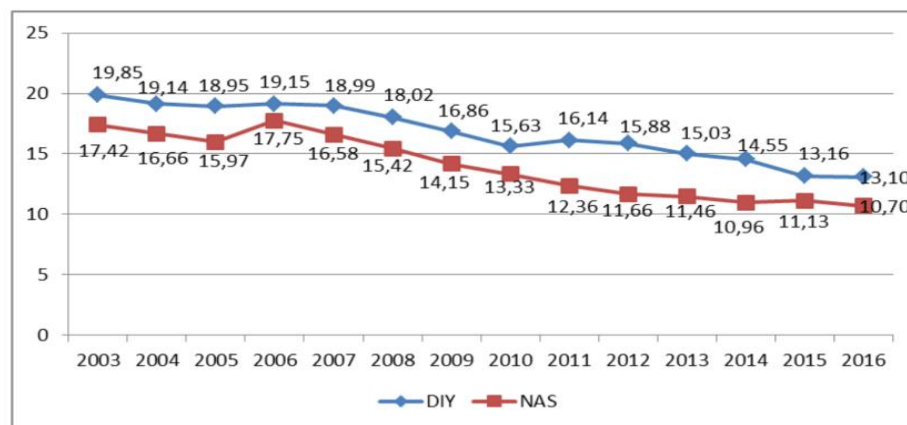
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi rasio gini atau ketimpangan belanja, meningkatkan pendapatan ekonomi dengan menumbuhkan usaha mikro dan kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2019, DIY sebenarnya merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin yang tinggi yaitu 11,7% padahal persentase penduduk nasional sebesar 9,41, ditambah dengan masalah ketimpangan pengeluaran antar kelompok orang atau dengan pengukuran indeks gini tertinggi. BPS menyatakan sepanjang Maret 2019, Provinsi DIY tercatat sebagai daerah dengan rasio gini tertinggi di Indonesia. Ketimpangan di DIY tercatat sebesar 0,423 poin. Situasi jumlah penduduk miskin dan rasio gini yang tinggi bahkan tertinggi secara nasional, tentu menjadi perhatian bahkan perhatian serius bagi pemerintah DIY dan kabupaten/kota di DIY. Dengan indeks gini ratio yang tinggi, tentunya harus ada solusi kebijakan yang mendasar dan inovatif dari Pemerintah DIY bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Hal ini menjadi salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena angka kemiskinan masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional. Selain masih lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional, penurunan angka kemiskinan masih relatif lambat. dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun, angka kemiskinan di DIY hanya menurun sekitar 2,78 persen atau 0,556 persen per tahun. Penurunan ini tergolong rendah karena tidak mencapai satu persen per tahun.

Melalui pemberdayaan masyarakat inilah pemerintah daerah mencoba meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dibidang sosial maupun ekonomi. Beberapa data pemberdayaan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada data statistika di sebuah aplikasi dataku untuk DIY (Lampiran 1). Berikut ini merupakan sebuah gambar grafik yang menunjukkan angka tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta jika dibandingkan dengan nilai atau angka tingkat kemiskinan secara nasional.



Sumber: BPS DIY, 2017.

Grafik 1. Tingkat Kemiskinan DIY di Bandingkan Nasional

Masalah yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah sumber daya manusia. Kebutuhan akan profesionalisme sumber daya manusia dan kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan usaha dan dapat memberikan daya saing perusahaan/organisasi dalam hal produktivitas, kualitas dan pelayanan. (Robert, 2001:1). Oleh karena itu, pendidikan pembudayaan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan (Tjokroamidjojo, 2004:46). Selanjutnya, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program adalah disposisi. Disposisi atau sikap dan implementasi kebijakan merupakan faktor penting dari sebuah kebijakan publik. Menurut Mortimer (2002: 178) cara untuk menyemangati seseorang atau kelompok adalah dengan tidak memandang rendah orang lain, tidak

mengkritik seseorang di depan umum, memberikan perhatian penuh, dan selalu terbuka terhadap hal-hal kecil. Makmur (2009:175-176) kelangsungan hidup suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan proses perilaku manusia yang dapat memperkuat ruh atau jiwa bagi dinamika struktur pemberdayaan.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahyar Daraba (2016) menunjukkan tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berada pada kategori sangat baik sebesar 33,33 persen, kategori baik sebesar 47,62 persen, dan sisanya sebesar 19,05 persen berada pada kategori cukup. Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan $\text{sig} = 0,000$ pada taraf signifikansi 5 persen. Demikian pula secara parsial variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan program. Besarnya pengaruh variabel bebas ditunjukkan oleh koefisien regresi yaitu variabel komunikasi sebesar 0,471; sumber daya = 0,149; disposisi 0,220; dan struktur birokrasi sebesar 0,044.

Pemberdayaan masyarakat saat ini memiliki sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Bukan hanya dari sisi proses pengelolaannya saja namun banyak hal yang perlu untuk dikembangkan menjadi sebuah sistem pengelolaan masyarakat yang jauh lebih baik. Jika sebelumnya pemberdayaan ini lebih banyak dikelola oleh pemerintah dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian melalui sokongan dana dari pusat pemerintah. Saat ini justru banyak pemberdayaan masyarakat yang justru mengandalkan dana filantropi atau yang biasa disebut dengan dana donasi. Dari berbagai program – program pemberdayaan masyarakat yang sudah dijalankan hal ini justru membuat masyarakat selalu mengandalkan dana donasi dari jama'ah dan donasi dari orang lain. Akhirnya hal ini berakibat adanya perlombaan atau kompetisi untuk mendapatkan donasi dari masyarakat.

Pengelolaan dana filantropi memiliki sebuah alasan penting yaitu upaya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Filantropi sangat dikenal dalam Islam, seperti dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain-lain. Namun, pengelolaan dana tersebut belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat secara langsung. Sebab, banyak yang memberikan dana filantropi dalam bentuk konsumtif, bukan dalam bentuk produktif. Sehingga tidak mampu mencapai keadilan sosial sebagaimana tujuan dari filantropi Islam itu sendiri, karena ketika dana tersebut digunakan akan cepat berkurang tanpa ada perubahan yang berarti. Filantropi dalam Islam juga telah menjadi kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat dan memajukan keadilan sosial serta kemaslahatan masyarakat luas.

Dalam tradisi Islam, hakikat praktik filantropi telah menjadi tradisi yang melembaga sejak kemunculan Islam (Widyawati, 2011:21). Praktek filantropi telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah memberi sedekah kepada orang miskin sebanyak dua dirham, sambil memberi nasehat agar menggunakan uang satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak dan bekerja dengannya. Kemudian orang tersebut datang lagi kepada Nabi dan mengatakan bahwa dia telah bekerja dan berhasil mendapatkan sepuluh dirham. Dari kisah tersebut dapat diketahui bahwa bersedekah tidak hanya sampai kepada yang membutuhkan, tetapi sunnah Nabi mengisyaratkan bahwa sedekah dapat membebaskan orang miskin dari kemiskinan. Islam menganjurkan seorang muslim untuk melakukan filantropi sehingga harta tidak hanya sekedarnya berputar di kalangan orang kaya. Allah SWT berfirman (QS. al-Hasyr: 7) :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Barang rampasan (fai-i) yang Allah berikan kepada Rasul-Nya (dari harta) yang berasal dari penduduk kota, maka itu untuk Allah, untuk Rasul,

kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. , agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Nabi kepadamu, terimalah. Tinggalkan apa yang dilarang. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya"

Dorongan inilah yang membuat umat Islam banyak mengelola dan memanfaatkan dana filantropi untuk digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Namun, hal ini mengakibatkan sistem pemberdayaan di era saat ini tidak berjalan sesuai dengan harapan atau tujuan yang seharusnya. Bukan hanya itu kelemahan lainnya yaitu tidak mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin atau dalam istilah sehari-hari hanya memberi ikan tetapi tidak pancing (Kholis, 2013: 65). Hal ini akan membuat si miskin terus bergantung pada pemberian orang lain tanpa mau berusaha.

Pemberdayaan masyarakat sangat sering dibahas di berbagai penelitian baik pada penelitian tingkat nasional maupun internasional. Konteks pembahasan yang seringkali muncul pada sebuah pembahasan pemberdayaan masyarakat biasa terkait dengan sumber daya manusianya (SDM) atau faktor – faktor serta model dari pemberdayaan. Seperti yang tertulis dalam sebuah *Jurnal Ekonomi Pembangunan UNNES*, pada tahun 2020 pada sebuah *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah* yang membahas terkait pemberdayaan masyarakat dalam menggali potensi desa. Di tahun 2018 pada sebuah (*Ilmu Dakwah*) *Academic Journal for Homiletic Studies* pada tahun 2018 yang membahas terkait dengan “Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid”. Dari beberapa judul yang saya temukan banyak sekali variannya dan jenisnya. Bukan hanya itu saja ada beberapa pemberdayaan masyarakat yang juga dimulai dari desa, masjid, pesantren, kaum perempuan dan bahkan kegiatan sosial di masyarakat. Semua pembahasan itu didasarkan pada SDM dan SDA yang ada. Namun sampai

saat ini masih sangat sedikit yang membahas terkait pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari sudut pandang *Islami Social Enterprise* (ISE).

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan utama yaitu memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam penentuan hak-hak politiknya (Hamid, 2018).

Untuk itu pemberdayaan masyarakat ini perlu memiliki program atau sistem pengelolaan yang baik dan sesuai dengan tujuan awal adanya sebuah pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat membutuhkan notif penerimaan dan untuk menjalankan program – program pemberdayaan itu melalui konsep *Islamic Social Enterprise* (ISE). Hal ini didukung oleh sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Alam (2010) yang mengidentifikasi bahwa lembaga filantropi Islam tidak hanya mendukung pekerjaan bantuan tetapi juga dapat berkontribusi untuk tujuan lain seperti proyek pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Karya – karya ini sangat dipercaya tidak hanya untuk membantu yang membutuhkan tetapi juga untuk memecahkan kesenjangan dalam standar hidup di antara komunitas Muslim itu sendiri.

Sistem baru berupa *Islami Social Enterprise* yaitu sistem pengelolaan dana filantropi seperti dana zakat, infaq, sedekah ataupun wakaf dengan tujuan untuk mensejahterakan umat atau bisa dikatakan demi kemaslahatan umat. Namun, hal ini belum terlalu dikenal oleh banyak lembaga sosial

ataupun yayasan yang ada di Indonesia. Padahal hal ini lah yang mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat melalui dana filantropi sebagai sumber dana penyokong UMKM ataupun usaha kecil dalam mengembangkan bisnisnya secara mandiri. Pengelolaan dana ZISWAF yang baik dapat mengubah seorang mustahiq menjadi muzakki (Muhamad Asep Syaifulloh, 2020).

Islamic Social Enterprise (ISE) memiliki peran fungsional untuk menghasilkan keuntungan atau kekayaan untuk masyarakat, baik dalam bentuk entitas independen kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), entitas lokal atau entitas berbasis internasional. Islamic Relief adalah lembaga nirlaba atau bisa dikatakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Islam dunia yang memiliki outlet *Islamic Social Enterprise* (ISE) sendiri, yang dikenal sebagai *Charity Shopee*. Jumlah *Islamic Social Enterprise* (ISE) semakin meningkat dengan beragam layanan yang ditawarkan, termasuk pendidikan, kesehatan, pelayanan perhotelan, dan perdagangan barang konsumsi (Kadir, MABA, & Sarif, SM 2016). Jenis lembaga ini didirikan dari modal (berupa barang atau uang) yang dikumpulkan melalui infak dan sedekah. *Islamic Social Enterprise* (ISE) memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dengan menawarkan barang dan jasa dengan harga dan biaya yang terjangkau, sekaligus memberikan pendapatan untuk keberlanjutannya sendiri.

Islamic Social Enterprise (ISE) yang begitu kreatif dan lebih menarik, namun masih jauh dari cukup. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pemberdayaan masyarakat ini didasarkan atas keadaan sosial di masyarakat namun hal itu tidak menjalin terjadi sebuah pemberdayaan masyarakat dan kemandirian secara berkelanjutan. Hal itulah yang akhirnya muncul istilah *Islamic Social Enterprise* (ISE) dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan alasan dan tujuan yang kuat. Dengan modal pemberdayaan masyarakat berupa dana sosial dengan menawarkan konsep bahwa dana donasi yg didapatkan tidak langsung untuk didistribusikan

namun dikelola terlebih dahulu dalam bentuk bisnis sehingga bisa menjamin keberlangsungan program sehingga bisa membuat sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat lebih mandiri dan tidak mengandalkan dana donasi yang didapatkan suatu individu maupun kelompok masyarakat. Hal inilah yang harus menjadi sebuah pertimbangan besar bahwa pemberdayaan masyarakat ini bukan hanya memberdayakan masyarakat tapi juga membuat masyarakat mampu mencukupi kebutuhannya secara mandiri melalui program pemberdayaan yang sudah diberdayakan serta berkelanjutan tanpa bergantung pada pihak lain, baik dari sisi ekonomi maupun sosial di masyarakat.

Berbeda dengan pemberdayaan masyarakat yang banyak dibahas oleh penelitian terdahulu, *Islamic Social Enterprise* justru masih sangat minim untuk dibahas. Peneliti hanya menemukan beberapa penelitian di antaranya yang tertulis pada sebuah jurnal Social Work yang ditulis oleh Hadiyanto A. Rachim, Dudi dan Melani Budianti Santoso dengan dengan judul “Menggagas *Islamic Social Enterprise* melalui sebuah masjid” meskipun hal ini tidak membahas langsung terkait dengan proses pemberdayaan ekonomi yang berbasis *Islamic Social Enterprise* tapi setidaknya pada penelitian ini juga menganjurkan adanya pengelolaan masjid yang dikelola menggunakan sebuah sistem Islamic Social Enterprise demi kemaslahatan umat.

Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) merupakan sebuah Yayasan yang didirikan atas dasar aspek pemeliharaan ukhuwah Islamiyah secara luas, demi usaha – usaha dalam mencapai haji yang mabrur, pemanfaatan kemabruran ibadah haji dalam masyarakat, menggerakkan thalabul ilmi dan amal, pelopor kerja – kerja kolektif dan amal jariyah serta tidak adanya campur tangan urusan politik dengan menitik beratkan pada persoalan kerohanian. Yayasan PDHI ini merupakan sebuah Yayasan yang lahir atas keinginan untuk menjadi haji yang mabrur pada tahun 1952 sebanyak 31 orang jamaah Haji mencetuskan ide untuk membentuk sebuah

perkumpulan yang berfungsi sebagai wadah kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan jamaah Haji di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkaitan dengan cita – cita besar Yayasan Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) salah satunya yaitu terkait dengan kegiatan sosial masyarakat. Banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI terkait dengan kegiatan sosial. Salah satu kegiatan tersebut memiliki unsur pemberdayaan masyarakat (*Empowerment*) yang saat ini digunakan sebagai strategi alternatif dalam pembangunan bangsa telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum terlaksana secara maksimal dalam pengimplementasiannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sering diperbincangkan masyarakat karena hal ini terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa kedepan yang dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih minim akan menghambat pertumbuhan perekonomian di suatu bangsa.

Peranan penting Yayasan Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) dalam pemberdayaan masyarakat ini terletak pada sebuah sistem pengelolaan beberapa unit usaha berbasis ekonomi dan juga beberapa unit social di DIY. Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan oleh Yayasan PDHI nampaknya sudah cukup mampu dalam mengelola segala aktivitas perekonomian dan kegiatan sosial di masyarakat. Beberapa kegiatan sosial diantaranya adanya RSIY yang menggratiskan pasiennya bagi yang tidak mampu dan pelaksanaan penggalangan dana bagi sarana prasarana masyarakat umum melalui bentuk wakaf uang. Hal inilah yang menjadikan semua unit usaha baik di bidang sosial maupun ekonomi secara mandiri dalam mempertahankan semua bentuk usahanya karena adanya otonomi dalam proses pelaksanaannya.

Sejauh ini, tidak banyak penelitian yang mengangkat tentang Yayasan PDHI Yogyakarta sebagai fokus kajian. Peneliti hanya menemukan satu penelitian, yakni skripsi Indriati Karmila Dewi yang

berjudul Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta). Hasil risetnya menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan PDHI diserahkan kepada masing-masing pengurus sehingga kontrol dari yayasan kurang maksimal. Maka dalam pengelolaan harta wakaf produktif diperlukan manajemen serta profesionalisme agar sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk mensejahterakan umat (Fariq Wahyudi, 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas terkait bagaimana Yayasan Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) ini bisa mengelola dana filantropi secara produktif bukan konsumtif dalam proses pemberdayaan masyarakat bagi jama'ah pada Yayasan PDHI ataupun bagi masyarakat umum. Dari data yang didapatkan dalam proses penghimpunan sumber dana, Yayasan PDHI ini lebih aktif dalam proses pelaksanaan wakaf, infak dan sedekah untuk dikelola oleh mitra – mitranya melalui kegiatan ataupun usaha – usaha sosial, ekonomi maupun pendidikan. Sedangkan dalam proses pengelolaan wakaf uang Yayasan PDHI ini masih terbilang tradisional yaitu hanya memiliki dua tahapan penghimpunan dan pentasyarufan manfaat secara langsung. Hal ini mengacu pada UUD No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus penelitiannya. Jika pada penelitian terdahulu itu hanya berfokus pada pemberdayaannya masyarakat yang berfokus pada sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), digitalisasi, model pemberdayaan serta tempat dan proses pemberdayaaan nya ataupun pada sistem pengelolaanya. Saat ini justru peneliti fokus pada keduanya yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat ini berbasis *Islamic Social Enterprise* demi kemaslahatan umat dengan peran adanya Yayasan PDHI di daerah Yogyakarta.

Penelitian ini sangat penting dilakukan pada Yayasan PDHI yang merupakan sebuah Yayasan yang usianya sudah cukup lama. Yayasan

PDHI sudah berdiri sejak lama yaitu pada tahun 1977 dengan jumlah jama'ah dan unit usaha maupun sosial yang cukup banyak. Perkembangan Yayasan PDHI dan eksistensinya yang terus meningkat sehingga menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk mengkajinya berdasarkan perspektif pengelolaan dana filantropi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini yang membuat peneliti ingin mengetahui program – program kegiatan yang telah direalisasikan oleh PDHI dalam berbagai bidang sosial maupun ekonomi menggunakan dana filantropi produktif atau konsumtif. Dari latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penelitian ingin menganalisis bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang berbasis *Islamic Social Enterprise* (ISE) dalam melaksanakan berbagai program kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pada Yayasan PDHI Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Islamic Social Enterprise* di Yayasan Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) ?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Islamic Social Enterprise* di Yayasan Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Akademisi

Mahasiswa mampu mendapat pengetahuan dan ilmu baru terkait dengan pemberdayaan masyarakat berbasis *Islamic Social Enterprise* (ISE) di Yayasan Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI).

2. Bagi Pemerintah

- a. Membantu pemerintah dalam programnya untuk mengentaskan Kemiskinan

- b. Membantu pemerintah dalam mengetahui persentase kemiskinan di Kabupaten Sleman
 - c. Memberikan informasi terkait dengan produktivitas masyarakat di bidang perekonomian
3. Bagi Masyarakat
- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan yang dilaksanakan melalui program Islamic Social Enterprise di PDHI
 - b. Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan usaha
 - c. Menerima bantuan dana dari pengelolaan dana filantropi melalui Islamic Social Enterprise.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian terkait dengan *Islamic Social Enterprise* sangat penting untuk dikaji terlebih pada lembaga, yayasan ataupun masjid yang memiliki beberapa unit usaha untuk kegiatan sosial dan ekonomi. ISE pada pemberdayaan ekonomi ini sangatlah penting untuk dibahas karena sistem ini masih dikatakan baru kalangan masyarakat. Kebanyakan literatur ISE ini membahas tentang masjid yang diberdayakan. Oleh karena itu pada penelitian ini telah dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini terkait dengan “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Islamic Social Enterprise pada Yayasan PDHI DIY” dalam telah diteliti oleh beberapa ahli, di antara yang relevan adalah sebagai berikut :

Ahmad Sururi (2017), melaksanakan sebuah analisis dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wanasalam Kabupaten Lebak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Melalui metode penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan tentang pemberdayaan masyarakat melalui PPIP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Lebak telah menerapkan 10 (sepuluh) dari 12 (dua belas) prinsip yang diajukan masyarakat pemberdayaan dalam Mardikanto Dahama dan Bhatnagar (2015:106), kemudian melalui Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kesejahteraan Kabupaten

Wanasalam Lebak tidak mengusung 2 (dua) prinsip pemberdayaan masyarakat prinsip-prinsip kerjasama pembangunan masyarakat mana yang didasarkan pada analisis partisipasi dan pemberdayaan prinsip masyarakat demokratis berdasarkan analisis dalam ilmu aplikasi.

Munif Solikhan (2020), menjelaskan terkait dengan perkembangan pengelolaan zakat bagi masyarakat pemberdayaan di Indonesia, hal ini berkaitan dengan potensi zakat di Indonesia cukup besar mencapai triliunan rupiah. Namun, hal ini masih belum optimal bagi masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan sebuah analisis dengan tinjauan pustaka deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis ditemukan, sejarah, zakat manajemen telah ada sejak Islam masuk ke negeri ini, melalui era kolonial, era kemerdekaan, masa orde baru dan kemudian berlanjut pada masa reformasi. Perkembangan pengelolaan zakat telah cukup masif dan pemerintah telah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat mulai bermunculan dan bersaing mengeluarkan program untuk membantu menemukan solusi atas masalah masyarakat. Dalam zakat konsumtif, dana zakat digunakan untuk membantu masyarakat secara langsung, sedangkan pada zakat produktif, dana zakat disalurkan oleh pemberdayaan masyarakat didukung oleh hasil tersebut, para pengembangan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat telah berkembang cukup progresif namun belum mampu mengatasi secara optimal permasalahan di masyarakat.

Menjadi tantangan bagi setiap negara dan masyarakat, kemiskinan merupakan masalah yang harus diatasi, hal ini disampaikan oleh Ulfi Putra Sany (2019). Kemiskinan merupakan sebuah penyakit dalam islam dan salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan yang efektif adalah adanya peran penting dari pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir tematik. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat dalam al-Qur'an

adalah prinsip ukhuwah, prinsip ta'awun, dan prinsip kesetaraan. Pemberdayaan masyarakat ada beberapa langkah menurut Al-Qur'an antara lain pengembangan diri secara terus menerus, mendorong program zakat dan infaq, melakukan pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi masyarakat, serta menghindari perilaku ekonomi yang dilarang Islam seperti penimbunan dan monopoli (ihtikar).

Pada sebuah penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening yang ditulis oleh Dyah Istiyani (2020). Peneliti menyampaikan tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji proses pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung melalui pengembangan desa wisata termasuk bentuk pemberdayaan masyarakat dan hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk mengkaji karakteristik masyarakat dan kebijakan pemerintah desa. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil dari analisis yang dilaksanakan di temukan bahwa beberapa kegiatan di desa dapat mendukung pengembangan desa wisata di Desa Sukawening, antara lain beternak kelinci, budidaya edamame, sandal, dan kegiatan budaya yang dikelola oleh tim Sarapala. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata berimplikasi pada ketahanan budaya daerah berupa penguatan budaya khususnya panahan dan beberapa perubahan nilai sosial dan lingkungan

Theofillus Baratova Axellino Kristanto, Ayu Aisyah Putri (2021) menjelaskan terkait dengan Pengembangan wisata kebugaran di Indonesia harus menjadi prioritas utama setelah terpuruknya sektor pariwisata selama ini pandemi COVID-19. Dengan peluang masa depan baik di lingkup global maupun domestik, sektor pariwisata kesehatan di Indonesia dapat menjadi kekuatan perekonomian negara. Pada penelitian ini, ditulis dengan tinjauan literatur naratif, berupaya menganalisis *Asset-Based Community Development* (ABCD) sebagai pendekatan yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan peluang masa depan yang

menjanjikan bisnis pariwisata kesehatan Indonesia, langkah-langkah untuk mengembangkan ABCD, dan tantangannya pemberdayaan masyarakat yang ada.

Pada sebuah penelitian yang ditulis oleh M Iqmal Hisyam Kamarudin (2019) dari USIM menganalisis upaya penyusunan alat ukur untuk menangkap keislaman akuntabilitas dari aspek “akuntabilitas untuk apa”. Dengan tujuan instrumen pengukuran ini dikembangkan oleh mempertimbangkan sifat sosial dan ekonomi dalam organisasi Islam. Desain penelitian ini mendefinisikan konsep akuntabilitas Islam dari perspektif "akuntabilitas untuk apa". Itu diurai menjadi item-item tertentu yang sesuai dengan *Islamic Social Enterprise* (ISE). Selanjutnya, item-item tersebut dioperasionalisasikan menjadi item-item berskala dan disusun ulang secara empiris melalui analisis faktor pada data yang diperoleh dari pemangku kepentingan *Islamic Social Enterprise* (ISE) di Malaysia. Hasil penelitian ini mengembangkan instrumen pengukuran akuntabilitas Islam dari perspektif “akuntabilitas untuk apa” untuk *Islamic Social Enterprise* (ISE). Sebanyak 25 item diakui dan divalidasi di bawah empat dimensi akuntabilitas yaitu, akuntabilitas input, akuntabilitas output, akuntabilitas untuk prosedural dan akuntabilitas prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Hal ini memberikan sebuah data bahwa tidak semua instrumen pengukuran cocok untuk setiap Islam jenis organisasi karena karakteristik organisasi Islam yang berbeda.

Pada sebuah penelitiannya M Iqmal Hisyam Kamarudin (2019) dari USIM menganalisis sebuah tujuan untuk menyajikan model akuntabilitas keuangan Islam yang terintegrasi, yang berbeda dengan model dan kerangka akuntabilitas sebelumnya. Dengan menggunakan ketiga aspek akuntabilitas yaitu: (i) akuntabilitas kepada siapa (kelompok akuntabilitas); (ii) akuntabilitas untuk apa (dimensi akuntabilitas); dan (iii) akuntabilitas tentang bagaimana (alat dan proses akuntabilitas) diintegrasikan ke dalam satu model. Dalam mengembangkan model tersebut, penelitian ini

menggunakan metode perbandingan antara model akuntabilitas sebelumnya dan model akuntabilitas Islam dengan masukan literatur tambahan dari aspek akuntabilitas keuangan dan perspektif akuntabilitas Islam yaitu *Islamic Social Enterprise* (ISE). Hasil penelitian ini memperkenalkan model akuntabilitas keuangan Islam terintegrasi khusus untuk *Islamic Social Enterprise* (ISE), salah satu jenis lembaga yang muncul di bawah sektor nirlaba.

Aris Risdiana (2017), melaksanakan analisis dengan judul “Peran PDHI pada Yayasan PDHI dengan judul (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) dalam Mengembangkan Peradaban Masyarakat (Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen sumber daya manusia di PDHI sebagai aset utama dan pendukung keberhasilan program sosial yang telah dilaksanakan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pembicara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa PDHI cukup aktif berpartisipasi dalam membangun peradaban, meskipun pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya masih relatif sederhana. PDHI telah menginisiasi pembangunan masjid di berbagai daerah di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan mendirikan pendidikan rumah sakit, pusat Islam dan panti asuhan. Studi ini menyediakan kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di PDHI masih sederhana, manajemen sumber daya manusia telah dilaksanakan tetapi tidak dikonseptualisasikan secara default dan hanya diterapkan secara implisit.

Sebuah penelitian di Bangladesh dengan judul “*Islamic Social Enterprise in Bangladesh : Conceptual and Institutional Challenges*” yang dianalisis oleh Md. Fazia Mohiuddin (2017) dengan tujuan bagaimana *Islamic Social Enterprise* (ISE) dapat berkontribusi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sektor ketiga. Metode penelitian ini menggunakan sebuah

analisis keadaan perekonomian di Bangladesh dengan mengambil beberapa sampel yang ada. Temuan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah Bangladesh harus menyediakan lingkungan hukum dan peraturan yang terpisah untuk perusahaan sosial yang berbasis islam untuk tumbuh dalam ukuran dan skala. Selain itu, kertas itu datang dengan tiga tema yang dapat memberikan pedoman penting bagi Islam Bangladesh perusahaan sosial untuk meningkatkan operasi dan efektivitas.

Islamic Social Enterprise (ISE) dapat mengadopsi definisi *Social Enterprise* (SE) yang serupa, tetapi harus dibedakan dengan tambahan mengamalkan Islam. Ormas Islam seperti *Islamic Social Enterprise* (ISE) harus memiliki nilai-nilai Islami, seperti ibadah atau ketaatan kepada Allah dan menjalankan berdasarkan ajaran Islam atau prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad (1991). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Islamic Social Enterprise* (ISE) adalah sebuah entitas yang didorong oleh tujuan sosial dan bisnis sesuai dengan prinsip dan nilai Islam (Kamaruddin dan Auzair, 2018).

Social Enterprise (SE) dan *Islamic Social Enterprise* (ISE) didorong terutama oleh tujuan sosial, sebagian besar peneliti setuju bahwa *Social Enterprise* (SE) dan *Islamic Social Enterprise* (ISE) diklasifikasikan sebagai bagian dari sektor nirlaba (Defourny and Nyssens, 2008). Di dalam Malaysia, organisasi nirlaba termasuk masyarakat, asosiasi, yayasan dan perusahaan yang dibatasi oleh jaminan (CLBG). Masing-masing organisasi nirlaba ini terikat undang-undang khusus seperti Trustee (Incorporation) Act 1952, Companies Act 2016, Society Act 1966 atau State Enactment.

Salah satu Yayasan yang memiliki unit usaha yang sangat sudah dikenal masyarakat di daerah Yogyakarta yaitu Yayasan Dompot Dhuafa yang merupakan sebuah organisasi filantropi dan kemanusiaan yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat dan kemanusiaan. Bergulir pemberdayaan melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf), serta dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan amanah. Dalam

pengelolaannya dikembangkan konsep kasih sayang atau rasa peduli terhadap sesama sebagai akar dari gerakan filantropi yang mengandaikan lima pilar program yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Dakwah dan Budaya.

Mampu menghadirkan program-program yang baik untuk dirasakan sesama, tentunya Dompot Dhuafa juga mempererat kerjasama. Langkah dengan memperluas layanan jaringan. Maka untuk melengkapi perjalanannya saat ini, Dompot Dhuafa hadir di 6 kantor layanan, 31 cabang dalam negeri, 5 cabang luar negeri. Tak hanya itu, Dompot Dhuafa juga telah mengembangkan 157 zona layanan di 32 provinsi, serta menjalin kerjasama dengan 29 mitra strategis di 21 negara. Beberapa program – program dari Yayasan Dompot Dhuafa Yogyakarta diantara sebagai berikut: Dakwah (Dakwah pedalaman), Sosial (Layanan Mustahik, Pringgondani, DD volunteers), Kesehatan (Gerai sehat, Pos Sehat, Kawasan sehat), Pendidikan (SLI, Beastudi Inspiratif, Inspiring library, YES, YE PRO, Beastudi etos), Ekonomi (Kampung wisata aloevera, Minapadi, Budidaya ubi ase putih, Dampingan koperasi beras organik).

Penelitian yang dilaksanakan oleh M. Mulyadi pada tahun 2012 yang menganalisis terkait dengan program Pemberdayaan Masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat pemerintah dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat adalah juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, termasuk organisasi kemasyarakatan. konsep ini memberi tekanan pemberdayaan untuk mampu menciptakan masyarakat mandiri. Dompot Dhuafa adalah salah satu dari sekian banyak organisasi masyarakat di Indonesia dan kini telah melakukan pembelanjaan cukup banyak upaya pemberdayaan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah layanan kesehatan (LKS) dan pendidikan.

Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Hasby Ash Shiddiq dan Nurlaili Khikmawati (2022) untuk itu penelitian ini dilakukan untuk

mengkaji pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat miskin di Desa Leuwilaja Kabupaten Majalengka beserta pengelolaan dan kendalanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa menginisiasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Leuwilaja Kabupaten Majalengka melalui pelatihan menganyam rotan dan memberikan bantuan berupa bahan mentah (rotan mentah). Pemberdayaan masyarakat di Desa Leuwilaja dilakukan dengan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pada tahun 2018 beberapa peneliti (Shafwan Ismail, Sri Sudiarti, M Ridwan) melaksanakan sebuah penelitian untuk mengkaji peran Dompot Dhuafa Waspada sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang muncul pada penelitian yang ada, dianalisis menggunakan metode deskriptif, analitis dan kritis dengan analisis SWOT dengan strategi agresif. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa. Penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dengan berbagai cara, seperti auto zakat (Kartu Infaq), donasi, teledonasi, Donasi melalui online banking, Donasi melalui counter kunjungan serta promosi dan program di website dan distribusi Dompot Dhuafa Waspada menggulirkan berbagai program pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara & Aceh sejak tahun 2015. Program tersebut beroperasi di empat bidang, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan pembangunan sosial. Dompot Dhuafa telah menyalurkan zakat dengan cara yang produktif, antara lain dengan menyalurkan zakat dalam bentuk pinjaman modal berupa usaha mandiri masyarakat berupa pinjaman kebajikan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh M. Faiz Abudalisa & M. Hafiar Baidlowi (2021) Kajian ini bermaksud memberikan rumusan strategi pemberdayaan masyarakat di masa pandemi yang dilakukan oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa cabang Malang. Penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi terhadap pranata sosial. Semua data bersifat primer dan digali berdasarkan pedoman wawancara dan dokumentasi, pada tahap akhir disajikan setelah melalui proses triangulasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa hal penting yaitu pelaksanaan program Aksi Peduli Dampak Corona (APDC) di masa pandemi Covid-19 yaitu: 1) budidaya ikan di kolam buatan, program budidaya ikan air tawar yang dikelola langsung oleh masyarakat sekitar. menggunakan media tambak buatan, 2) Petani Pemberdaya adalah kegiatan bercocok tanam berupa sayuran dan buah-buahan lokal yang merupakan komoditas unggulan di wilayah Malang. 3) Peternakan merupakan salah satu gerakan Aksi Peduli Dampak Corona, disini Dompot Dhuafa Jatim menghadirkan kurang lebih 30 ekor domba untuk dijadikan dikelola oleh masyarakat sekitar yang terkena dampak pandemi.

Dari beberapa hasil penelitian yang sudah di analisis oleh beberapa penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilaksanakan lebih fokus pada satu hal dari yang akan dibahas pada penelitian ini. Misalnya, pada sebuah penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukaening yang dilaksanakan oleh Dyah Istiyani (2020). Hal ini lebih fokus pada bagaimana sistem pemberdayaan masyarakatnya melalui pengembangan desa. Sedangkan pada penelitian yang dilaksanakan saat ini merupakan sebuah penelitian yang fokus pada dua hal yaitu pemberdayaan masyarakat dan juga *Social Enterprise* (SE). Hal ini dilakukan peneliti agar mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat ini mampu memiliki sistem kemandirian sesuai dengan prinsip yang ada pada sistem *Social Enterprise* (SE) dan tidak ada lagi pemberdayaan masyarakat yang masih bergantung pada dana donasi dari pihak – pihak lain atau bisa dikatakan adalah dana donasi mutlak tanpa adanya pengelolaan dan pengembangan terlebih dahulu sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki arti suatu proses menjadi efisien sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik kondisi kehidupannya. Menurut Sumardjo, (2003) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses sumber daya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depannya sendiri dengan ikut mempengaruhi dan mewujudkan kualitas masyarakat. hidup bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka.

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 disebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pendayagunaan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Widjaja (2011) menjelaskan bahwa hakikat pemberdayaan adalah upaya membangkitkan seluruh kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk maju dalam perekonomian dan kesejahteraan. Pemberdayaan menurut Adams (2003:8) berarti cara dan metode yang digunakan oleh individu, kelompok dan atau masyarakat agar mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka sendiri, sehingga mampu bekerja dan saling membantu untuk memaksimalkan kualitas mereka. hidup.

Konsep mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut (Habib, 2021) beberapa program atau proyek pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi antara lain : (1) bantuan modal (2) bantuan pembangunan prasarana (3) bantuan pendampingan (4) penguatan kelembagaan (5) penguatan kemitraan usaha.

Istilah “pemberdayaan masyarakat” cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi ditelinga kita mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial / kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat/dengar mulai dari koran, radio, televisi, dan media internet. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal, umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “empowerment”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan (Munawar Noor, 2011).

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan

dan sumber daya yang dimiliki (Nugraha, 2009). Dalam pendapat lain, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan) (Purbathin, 2010).

b. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Menurut Islam

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip *ukhuwah*, Prinsip *ta'awun*, dan

- 1) Prinsip persamaan derajat, Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Pertama, prinsip *ukhuwah*. *Ukhuwah* dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ء

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”
(QS. Al-Hujurat [49]:10)

Rasulullah mengumpamakan umat Islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. (HR. Imam Bukhari. No.5594) Di hadis lain Beliau berpesan bahwa umat Islam hendaknya bersikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi terhadap sesama layaknya sebuah tubuh, di mana jika ada satu bagian yang merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam (HR. Imam Muslim. No. 4691).

Dalam konteks pemberdayaan, ukhuwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW.

“Barangsiapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat.” (HR. Imam Muslim. No. 4873). Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.

- 2) Kedua, prinsip *ta'awun*. Allah SWT mendorong manusia untuk saling tolong-menolong sesamanya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلَيْدَ وَلَا آيَاتِ اللَّهِ
الْبَيِّنَاتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,

“sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:2)

Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan *ukhuwah*.

Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan *ta'awun*, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

- 3) Ketiga, prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Islam telah memproklamirkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui. Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]:13)

Ayat diatas menegaskan persamaan derajat antar umat manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat di atas juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi *wasilah* untuk tolong-menolong dan saling membantu. Allah SWT berfirman dalam ayat lain :

هُمْ يَفْقِسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أَنْ تُخْلُفَ سَمَنًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْطَانًا مُّحَرِّمًا لِّرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (QS. Az-Zukhruf [43]:32).

Menurut banyak ahli tafsir (Athiyyah, 1984:25.201), kata *sukhriyah* dalam ayat ini mengandung arti memanfaatkan dan mempekerjakan. Ayat ini mengandung arti bahwa manusia dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat manusia secara umum, dan bukan untuk berbangga-bangga dan saling merendahkan. Ayat ini mengarahkan manusia untuk saling membantu, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak ada

yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat ini merupakan dorongan bagi semua pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam setiap komunitas pasti ada potensi yang bisa diberdayakan. “... dan rahmatKu meliputi segala sesuatu ...”

c. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi aras sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk :

1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.

Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996).

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Dalam sebuah makalah yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Implementasi” Hutomo, Mardi Yatmo (2000). Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary (1982), kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu:

- a) *To give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.
- b) *To give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau kepercayaan.

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di Negara-negara sedang berkembang wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disintegrasi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor - faktor produksi oleh penguasa.

Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan

dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang / jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Dalam hal ini masyarakat diharapkan akan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Dwi, 2013).

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud disini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam penentuan hak-hak politiknya.

2. *Islamic Social Enterprise (ISE)*

Kuran (2001) menyatakan bahwa bentuk peraditan lembaga Islam didirikan sekitar tahun 755, selama abad ke 2 dan 3 Islam. Sejalan dengan itu Babacan (2011) menyatakan bahwa praktik lembaga filantropi Islam di negara-negara Islam dimulai pada tahap awal kehidupan sosial dan intelektual Islam. Namun diyakini bahwa lembaga-lembaga Islam didirikan lebih awal pada masa Nabi Muhammad seperti pendirian masjid dan baitul- mal lembaga selama itu. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga Islam telah melayani umat Islam sejak awal era Islam hingga saat ini.

Bahkan, Alterman et al.(2005) dalam penelitiannya menemukan bahwa di antara banyak lembaga, umat Islam lebih cenderung

berdonasi di lembaga keagamaan yang merupakan lembaga Islam. Selain itu, mereka juga memperkirakan total kontribusi Muslim terhadap dana amal Islam antara \$250 miliar hingga \$1 triliun per tahun. Estimasi ini memperhitungkan perkiraan pemberian per kapita di beberapa negara, pendapatan per kapita di negara mayoritas Muslim, agama, perintah untuk menyumbangkan setidaknya 10 persen dari pendapatan seseorang untuk amal dan faktor lainnya.

Adanya *Islamic Social Enterprise* merupakan alternatif dari Social Enterprise Barat. Hal ini karena *Islamic Social Enterprise* didasarkan pada tuntunan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Metode fiqh adalah metode yang digunakan oleh para ulama mujtahid dan fatwa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat As-Sunnah untuk masalah-masalah baru tersebut. Lima metode umum fiqh yang dibahas bahwa setiap item dinilai berdasarkan niat, kepercayaan tidak hilang dengan keraguan, kesulitan dalam membawa kenyamanan, bahaya harus dihilangkan dan hukum adat.

a. Pengertian *Social Enterprise* (SE)

Secara umum, SE dapat didefinisikan terutama sebagai tujuan sosial di mana surplusnya terutama diinvestasikan kembali untuk tujuan tersebut dalam bisnis atau masyarakat, daripada didorong untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham seperti di sektor swasta (Spear, Cornforth & Aiken, 2009; Kantor Kabinet, 2006; Kerlin, 2006; DTI, 2002). Sebagai usaha swasta, kegiatan usaha UMKM dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dengan rangkaian kegiatan usaha seperti perdagangan, kontrak pemberian jasa, seni budaya, pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, daur ulang dan penyediaan pengasuhan anak. Meskipun SE bervariasi dalam kegiatan usahanya, namun dapat disederhanakan menjadi empat karakteristik umum seperti yang dikemukakan oleh Di Domenico, Haugh dan Tracey (2010) yaitu:

(1) pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan; (2) bertujuan untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan; (3) menghasilkan manfaat tambahan seperti modal sosial dan kohesi komunitas; dan (4) terkait erat dengan kelompok sasaran organisasi. Karakteristik ini seharusnya ada disetiap organisasi yang mengimplementasikan SE.

Menurut Nyssens dan Defourny (2012), EMES European Research Network telah berkembang Pendekatan EMES untuk Perusahaan Sosial dimana SE dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama yaitu: (1) dimensi ekonomi dan kewirausahaan; (2) dimensi sosial; dan (3) dimensi tata kelola partisipatif. Dari dimensi ekonomi dan kewirausahaan SE mengandung kegiatan yang terus menerus menghasilkan barang dan/atau menjual jasa. Selain itu, terkait dengan kegiatan bisnis, juga memiliki risiko ekonomi yang signifikan serta kegiatan bisnis swasta.

Namun, sebagai sektor nirlaba dan menerima pekerja pendukung sukarela, SE hanya mensyaratkan jumlah minimum pekerja yang dibayar untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dari dimensi sosial SE mengandung tujuan yang jelas untuk keuntungan masyarakat karena dijalankan oleh organisasi nirlaba. Selain itu, SE merupakan inisiatif yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dan juga memiliki pembagian keuntungan yang terbatas karena tidak dijalankan sebagai entitas swasta. Dari dimensi tata kelola partisipatif SE mengandung tingkat

b. Pengertian *Islamic Social Enterprise* (ISE)

Definisi *Islamic Social Enterprise* adalah sebuah entitas berbasis Islam yang memperoleh (dalam bentuk aset moneter dan non moneter) dari sumber Amal Islam (melalui wakaf, sedekah hibah dan qardh) dan menyalurkannya ke dalam kegiatan bisnis (barang dan jasa) dengan tujuan untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan dan pada saat yang sama mempertahankan kontribusi dalam waktu yang lama (Mohd

Abid Boulven, dkk 2018). ISE merupakan Usaha sosial yang mematuhi aturan dan prinsip syariah sekaligus memastikan keseimbangan antara hasil material dan spiritual (Muhammed Nurul Aini, dkk 2016).

Islamic Social Enterprise merupakan sebuah organisasi nirlaba yang menghimpun zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dan memenuhi kriteria wirausaha sosial mengadopsi pendekatan kewirausahaan, mengambil tindakan langsung untuk mendapatkan pendapatan, mencapai misi sosialnya dan menciptakan multiplier effect yang besar tetapi distribusi keuntungan terbatas (Sri Rahayu H, 2019). ISE adalah entitas yang didorong oleh tujuan sosial dan bisnis sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam (Risidiana, 2020).

Dalam Islam, tata kelola paling terkait dengan konsep akuntabilitas. Dari perspektif Islam, Shahul (2000) dan Lewis (2006) akuntabilitas dapat dilihat dari dua perspektif yaitu akuntabilitas manusia kepada Allah (hablum minallah) dan pertanggungjawaban manusia kepada orang lain (hablum minannas). Hablum minallah dikembangkan dari konsep khilafah (kekhalifahan) dan konsep amanah (memercayai). Konsep-konsep ini terjadi ketika orang memuji Allah sebagai khalifah dan patuhi semua perintah dan jauhi segala peringatan dari-Nya di dunia ini. Kewajiban ini telah dinyatakan dalam ayat berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan biarlah [muncul] dari Anda suatu bangsa yang mengundang [semua yang] baik, memerintahkan apa yang benar dan melarang apa yang salah, dan mereka akan beruntung.” (Ali Imran 3:104)

1) Komponen dan Karakteristik

Tujuan dan nilai-nilai yang mendasari

- a) Berdasarkan ibadah atau ketaatan kepada Allah SWT dan beroperasi berdasarkan ajaran Islam
- b) Pencapaian tertinggi dari pendirian ISE adalah untuk mencapai al-falah
- c) Disutradarai oleh maqashid syariah
- d) Tarif terjangkau
- e) Melayani donatur dengan menerima dana dan menyalurkannya kepada penerima melalui kegiatan bisnis untuk tujuan keberlanjutan, redistribusi dan reinvestasi
- f) Kegiatan Sosial untuk ISE Sebagai Sumber Modal
- g) Zakat merupakan dana dari donatur harus didistribusikan ke delapan jenis
- h) Wakaf merupakan tentang keabadian aset untuk dikelola agar bermanfaat untuk kepentingan umat
- i) Sedekah dan hibah Dianggap Sebagai kegiatan sosial Paling Fleksibel

Adanya dana zakat, infaq dan sedekah merupakan bentuk dukungan untuk membantu usaha - usaha masyarakat yang akan diberikan kepada penerima manfaat. (M. Iqmal Hisyam Kamarudin, Nurul Aini M, Nata Ramli, Syadiyah Abdul Shukor, 2016).

2) Kegiatan ISE

- a) Dana amal islami yang terkumpul bisa untuk investasi untuk masa depan
- b) Memberikan layanan dalam beberapa memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan pelanggan terkait

3) Pendapatan dan distribusi pendapatan

- a) Modal disumbangkan melalui kegiatan sedekah yang memenuhi syarat
- b) Pembagian pendapatan dilakukan kepada penerima (tergantung pada jenis amalnya) setelah dikurangi semua yang terlibat

4) Karakteristik ISE

- a) Berdasarkan tujuan Islam dan kepatuhan syariah
- b) Didukung oleh dana amal Islam
- c) Dijalankan sebagian besar oleh muslim
- d) Pendapatan dihasilkan dari bisnis sosial

c. Perbedaan Antara *Social Enterprise* (SE) dan *Social Enterprise* (SE)

Social Enterprise (SE) terkenal di negara-negara Barat pada tahun 1980-an. SE didefinisikan dan dikonseptualisasikan dalam spektrum yang sangat luas. Istilah 'usaha sosial' dapat dipertukarkan dengan istilah kesukarelaan, pekerjaan sosial, kesejahteraan dan kewirausahaan. Istilah tersebut menyimpulkan dua bidang, yaitu sosial dan kewirausahaan. Kedua area ini kemudian digabungkan untuk membentuk SE. Literatur menunjukkan bahwa SE telah dilihat dari banyak aspek seperti dari perspektif: (i) tujuannya (Spear, Comfort & Aiken, 2009; Kerlin, 2006); (ii) aktivitas (Di Domenico, Haugh & Tracey, 2010); dan (iii) bentuk pendirian (Defourny & Nyssens, 2008). SE terutama memiliki tujuan sosial di mana surplusnya terutama diinvestasikan kembali dalam bisnis atau masyarakat, daripada didorong untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Spear Et al., 2009; Kerlin, 2006) atau memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik (Defourny & Nyssens, 2010) seperti di sektor swasta. Doherty, Haugh dan Lyon (2014) mengakui misi ganda keberlanjutan keuangan dan tujuan sosial di SE. Sehubungan dengan kegiatan SE, Dees (1998) merujuk SE sebagai organisasi swasta yang didedikasikan untuk memecahkan masalah sosial dan melayani yang kurang beruntung dengan menyediakan barang yang mungkin tidak cukup disampaikan oleh sektor publik atau swasta.

Ada berbagai mode pendirian SE dan ISE. Ini termasuk koperasi sosial yang telah digunakan di Italia, Polandia dan Perancis, koperasi solidaritas sosial di Portugal, koperasi inisiatif sosial di Spanyol,

perusahaan tujuan sosial di Belgia dan perusahaan kepentingan masyarakat di Inggris. Studi sebelumnya oleh Spear Et al.(2009) mengidentifikasi empat jenis UK yaitu: (i) mutual; (ii) amal perdagangan; (iii) pemisahan sektor publik; dan (iv) SE baru dimulai. Namun, sebuah studi tentang SE di negara-negara Asia Timur yang dilakukan oleh Defourny dan Kim (2011) mengidentifikasi berbagai jenis SE berdasarkan lingkungan negara tersebut. Perbedaan jenis SE didasarkan pada pandangan perspektif hukum.

Dalam perspektif lain, SE dan ISE juga dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama yaitu: (i) dimensi ekonomi dan kewirausahaan; (ii) dimensi sosial; dan (iii) dimensi tata kelola partisipatif (Defourny & Nyssens, 2008). Dari dimensi ekonomi dan kewirausahaan, ISE menjalankan kegiatan yang berkesinambungan dengan memproduksi barang dan/atau memperdagangkan jasa barang konsumsi kepada pelanggan.

SE sebagian besar telah didukung oleh pekerja sukarela. Selain itu, ISE mempekerjakan pekerja dengan upah minimum untuk menjalankan kegiatan usahanya yang juga menjadi bagian dari kontribusinya dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Dari aspek dimensi sosial, SE mengandung tujuan yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat dan dijalankan oleh organisasi nirlaba dengan pembagian keuntungan yang terbatas. Terakhir, dari dimensi tata kelola partisipatif, SE mengandung tingkat otonomi yang tinggi karena tidak memiliki pemegang saham sebagai pemilik. Ketiadaan pemegang saham mempengaruhi proses pengambilan keputusan karena keputusan tidak dilakukan berdasarkan kepemilikan modal seperti yang biasa dilakukan oleh bisnis swasta.

Selain itu, klasifikasi SE dan ISE yang berbeda di seluruh dunia juga menyebabkan perbedaan kontribusi dan dampak dari SE tersebut. Misalnya, SE di AS dikategorikan sebagai organisasi nirlaba, yang

menyebabkan kesulitan dalam mendistribusikan laba yang dihasilkan karena pembatasan regulator. Di sisi lain, SE di kawasan Eropa diperbolehkan mendistribusikan sebagian keuntungannya karena dikategorikan sebagai koperasi atau perusahaan sosial (Kerlin, 2006). Sementara itu, isu ini tampaknya tidak menjadi satu di kawasan Asia di mana SE di negara-negara Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan berhak memilih organisasi nirlaba atau koperasi sebagai jenis kategorisasinya (Kamaruddin & Auzair, 2018 ;Defourney & Kim, 2011).

Dalam hal perbedaan antara SE dan ISE, diyakini bahwa ISE beroperasi dengan tambahan prinsip dan nilai Islam dibandingkan dengan SE. Ada tiga konsep Islam penting yang erat kaitannya dalam setiap organisasi Islam termasuk ISE, yaitu: (i)al-falah(sukses dunia dan akhirat); (ii)masalahah(kepentingan umum); dan (iii)maqasid syariah(tujuan Islam). Dalam hal ini, tujuan utama setiap organisasi Islam termasuk ISE adalah untuk mencapainya al-falah. Di samping itu,maslahah juga menjadi tujuan penting lain yang perlu menjadi fokus setiap organisasi Islam termasuk ISE. Untuk mencapai dua tujuan penting ini, ISE harus dioperasikan berdasarkan maqashid syariah(Ahmad, 1988). Untuk ini, ada lima elemen dasar di bawah ini maqasid syariah yang perlu diperhatikan untuk setiap kegiatan dan keputusan yang diambil oleh ISE, yaitu: (i) pelestarian iman, (ii) pelestarian jiwa, (iii) pelestarian akal, (iv) pelestarian keturunan dan (v) pelestarian kekayaan (Ghazanfar & Islahi, 1997; Chapra, 1992).

Sementara ISE dianggap sebagai dimensi baru dari sektor ekonomi ketiga yang bertujuan untuk memfasilitasi sosial ekonomi masyarakat miskin, terdapat lebih banyak kesulitan untuk mengembangkan definisi konkret dari ISE karena variabilitasnya. Hal ini secara hati-hati memposisikan definisi dan konteks ISE dengan mengevaluasi aspek-aspek yang relevan dari ISE, termasuk tujuan ISE, kontrak amal Islam, kegiatan dan peningkatan pendapatan untuk

mendapatkan dimensi ISE yang kuat. Istilah Islamic Social Enterprise (iSE) saat ini dikenal dan digunakan sesuai dengan kebutuhan saat ini untuk menjamin keberlangsungan lembaga filantropis dan menjaga kesinambungan donasi dan layanan kepada pihak ketiga.

3. Yayasan

Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. “Yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan,” (uhu.go.id). Kendati demikian, Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan. Yayasan tersebut secara khusus berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun non-profit, Yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada di bawahnya, bukan untuk memperkaya diri ataupun pemilik Yayasan.

A. Dasar hukum

Dasar hukum Yayasan baru pertama kali terbit pada tahun 2001 seiring disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Regulasi tersebut diundangkan dengan sejumlah pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan.

- 2) Bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan.
- 3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan.

Seiring berjalannya waktu, dasar hukum Yayasan diperbaharui melalui UU No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, namun Undang-Undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap-Undang-Undang tersebut.
- 2) Bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan.
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

B. Struktur Organisasi

Organisasi adalah kesatuan susunan dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian orang dan sebagainya dalam perkumpulan

dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama (Nazir, 1988). Struktur organisasi yayasan memiliki peran yang sangat penting. Karena struktur organisasi yayasan ini berfungsi untuk menjelaskan peran anggota, memperjelas tugas-tugas anggota, memperjelas alur hubungan pertanggungjawaban anggota, meminimalisir konflik, dan efisiensi operasional yayasan. Pada umumnya, organisasi memiliki tiga sifat, yaitu: (1) Memiliki tujuan. Biasanya tujuan yang dituju tergantung dari masing-masing organisasi itu sendiri; (2) Terdiri dari banyak anggota; dan (3) Berbentuk struktur sistematis. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengatur tugas-tugas setiap anggota. Sebuah organisasi terdiri dari 3 unsur pokok yakni orang-orang, tujuan, dan struktur. Sehingga fungsi utama organisasi adalah: a) sebagai wadah bagi orang-orang dalam bekerja sama mencapai satu tujuan; b) sebagai wadah bagi orang-orang dalam membentuk perilaku dan budaya organisasi; dan c) sebagai wadah untuk mencapai sasaran yang sulit dicapai seorang diri. Orang-orang dalam organisasi pada akhirnya membentuk struktur yang menunjang pencapaian tujuan.¹²

Dengan demikian, penyusunan dan penyesuaian struktur organisasi yayasan merupakan komponen yang tidak boleh ditinggalkan. Karena penyusunan dan penyesuaian struktur organisasi dapat berarti susunan unit kerja yang saling berhubungan baik vertikal maupun horizontal dengan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan demi tujuan utama dibidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Sudah tidak dipungkiri, dengan adanya struktur organisasi yang tersusun dan disesuaikan dengan baik, maka organisasi tersebut akan mudah dalam mencapai tujuan yang ingin diwujudkan. Selain itu, kendala-kendala yang besar kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang dapat dihadapi dengan mudah.

Dalam pelaksanaan sebuah yayasan, setiap organ yayasan seharusnya memahami tentang regulasi yayasan. Ini dikarenakan agar setiap warga yayasan tidak salah kaprah dalam bertindak dan melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Regulasi yayasan dirujuk berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan meliputi segala tentang yayasan, contohnya pengertian yayasan, komponen yayasan yang terdiri dari organ yayasan, kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yayasan, pendirian yayasan, dan lain sebagainya. Perlunya pemahaman atas regulasi PP No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan salah satunya mengenai perubahan anggaran dasar yayasan.

Ketentuan penyusunan struktur organisasi yayasan juga tercantum dalam undang-undang yang baru, yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2004 Pasal 44 Ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai susunan ditentukan dalam anggaran dasar. Ada keterkaitan antara penyusunan dan penyesuaian struktur organisasi yayasan dengan regulasi yayasan itu sendiri. Contohnya dalam pembagian tugas atau jabatan organ yayasan, dimana para anggota dilarang merangkap jabatan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)".¹³ Dengan demikian, secara otomatis dalam struktur organisasi yayasan pun tidak akan ditemukan nama anggota yang merangkap jabatan. Para organ yayasan pun tidak akan memiliki wewenang dan tugas yang rangkap. Undang-undang ini dibuat untuk kepentingan yayasan itu sendiri agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Karena apabila organ yayasan merangkap jabatan, maka besar kemungkinan yayasan tersebut akan berjalan dengan banyak kendala, salah satunya adalah dari segi pertanggungjawaban laporan operasional yayasan kepada pimpinan.

C. Peninjauan Alur Dana

Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atau informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan pengendalian manajemen. Yayasan menerapkan proses pengawasannya dengan cukup baik, yaitu dengan sistem kontrol yang dilakukan oleh pimpinan Yayasan, dengan pengawasan keuangan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan atau berjenjang. Terkait dengan permohonan dana untuk menjalankan program, Yayasan sudah melakukannya dengan baik sesuai alurnya, yaitu bagian program itu mengajukan kegiatan dengan jumlah biayanya lalu akan diverifikasi oleh koordinator program. Koordinator program akan menyerahkan kepada bendahara, kemudian bendahara akan melakukan verifikasi berdasarkan *item-item* yang sesuai dengan perencanaan. Setelah bendahara melakukan *review* maka akan diajukan kepada direktur untuk mendapat persetujuan. Pengajuannya disertakan dengan slip penarikan, setelah uangnya sudah dicairkan maka akan ada pengelolaan uang tersebut. Setelah selesai kegiatan maka harus dibuatlah laporan pertanggungjawaban per *item* yang diserahkan kepada bendahara, kemudian bendahara juga harus melaporkan kepada direktur sebagai bukti uang sudah digunakan, uang yang dicairkan itu tidak harus habis, artinya bahwa pelaporannya sesuai dengan *real cost*, jika ada sisa maka harus dikembalikan ke rekening proyek. Setiap pengeluaran harus punya nota, karena pemeriksaan yang dilakukan oleh direktur berdasarkan nota yang ada. Penggunaan uang di Yayasan ini tidak langsung disetujui oleh satu pihak, tetapi berjenjang. Pengauditan juga dilakukan di Yayasan akan tetapi pengauditan khusus untuk laporan

keuangan lembaga belum pernah dilakukan. Pengauditan hanya dilakukan oleh auditor eksternal dari pihak donatur, sebagai bentuk pengawasan pihak donatur terhadap laporan keuangan program yang dilakukan oleh lembaga mitra yaitu Yayasan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suryani, 2017) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan Yayasan merupakan salah satu entitas nirlaba yang menjalankan setiap programnya sesuai dengan program pemberi dana atau donatur. Penerapan sistem pengendalian internal ini sendiri tidak berpengaruh secara langsung pada kualitas laporan keuangan Yayasan, karena dimana pelaporan keuangan untuk pihak donatur dibuat berdasarkan kemauan pihak donatur. Laporan keuangan yang disajikan Yayasan sesuai dengan yang diharapkan pihak donatur sebagai pemberi dana dalam menjalankan program. Laporan keuangan yang disajikan Yayasan juga seringkali dilakukan audit atau pemeriksaan oleh auditor eksternal pemberi dana sebagai bentuk pengawasan donatur pada lembaga mitranya. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurlis dan Yadiati (2017) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan entitas. Meskipun sistem pengendalian internal sudah dilakukan dengan baik pada aktivitas operasi suatu entitas tetapi belum bisa diterapkan secara efektif tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Ketidakefektifan sistem pengendalian internal ini berasal dari kelemahan pengelola entitas yang belum dapat menjalankan sistem pengendalian internal secara optimal.

Laporan keuangan entitas nirlaba merupakan laporan yang dimiliki oleh yayasan. Laporan keuangan entitas nirlaba saat ini diatur dalam ISAK 35. ISAK 35 ini mewajibkan entitas nirlaba

menyajikan pelaporan keuangannya sendiri. Tidak ada standar pelaporan keuangan yang menjadi patokan dalam menyusun laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang dibuat haruslah sesuai dengan struktur pelaporan yang ada, deskripsi dari laporan tersebut pun tidak diatur secara rinci, tetapi bahwa saat memberi nama pada laporan keuangan entitas nonlaba tersebut harus sesuai dengan isi dari laporan. Entitas berorientasi nonlaba tetap harus mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menyajikan laporan keuangannya termasuk catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang sederhana dan mampu dimengerti oleh pembacanya. Selama laporan keuangan yang dibuat Yayasan tidak melanggar aturan, artinya laporan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

D. Delegasi & Wewenang Yayasan

Pendelegasian ialah pelimpahan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain (Hermawan, 2019). Sedangkan wewenang menurut Irwan (2013) dalam Fazira dan Erdawati (2019) adalah hak seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh *delegator* (pemberi wewenang) kepada *delegate* (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama delegator (Muttaqin, 2018).

Kepemimpinan adalah suatu proses dimana seseorang (pimpinan) mempengaruhi para bawahan agar dapat bekerjasama untuk tercapainya tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan dan manajemen yang kuat suatu organisasi dapat mengoptimalkan efektivitas dalam organisasinya. Menurut Hasibuan dan Bahri (2018) kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dapat

meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja organisasi erat kaitannya dengan laba. Organisasi yang mempunyai kinerja baik dianggap memiliki laba yang tinggi dan sebaliknya. Tinggi rendahnya laba memotivasi manajemen untuk melakukan pengaturan terhadap laba. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat mempengaruhi manajemen melakukan manajemen laba. Hasil penelitian Lina (2014) kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi. Sebagai seorang pemimpin sebaiknya selalu melakukan pembaharuan pengetahuan dan selalu mencari informasi terbaru yang berhubungan dengan organisasinya. Sejalan dengan penelitian Suryana, et al (2010) kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pendapat lainnya ada Hasibuan dan Bahri (2018) mengatakan bahwa apabila kepemimpinan dalam suatu organisasi baik, maka kinerja organisasi juga akan membaik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif (Sugiyono, 2008) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan peneliti pada kondisi objek yang alamiah. Beberapa upaya yang dilakukan dalam proses penelitian kualitatif di antaranya yaitu : Wawancara, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan (Nugrahani, 2014).

Pendekatan kualitatif dengan desain penelitian berbasis *grounded theory*. Desain *grounded theory* digunakan untuk mendapatkan teori umum dari sebuah proses, tindakan, atau interaksi dilihat dari sudut pandang subjek penelitian (Merlyn Mourah Karuntu, 2022). Dengan desain ini peneliti berusaha mendapatkan pandangan baru terkait dengan sistem pengelolaan Yayasan PDHI yang sesuai dengan prinsip organisasi saat ini yaitu *Islamic Social Enterprise* (ISE).

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini sendiri yaitu kualitatif, sebab tujuan penelitian ini adalah menggali secara mendalam, menguraikan fenomena yang ada pada program Pemberdayaan Masyarakat berbasis *Islamic Social Enterprise* (ISE). Untuk dapat memberikan gambaran pada Yayasan Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta. pada program tersebut, maka penelitian ini tepatnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Di mana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap variabel-variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain, Penelitian deskriptif juga diartikan sebagai penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai populasi atau daerah tertentu,

atau memetakan fakta berdasarkan cara pandang (kerangka berpikir tertentu pada saat penelitian dilakukan). Selain itu ciri dari penelitian deskriptif adalah : paling utama, paling dominan, paling populer dan lebih mudah atau paling sederhana, karena hanya menyajikan potret keadaan, rancangan penelitiannya dengan menggunakan sumber data dalam bentuk populasi dan sampel dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pengedaran angket (Abdullah, 2018).

B. Lokasi Penelitian

Yayasan Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia (PDHI) adalah sebuah Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia yang berdiri berdasarkan ikrar bersama para jamaah haji di DIY pada tanggal 17 Syawal 1371 H bertepatan dengan tanggal 22 Juli 1952 M di Makkah Al Mukarromah, bahwa setelah Kembali ke Tanah Air, menghimpunkan diri dalam satu wadah yang diberi nama Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia telah di buat Anggaran Dasar dengan peraturan dan ketentuan guna mengatur tata susunan dan kehidupan PDHI.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2022 sampai Februari 2022. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dimulai dari proses pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar proposal dan dilanjutkan dengan penelitian dan juga pengumpulan data yang nantinya akan dikumpulkan pada saat penyusunan laporan.

D. Subjek & Objek Penelitian

Obyek dari penelitian ini sendiri yaitu program pemberdayaan masyarakat di Yayasan PDHI Yogyakarta, Sasoworo, Alun – alun Utara, Yogyakarta 5512 terkait dengan kegiatan Pemberdayaan masyarakat *Islamic Social Enterprise* (ISE) terhadap beberapa lembaga atau mitra yang dinaungi oleh Yayasan PDHI Yogyakarta di bidang sosial maupun ekonomi.

Subjek penelitian merupakan sumber data dari beberapa lembaga yang dinaungi oleh Yayasan Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti yaitu terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat yang berbasis *Islamic Social Enterprise*. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2008). Peneliti mengambil sebanyak 6 sampel dari banyaknya lembaga yang ada di bawah Yayasan PDHI Yogyakarta. Ini beberapa lembaga yang dijadikan sampling pada penelitian ini :

Tabel 3.1. Data Lembaga Sampling Yayasan PDHI

NO	BIDANG	LEMBAGA & KEGIATAN	TEMPAT
1	Pengurus Yayasan PDHI	Sekretaris Umum	Sleman
		Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi	Sleman
2	Pendidikan	MA dan MTS Ibnul Qoyyim Bantul	Bantul
		Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim	Bantul
3	Sosial	Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI	Sleman
4	Dakwah	Islamic Centre Playen, Gunungkidul	Gunung Kidul
		Islam Centre Cangkringan Sleman (TK RA PDHI)	Sleman

E. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka (Arikunto Suharsimi, 2013). Sumber data dengan model penelitian Kualitatif didapatkan dari “Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara beberapa pengurus atau pemimpin

Yayasan PDHI di DIY data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana suatu data dihasilkan. Data primer sendiri dapat diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan informasi terpilih di lokasi penelitian. Berikut data informasinya :

Tabel 3.2. Data Primer Wawancara

NO	NAMA	USIA	INSTANSI	ASAL DAERAH
1	Drs. H. Juanda YHS	69	Sekretaris Umum (Pengurus Yayasan PDHI)	Sasoworo, Alun – alun Utara, Yogyakarta 5512
2	H. M. Arifin S.E	55	Ketua Pemberdayaa n Ekonomi (Pengurus Yayasan PDHI)	Sasoworo, Alun – alun Utara, Yogyakarta 5512
3	Heri Setiawan	46	Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI	Klaci I, Margoluweh Kec. Seyegan Kab. Sleman DIY
4	Ustadzah Tiktik Sulastri	44	TK Al-Kahfi	Jl. Playen Paliyan, Banaran, Playen, Kec. Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah

				Istimewa Yogyakarta 55861
5	Atik Maliha Masruroh. S.Pd. M.Pd	50	PPIQ Putri, Gunung Kidul	Jl.Gandu, RT.05/RW.08, Gandu, Sendangtirto, Kec. Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55573
6	Dian Rahmawati. S.Pd	44	RA PDHI	Kompleks Perum Wirokerten, Jogoragan, Banguntapan, Balong Lor, Potorono, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55196

Sumber : Olahan Pribadi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan atau data yang melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi yang relevan dengan topik terkait pemberdayaan masyarakat berbasis Islamic Social Enterprise (ISE), meliputi buku, artikel jurnal, dan penelitian serta data yang dimiliki oleh pihak Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI). Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait program kegiatan Yayasan PDHI Yogyakarta selama kurun waktu 5 tahun kebelakang. Hal inilah yang menjadi acuan data

dokumentasi pada penelitian yang dilakukan bersama pihak Yayasan PDHI Yogyakarta.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interaktif dan teknik non interaktif. Dimana teknik interaktif dilakukan melalui wawancara, sedangkan teknik observasi non interaktif dilakukan melalui dokumentasi.

1. Wawancara mendalam (*In Depth Interview*) Pertanyaan dalam wawancara mendalam (*In Depth interviewing*) umumnya diajukan secara spontan. Hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai merupakan hubungan yang dibangun dalam suasana “biasa”, sehingga percakapan berlangsung seperti percakapan sehari-hari, yang tidak bersifat formal. Tujuan dari wawancara mendalam ini adalah untuk dapat menyajikan konstruksi kekinian dalam konteks mengenai orang, peristiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam wawancara mendalam, informan dapat mengungkapkan pendapatnya, dan pendapat tersebut dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya (Nugrahani, 2014). Nara sumber penelitian ini antara lain Sekretaris Jenderal Yayasan Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia (PDHI) bernama Drs. H. Juanda YHS yang merupakan salah satu pengurus Yayasan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pihak Yayasan PDHI dan juga mitra atau lembaga di bawah naungan Yayasan PDHI menunjukkan bahwa segala kegiatan dakwah dan oprasional menjadi tanggung jawab Yayasan. Namun, berbeda dengan kegiatan pada mitra dan lembaga di bawah naungan Yayasan PDHI menjadi tanggung jawab masing – masing lembaganya meskipun begitu Yayasan PDHI masih memiliki tanggung jawab sebagai monitoring dan kontroling.

2. Dokumentasi Selain wawancara, peneliti juga melakukan dokumentasi dengan tujuan agar informasi yang diperoleh lebih lengkap. Tinjauan isi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, foto dan dokumen lainnya. Di dalam dokumen tersebut terdapat catatan-catatan penting terkait masalah tersebut, yang memungkinkan diperolehnya data yang lengkap, sah dan tidak berdasarkan pemikiran mereka (Nugrahani, 2014). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data melalui dokumentasi yang bersumber dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat di Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI), untuk kemudian ditinjau dari perspektif Islamic Social Enterprise (ISE).

Data hasil dokumentasi pihak Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) menunjukkan beberapa data struktur organisasi selama satu periode dalam kurun waktu 5 tahun dan ada beberapa asas serta filosofi Yayasan PDHI ini didirikan. Dari data dokumentasi ini menunjukkan beberapa perolehan dana donasi, tanah wakaf dan beberapa fasilitas masyarakat yang sudah di bangun oleh pihak Yayasan PDHI ataupun lembaga yang di naunginya.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dan operasional dari variabel-variabel tersebut bertujuan untuk memudahkan penulis dalam membahas dan melakukan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan. Definisi konseptual dan operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3. Definisi Konseptual

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi	1) Perananan penting dalam

	yang merangkum nilai – nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat <i>people centered, participle, empowerment and sustainable</i> (Chamber, 1995)	memberdayakan masyarakat. 2) Bentuk unit usaha yang dimiliki dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi. 3) Pemberdayaan masyarakat melalui hasil dari unit usaha yang ada.
<i>Islamic Social Enterprise</i>	<i>Islamic Social Enterprise</i> adalah entitas nirlaba Islami yang menerima donasi berupa zakat, infak, sedekah, hibah lalu mendayagunakan sebagiannya untuk aktivitas bisnis yang mana keuntungan bisnis dimanfaatkan untuk tujuan sosial organisasi tersebut (Hati & Idris, 2014)	1) Berlandaskan maqashid syariah dan bertujuan falah 2) Dana Bersumber dari ZISWAF Hibah 3) Memiliki aktivitas bisnis 4) Keuntungan untuk pencapaian tujuan sosial

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Arikunto Suharsimi, 2013). Sedangkan menurut yang lain, instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian (Purwanto, 2018).

Kemudian untuk Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berupa angket pertanyaan data dokumentasi. Garis besar pedoman yaitu:

Tabel 3.4. Instrumen Penelitian

Teknik Pengumpulan Data	Pedoman Umum
Wawancara	<p>1) Menyiapkan informasi dasar terkait proses wawancara meliputi waktu dan lokasi wawancara, nama responden. Selain itu peneliti perlu menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti perekam, aplikasi zoom (jika daring), laptop, alat tulis, form persetujuan (<i>consent form</i>) responden, dan daftar pertanyaan wawancara.</p> <p>2) Interviewer memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara. Setelah itu responden diminta mengisi form persetujuan sebagai responden penelitian. Interviewer memberi gambaran umum pertanyaan yang akan diajukan dan memberikan kesempatan kepada responden untuk bertanya sebelum memulai wawancara. Jika ada istilah-istilah yang mungkin asing dalam pertanyaan, dapat juga disampaikan di awal.</p> <p>3) Menyampaikan pertanyaan pembuka yang tidak langsung pada poin inti penelitian, tetapi pertanyaan-pertanyaan ringan seperti pekerjaan mereka, apa hobi mereka, dan hal ringan lainnya. Tujuannya untuk memecah kebakuan yang mungkin terjadi karena kemungkinan itu adalah perjumpaan pertama dengan responden.</p>

	<p>4) Menyampaikan pertanyaan inti yang diderivasi dari pertanyaan penelitian, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>“Bagaimana latar belakang dan sejarah pendirian unit usaha masjid ini?”</i> b. <i>“Apa yang menjadi nilai-nilai yang diterapkan di unit usaha masjid dan apa bedanya dengan bisnis pada umumnya?”</i> c. <i>“Apakah tujuan dan hasil yang diharapkan dari pendirian unit usaha masjid?”</i> d. <i>“Darimana sumber dana utama pendirian BUMN dan bagaimana distribusi keuntungannya?”</i> e. <i>“Bagaimana perbedaan pengelolaan dana masjid sebelum dan sesudah memiliki unit usaha masjid”</i> f. <i>“Bagaimana perkembangan unit usaha masjid selama ini, seperti jenis usaha, pendapatan, sekaligus kendala-kendala yang dihadapi”</i> g. <i>“Bagaimana dampak unit usaha terhadap pengelolaan masjid serta kepada masyarakat sekitar?”</i> h. <i>“Apa saja yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan unit usaha masjid?”</i> i. <i>“Bagaimana unit usaha masjid ini menjadi dapat mentransformasi atau mengubah cara pengurus mengubah pengelolaan masjid?”</i> <p>5) Dalam proses wawancara, interviewer mengupayakan untuk mengulik jawaban responden lebih dalam untuk mendapatkan informasi yang lebih kuat, misal dengan bertanya</p>
--	--

	<p><i>“mohon ceritakan lebih tentang”, “bolehkan jelaskan lebih rinci tentang.”</i>. Jika durasi wawancara menjadi lebih lama dan responden tidak dapat melanjutkan saat itu, maka interviewer boleh meminta izin kepada responden untuk kembali menemuinya dan menyelesaikan pertanyaan yang belum terjawab.</p> <p>6) Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih kepada responden atas kesedian mereka. Interviewer juga perlu menyampaikan kepada responden jika ada tambahan informasi yang dibutuhkan, interviewer akan memohon kesediaan kembali kepada responden untuk diwawancarai. Terakhir, <i>interviewer</i> akan mengirimkan ringkasan hasil penelitian kepada responden sebagai <i>member checking</i> atas temuan studi.</p>
Dokumentasi	<p>1) Peneliti meminta izin kepada para pengurus masjid untuk meminta foto foto kegiatan, dokumentasi video, serta dokumen tertulis yang berkaitan dengan aktivitas unit usaha masjid, mulai dari perencanaan hingga dokumen terakhir yang dimiliki.</p> <p>2) Dokumen yang diminta sebaiknya berbentuk <i>softfile</i>, namun jika tidak maka peneliti meminta izin untuk menyalin dokumen tersebut baik foto maupun difotokopi.</p> <p>3) Pengurus masjid diminta mengirim melalui media email jika peneliti belum dapat datang langsung ke lokasi</p>

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis dari (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Tiga langkah model ini meliputi: kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis data adalah:

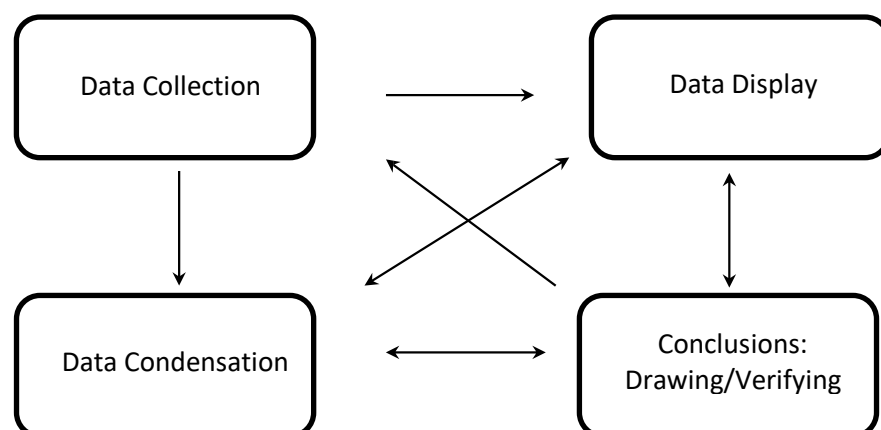
1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data dikumpulkan dari metode yang digunakan yaitu wawancara dan juga berlari. Sebelum dianalisis, data telah dikumpulkan diinterpretasikan sebaik mungkin sehingga dapat dianalisis dengan sebab yang tepat karena data yang diperoleh jarang berupa angka.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan gambaran dari sekumpulan informasi yang terstruktur untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Melalui Penyajian data ini, data akan lebih terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, penulis tentunya akan memberikan gambaran tentang data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian pada kelompok pemberdayaan masyarakat di lembaga - lembaga di bawah naungan Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI).

3. Kondensasi data (*Data Condensation*)



Gambar 3. 1. Konsep Kondensasi

Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014)

Kondensasi atau pemadatan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan/atau mengganti data yang muncul dari hasil catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan data empiris lain, sehingga data menjadi lebih padat. Kondensasi data adalah bagian dari analisis, di mana proses meringkas dilakukan jumlah data yang diperoleh, membuang data yang tidak diperlukan dan fokus pada hal-hal yang dianggap penting sehingga kesimpulan hasil akhir dapat ditarik dan diverifikasi (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, peneliti akan memilih data, tema dan pola yang penting sehingga data tersebut tidak penting untuk dibuang, maka data yang telah dipilih tadi akan dibahas dalam bahasa mereka sendiri. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi berupa laporan kegiatan Yayasan PDHI Yogyakarta.

4. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing and Verification*)

Setelah melewati tahap pertama dan kedua, tahap akhir pun menarik kesimpulan dan verifikasi. Saat membuat kesimpulan, itu perlu juga disertai dengan verifikasi, sehingga kesimpulan yang diperoleh mampu dimintai pertanggungjawaban. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menarik kesimpulan dan harus sesuai dengan tema/topik penelitian, tujuan penelitian, pemecahan masalah, data dalam penelitian, temuan dari hasil analisis dalam penelitian, dan teori/ilmu yang relevan. Juga dalam Verifikasi kesimpulan dapat dilakukan dengan mengulang langkah-langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah-langkah penelitian itu dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang dikumpulkan dari lapangan, reduksi dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan kesimpulan sementara yang telah ada dirumuskan (Nugrahani, 2014).

J.Uji Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau keabsahan data merupakan teknik yang harus diambil agar data yang terkumpul tidak diragukan lagi. Tes validitas data ini dapat dilakukan dengan triangulasi (Nugrahani, 2014).

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknis dilakukan dengan membandingkan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data diperoleh dari wawancara dengan subyek penelitian.

Pada Hasil Uji keabsahan data dengan menggunakan kedua teknik keduanya, menunjukkan hasil yang sesuai yaitu adanya ke terkaitan dengan data hasil wawancara ataupun dengan data dokumentasi yang dimiliki oleh pihak Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta. Hal ini juga sesuai dengan data hasil wawancara yang di bandingkan dengan data yang di peroleh dari subjek penelitian bersama mitra dan juga lembaga – lembaga di bawah naungan Yayasan PDHI Yogyakarta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

I. Profil Yayasan PDHI Yogyakarta

Berawal Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) dari keinginan untuk menjadi haji mabrur, pada tahun 1952, sebanyak 31 orang jamaah haji mencetuskan ide untuk membentuk sebuah perkumpulan yang berfungsi sebagai wadah kegiatan keagamaan, pendidikan serta sosial kemasyarakatan jamaah haji di Yogyakarta. Perkumpulan ini selanjutnya diberi nama Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (selanjutnya disebut PDHI). Hal ini disampaikan langsung oleh sekretaris umum Drs. H. Juanda YHS (2022) bahwa Yayasan PDHI (Fungsi PDHI adalah memfasilitasi dan mengorganisir berbagai kegiatan jamaah haji dalam melakukan amal jariyah agar dapat terlaksana dengan baik. PDHI sebagai sebuah lembaga sosial telah berperan serta dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nilai, moral dan akhlak yang mulia. Letak Gedung PDHI Yogyakarta yaitu di “ Sasonoworo “ Alun – alun Utara telp. 0274.373449 Yogyakarta 55122.

a. Latar Belakang Pendirian Yayasan PDHI

- 1) Para Jama'ah Haji dari Yogyakarta , khususnya dari Kabupaten Bantul, melihat suasana yang kurang menggembirakan , yang meliputi umat Islam di Tanah Air Indonesia, dengan adanya perpecahan partai, khilaf *furu'iyah* diantara Zu'amma'ul Muslimin dan penonjolan kembali masalah-masalah khilafiyah yang menyebabkan timbulnya golongan-golongan bahkan terkadang terjadi clash diantara sesama Umat Islam.

- 2) Pada musim haji tahun 1371 Hijriyah atau tahun 1952 Masehi , dapat berkumpul dengan Umat Islam dari segala bangsa yang berlainan kulit dan bahasa, tabiat, mazhab dan cara , akan tetapi satu agama : ISLAM, satu langkah : IBADAH, satu tujuan : MENCARI KERIDHOAN ALLAH RABBUL ‘ALAMIN.
- 3) Di Masjidil Haram Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 H bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 M , ditanda tangani IKRAR BERSAMA , bahwa para jama’ah haji setelah kembali ke tanah air , menghimpunkan diri dalam satu wadah yang diberi nama : PERSAUDARAAN DJAMAAH HADJI INDONESIA disingkat PDHI, berkedudukan pusat di Yogyakarta.

b. Asas dan Tujuan Yayasan PDHI

Yayasan ini berasaskan Islam, bertaqwa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta’ala, berdasarkan Pancasila sebagai yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 ; dan bertujuan

- 1) Memelihara hasil ibadah haji yang mabrur serta memperluas kemabruran tersebut kedalam masyarakat
- 2) Mengamalkan kemanfaatan yang terdapat dari ibadah haji dan sekitarnya
- 3) Membangun rasa wajib beribadah haji bagi pemeluk agama islam
- 4) Membimbing para calon haji kearah mabrur

c. Kegiatan Pengajian Rutin

- 1) Pengajian Jum’at Pagi dan Sabtu Pagi di Gedung PDHI “SASONOWORO”
- 2) Pengajian Ibu-Ibu PDHI setiap tgl. 1 dan tgl. 9
- 3) Pengajian setiap hari AHAD PON , tempat berpindah-pindah.

- 4) Pengajian ke masjid-masjid binaan PDHI , meliputi DIY, Klaten, Purworejo, Magelang, sebanyak 154 masjid dalam putaran tiga puluh lima hari sekali (lapanan)
- 5) Pengajian manasik haji 10 kali teori dan 1 kali praktek manasik di Parang kusumo.

d. Sumber Dana dan Pembiayaan Yayasan PDHI

- 1) Semua biaya untuk pembangunan fisik , kegiatan belajar mengajar , anak pondok dan anak panti , dakwah dan operasional , dibayar oleh jama'ah dengan “UANG PAS”
- 2) Artinya ketika Pengurus menyampaikan kebutuhan macam-macam biaya kepada Jama'ah, Jama'ah langsung membayar , karena jama'ah “ PAS ADA UANG”
- 3) Semua itu dikarenakan telah melekat etos dakwah silaturahmi , tholabul ‘ilmi dan ‘amal jariyah.

e. Jumlah Tanah Wakaf & HGB

Tabel 4.5. Jumlah Tanah Wakaf & HGB

Tempat	Sertifikat	Luas Tanah
Kota Yogyakarta	13 Sertf.	5.827 m2
Kabupaten Bantul	5 Sertf	3.875 m2
Kabupaten Gunung Kidul	13 Sertf	1.2521 m2
Kabupaten Sleman	28 Sertf	51.768 m2
Jumlah	56 Sertf	73.971 m2

Dalam perkembangan selanjutnya PDHI telah menyempurnakan anggaran dasarnya, kemudian diberikan status Yayasan dengan Akta Notaris No. 27 tertanggal 15 November 1977

dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1977 dengan Nomor 278/77. Yayasan PDHI melakukan penyempurnaan organisasi dengan akta notaris Umar Sjamhudi, S.H., Nomor 40 Tanggal 23 Agustus 1991, kemudian melakukan perubahan dengan nama Perkumpulan PDHI dengan akta notaris Hj. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., dengan Nomor 59 tanggal 31 Juli 2002. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perkumpulan PDHI berorientasi pada aspek pemeliharaan ukhuwah islamiyyah secara luas, usaha-usaha mencapai haji mabrur, pemanfaatan kemabruran ibadah haji dalam masyarakat, menggerakkan thalabul ilmi dan amal, pelopor kerja-kerja kolektif dan amal jariyah, tidak mencampuri urusan politik serta menitikberatkan pada persoalan kerohanian.

Sampai saat ini, telah tercatat ribuan masjid yang berhasil dibangun atas prakarsa PDHI. Masjid-masjid tersebut tersebar di seluruh pelosok DIY, dan bahkan telah merambah wilayah Jawa Tengah, Madura, Bali serta Nusa Tenggara Barat. Selain itu, PDHI telah mempunyai berbagai lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan seperti TK, MTs di Gunung Kidul, Ponpes Ibnul Qoyyim, Koperasi tersebut dapat terbentuk dari amal jariyah yang dikumpulkan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PDHI di berbagai tempat. Institusi yang diprakarsai oleh PDHI ditujukan bagi peningkatan kualitas masyarakat dalam berbagai bidang.

PDHI memiliki berbagai program kegiatan yang direalisasikan ke dalam beberapa bidang. Program kegiatan tersebut telah dirintis sejak beberapa tahun yang lampau dan masih terus dikembangkan hingga saat ini. Berikut program kegiatan yayasan PDHI :

Tabel 4.6.Lembaga & Kegiatan Yayasan PDHI

NO	BIDANG	LEMBAGA & KEGIATAN
1	Pendidikan	MA dan MTS Ibnul Qoyyim Sleman

		MTS Panggang Gunung Kidul
		TK Ibnul Qoyyim Sleman
		TK Islam PDHI Bantul
		Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim
		Pondok Pesantren Tahfidz Dhuafa Gunung Kidul
2	Sosial	Rumah Sakit Islam PDHI
		Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI
		Makam Haji Piyungan Bantul
3	Dakwah	Islamic Centre Playen, Gunungkidul
		Islam Centre Cangkringan Sleman
		Pengajian Rutin Jum'at dan Sabtu Pagi di PDHI
		Pengajian Keliling ke Masjid Binaan PDHI
		Pengajian Ahad Pon
		Pengajian Manasik Haji
4	Ekonomi	KSUS BMT PDHI Sasono Oro

Dalam perjalanannya, Yayasan PDHI telah ikut berperan serta dalam pengembangan kemajuan masyarakat. Hingga saat ini, PDHI telah berhasil mengulurkan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan masjid di berbagai wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Madura, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Jika dikalkulasi khan, jumlah masjid yang telah dibangun atas prakarsa

PDHI telah berjumlah ribuan masjid. Selain pembangunan masjid, PDHI juga membangun pondok pesantren serta berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana penunjangnya.

Dalam bidang pendidikan, yayasan PDHI telah berhasil merealisasikan beberapa lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Salah satu lembaga pendidikan informal yang cukup terkenal adalah pondok pesantren Ibnul Qoyyim. Pondok pesantren ini terletak di dua lokasi, yakni di jalan Wonosari KM 8,5 Sendang Tirto, Sleman untuk pondok pesantren putri, dan di jalan wonosari KM 10,5 Piyungan Bantul untuk pondok pesantren putra. Pondok pesantren Ibnul Qoyyim didirikan pada 20 Agustus 1983. Untuk mendukung kegiatan belajar di pondok pesantren, yayasan PDHI membangun lembaga pendidikan formal.

Selain lembaga pendidikan, PDHI juga aktif melakukan tabligh keliling. Untuk kegiatan ini, PDHI secara khusus telah membentuk tim muballigh yang secara berkala melakukan kegiatan dakwah pada masjid-masjid di seluruh pelosok Daerah Istimewa Yogyakarta. Para mubaligh yang bertugas di bawah yayasan PDHI tidak meminta imbalan dan hanya mengharapkan pahala serta keridhoan Allah. Dalam satu bulan, PDHI mampu melakukan kegiatan dakwah di masjid lebih dari 100 kali. Berbagai kegiatan pengajian yang dilaksanakan yayasan PDHI tersebut berhasil menggalang dana yang kemudian dihimpun dan disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

Pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan PDHI juga merambah pada bidang kesehatan dengan membangun Rumah Sakit Islam PDHI. Rumah sakit tersebut bertempat di Kalasan Sleman dan diresmikan pada tanggal 6 November 2005 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sebagai rumah sakit dengan visi sosial keagamaan, rumah sakit Islam PDHI secara rutin dan berkala mengadakan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan medis

maupun non medis, misalnya seminar kesehatan, festival lomba Ramadhan, pengajian dan safari Ramadhan, buka puasa bersama serta khitanan massal.

Tidak berhenti di bidang pendidikan, dakwah dan kesehatan, PDHI juga melanjutkan langkah sosialnya dengan membangun panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Panti asuhan ini terletak di desa Margoluwih kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta dan didirikan pada 6 januari 2012 oleh hajjah Sarwati dari Bandung sebagai pihak yang memberikan wakaf. Peletakan batu pertama dilakukan oleh bupati Sleman bapak Drs. Sri Purnomo, M.Si pada tanggal 22 februari 2012. Panti asuhan ini dikhususkan bagi yatim putra. Pembiayaan keperluan anak asuh didapatkan dari sumbangan berbagai pihak, baik donatur tetap maupun tidak tetap.

Selanjutnya, untuk menunjang kegiatan dakwah, PDHI ikut berperan serta dalam pendirian *Islamic Centre* yang berlokasi di Seturan Yogyakarta. Islamic centre tersebut didirikan agar dapat dipergunakan sebagai sentral kegiatan sosial keagamaan dan dakwah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa kegiatan rutinnya adalah kajian-kajian keislaman, pesantren Ramadhan serta berbagai pelatihan da'i.

Secara general, peran PDHI dalam kegiatan sosial kemasyarakatan terbagi menjadi dua, yakni secara formal dan non formal. Peran secara formal misalnya dengan mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren dan sekolah, sedangkan peran non formal contohnya dengan mengadakan pengajian-pengajian rutin di berbagai wilayah.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus dan anggota PDHI juga mengungkapkan bahwa PDHI didirikan atas dasar kerelaan bersama. Setiap kegiatan tidak dipungut bayaran, dan jika pengurus PDHI mempergunakan fasilitas milik PDHI, mereka tetap

membayar sebagaimana orang lain. Kehadiran Yayasan PDHI memberikan kontribusi lebih yang telah diakui dan dirasakan masyarakat sekitarnya. Hal ini bisa dilihat dengan hadirnya lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal serta lembaga keuangan syariah. Masyarakat juga memiliki harapan agar PDHI dapat memperluas wilayah kajiannya sehingga mampu merangkul kalangan muda untuk ikut berpartisipasi menyemarakkan kegiatan sosial keagamaan.

II. Gambaran Umum Unit Usaha Yayasan PDHI

Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa Yayasan PDHI ini bukan hanya meramba di dunia pendidikan, sosial dan dakwah. Naum, kegiatan pada Yayasan PDHI ini juga merambah pada bidang ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya BMT PDHI pada tahun 2012. BMT PDHI bertempat di Kauman Gondomanan, bersebelahan dengan kantor pusat PDHI. Lembaga ini menerapkan prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan, sehingga tercipta win-win solution antara nasabah dan pihak pengelola tanpa melanggar aturan agama. Adanya BMT PDHI ini menjadi salah bukti bahwa Yayasan PDHI ini mampu berdiri secara mandiri dalam proses pengelolaan Yayasannya ataupun pembiayaan pemberdayaan masyarakatnya. Dari BMT inilah Yayasan PDHI ini bisa memperoleh profit untuk mengelola Yayasan PDHI ataupun melestarikan banyaknya kegiatan yang diselenggarakan terutama untuk kegiatan dakwah dan juga *maintenance* operasional serta aset yang dimiliki oleh pihak Yayasan PDHI.



Gambar 4.11. KSUS BMT PDHI Sasonoworo

Kompensasi adalah hal yang diterima oleh pegawai, baik berupa uang atau bukan Uang sebagai balas jasa yang diberikan bagi upaya/ kontribusi pegawai yang diberikannya untuk organisasi. Berkaitan dengan kompensasi, Sekretaris Yayasan PDHI menyatakan bahwa Yayasan PDHI tidak menerapkan kompensasi terhadap para pengurus. Hal ini disebabkan visi dan misi Yayasan PDHI sebagai sebuah lembaga yang bertujuan mengabdikan kepada Allah dengan mengaktualisasikan berbagai kegiatan bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Sebagai konsekuensi, para pengurus Yayasan PDHI harus siap bekerja tanpa mendapatkan imbalan, dan kelancaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI. mereka justru ikhlas mengeluarkan sebagian dari pendapatannya demi kemaslahatan umat.

Konsekuensi dari usaha ini adalah melibatkan masalah-masalah atau aspek-aspek perasaan, sikap dari pegawai yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan organisasi. Selanjutnya, Berkaitan dengan fungsi pengintegrasian, Ketua Yayasan PDHI menyatakan bahwa orang-orang yang bergabung dalam Yayasan PDHI harus memiliki kerelaan untuk berbagi ilmu, silaturahmi dan amal jariyah. Selain itu, terdapat kesepakatan bahwa seluruh anggota PDHI tidak diperkenankan untuk

mengatasnamakan Yayasan PDHI dengan suatu partai politik. Yayasan PDHI membolehkan pengurus dan anggotanya untuk berpartisipasi dalam kancah politik, namun harus mengatasnamakan nama pribadi. Kesepakatan tersebut ditetapkan agar tidak timbul perpecahan di antara pengurus atau anggota Yayasan PDHI, serta agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan karena mengusung partai yang berbeda.

Selain itu, dalam proses pemberdayaan masyarakat Yayasan PDHI telah melakukan proses pengintegrasian dengan beberapa organisasi dan masyarakat yang menjadi binaan, dengan cara mengadakan pengajian atau pertemuan rutin berkala dalam rangka silaturahmi dan menguatkan ikatan emosi di antara para pengurus dan anggota.

Dalam proses pemberdayaan merupakan sesuatu hal yang berkenaan dengan usaha agar para pegawai dapat bekerja dengan baik selama mungkin dengan cara menjaga kesehatan mental maupun fisik. Pada unsur pemeliharaan Karyawan, Sekretaris Yayasan PDHI menyatakan bahwa proses maintenance atau pemeliharaan pengurus tidak dilakukan oleh Yayasan PDHI, namun sudah tumbuh dari dalam lewat kesadaran para pengurusnya. Sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, para pengurus PDHI menyadari bahwa kinerja mereka merupakan sebuah pengabdian, sehingga mereka tidak mengharapkan imbalan berupa materi. Bahkan tidak jarang para pengurus justru membantu biaya pelaksanaan sebuah kegiatan.

Dari data yang di dapatkan oleh peneliti kemandirian dari Yayasan PDHI ini bukan hanya terjadi pada proses pengelolaan lembaga – lembaga yang dinaunginya. Namun, hal ini juga membuat beberapa lembaga yang dinaungi oleh Yayasan PDHI ini memiliki sebuah usaha untuk keberlanjutan lembaganya. Beberapa lembaga yang sudah memiliki unit usaha secara mandiri itu sebagai berikut :

a. Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim

Yayasan PDHI ini menaungi sebuah lembaga Pendidikan yang berbasis pondok pesantren. Pondok Pesantren Putra dan Putri Ibnul Qoyyim yang didirikan pada tanggal 10 Dzulqo'dah 1403 bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 1983 merupakan salah satu amal usaha PDHI Yogyakarta yang perkembangannya terus menunjukkan peningkatan hingga saat ini, meskipun peningkatan ini masih perlu terus ditingkatkan. Jika melihat kondisi masa depan keberadaan lembaga pendidikan berbasis agama, maka jika kedua hal ini digabungkan maka Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra dan Putri ke depan merupakan aset yang harus diperhatikan secara serius.

Dalam proses menjaga keberlanjutan Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim (PPIQ) ini mendirikan sebuah unit usaha untuk dikelola secara langsung oleh pihak PPIQ ataupun santrinya, hal ini disampaikan langsung oleh direktur PPIQ putri atas nama Atik Maliha Masruroh. S.Pd. M.Pd saat peneliti melaksanakan wawancara. Usaha ini bergerak dibidang minuman air mineral yang menggunakan cup. Adanya usaha ini juga didasari atas banyaknya kegiatan yang diadakan pesantren untuk para santrinya sehingga untuk menghemat biaya PPIQ ini mencoba membuat air mineral. Bukan hanya untuk internal saja, air mineral ini sering di pesan untuk kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI seperti pengajian rutin. Ini merupakan salah satu bentuk support yang diberikan oleh Yayasan PDHI kepada Yayasan PDHI.

Dalam proses wawancara yang peneliti lakukan ibu Atik Maliha Masruroh. S.Pd. M.Pd. selaku kepala direktur Pondok Pesantren Ibnul Qoyy (PPIQ) putri menyampaikan bahwa:

“Yayasan PDHI ini luar biasa, adanya peran Yayasan PDHI memberikan support yang sangat luar biasa, walaupun support itu bukan berupa dana. Namun, hal ini sangat berpengaruh pada PPIQ di masa depan melalui peran jama’ah Yayasan PDHI yang memberikan kepercayaan untuk kami dalam mendidik putra putri dari jama’ah Yayasan PDHI walaupun tidak sedikit juga santri yang orangtuanya bukan dari jama’ah Yayasan PDHI...”

Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim (PPIQ) tidak hanya memiliki satu unit usaha. Namun, juga memiliki usaha budidaya ikan hias yang dikelola langsung oleh santri putri PPIQ. Hal ini dikelola langsung secara mandiri oleh santri – santri Yayasan PDHI guna memberikan Pendidikan berwirausaha dan kemandirian.

Namun, dari beberapa usaha yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim (PPIQ) ini belum bisa dipastikan berapa profit yang diperoleh selama satu bulannya. Hal ini disebabkan tidak adanya penjualan secara rutin atau marketing yang bisa mengelola dengan baik. Sampai saat ini profit yang didapatkan hanya modal balik dan juga digunakan untuk proses pengelolaan usahanya saja.

b. Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI

Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI merupakan salah satu bentuk dari peran Yayasan PDHI yang bergerak di bidang sosial. Pada tahun 2014 Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI mulai diresmikan hingga saat ini. Panti ini dikelola secara mandiri dengan support dari masyarakat sekitar serta peran Yayasan PDHI. Hebatnya Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI ini tidak hanya berpangku tangan dari dana filantropi yang diberikan. Namun Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI ini

mampu bertahan secara mandiri dengan memiliki sebuah usaha yang dikelola langsung oleh anak – anak Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI.

Usaha dari Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI berupa ternak kambing, ternak lele dan ternak ayam. Walaupun dalam proses pengelolaan ini bisa dikatakan masih sangat sederhana dan belum begitu besar usahanya, Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI ini mampu mengelolanya dengan baik. Anak – anak Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI mengelola dengan baik walaupun pada kenyataannya belum bisa menghasilkan profit yang begitu besar. Namun, hal ini mampu melatih anak – anak panti secara mandiri dan berwirausaha Ketika kelak di masyarakat. Usaha ini memiliki banyak support dari masyarakat di sekitar terutama dari pihak Yayasan PDHI dengan mempromosikan usaha milik Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI ini pada seluruh jamaahnya sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi usaha yang dimiliki oleh panti.

Walaupun Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI ini memiliki sebuah unit usaha untuk keberlangsungan panti di masa depan pihak Yayasan PDHI tidak meminta hak atau bagi hasil dari usaha yang dimiliki oleh Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang disampaikan langsung oleh pengasuh panti Hari Setiawan (2023)

“...Di mulai dengan memiliki usaha yang dikelola langsung oleh anak – anak panti membuat kami survive sampai saat ini. Walaupun tetap adanya sokongan dari dari pihak Yayasan PDHI ataupun donatur. Namun, bagusnya Yayasan PDHI ini tidak memiliki peraturan untuk memberikan sebagian keuntungan dari hasil unit – unit usahanya kepada pihak Yayasan PDHI.”

B. Hasil Penelitian

Kondisi kehidupan masyarakat saat ini semakin turbulen, terutama akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Masalah-masalah yang dihadapi umat manusia semakin kompleks, implikasi kemajuan IPTEK berimbas terhadap berbagai aspek kehidupan seperti agama, social, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan sekarang sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu banyak pemikir dan praktisi belum memahami dan meyakini bahwa partisipatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi.

Adanya peran *Islamic Social Enterprise* (ISE) yang memiliki peran fungsional untuk menghasilkan kekayaan untuk tujuan masyarakat, baik dalam bentuk independen kecil ataupun sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam proses pengelolaan dana filantropi. *Islamic Social Enterprise* (ISE) memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu membentuk sebuah keahlian yang mampu memenuhi kebutuhan menawarkan baik berupa barang dan jasa dengan harga dan biaya yang terjangkau, sekaligus memberikan pendapatan untuk keberlanjutannya usahanya.

Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H. Juanda YHS (2022) menyampaikan bahwa :

“...Yayasan ini ada berkat adanya keluhan dari beberapa jamaah haji di daerah Yogyakarta terutama daerah Bantul saat itu, begitu pula dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini juga diawali dengan adanya keluhan kesah yang dirasakan masyarakat yang disampaikan ketika kegiatan pengajian rutin Yayasan PDHI ini. Sehingga secara tidak langsung banyaknya jamaah Yayasan PDHI ini dimulai dari kegiatan dakwah.”

Dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini juga diawali dengan sebuah pengajian rutin di masyarakat yang diadakan oleh jamaah Haji di daerah Yogyakarta. Diawali dengan kegiatan dakwah yang dilaksanakan Yayasan PDHI ini membuat semua pemberdayaan masyarakat didasarkan atas rasa taqwa dan ukhuwah islamiyah yang sangat kuat. Dalam proses mensukseskan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, Yayasan PDHI sering menyelenggarakan kegiatan dakwah guna menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan apresiasi yang dirasakan selama proses pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat Yayasan PDHI juga memiliki beberapa step yang harus dilakukan guna mensukseskan pemberdayaan dan juga mewujudkan sistem kemandirian yang ada pada masyarakat. Hal terpenting dari proses pemberdayaan masyarakat ini yaitu dengan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pihak Yayasan PDHI.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh ketua departemen pemberdayaan ekonomi di Yayasan PDHI H. M. Arif S.E (2023).

“...Saat ini di PDHI bisa dikatakan sudah memiliki rencana terkait dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi meskipun memang belum terlaksana 100%, ... Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada Yayasan PDHI”

Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada Ife, Jim (1995), peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat dan peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

a) Fasilitator.

Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan

mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

b) Pendidik,

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik seperti membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, dan menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat.

c) Perwakilan masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

d) Peran teknis

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti : melakukan analisis social, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Yayasan PDHI ini memiliki sebuah sistem pemberdayaan yang sangat unik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem kemandirian pada semua lembaga atau mitra yang dinaungi oleh Yayasan PDHI ini. Hal ini dikarenakan Yayasan PDHI menggunakan istilah otonomi dalam proses pemberdayaan masyarakatnya. Dari semua unit atau lembaga yang dinaungi oleh Yayasan PDHI ini beberapa di antaranya memiliki

sebuah profit. Namun, profit yang di dapatkan oleh lembaga yang di bawah naungan Yayasan PDHI ini tidak ada sistem bagi hasil antara Yayasan PDHI dengan pihak lembaga dibawah naungan Yayasan PDHI. Walaupun menurut Karl Marx dalam Mardi (2000), pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik.

Disampaikan langsung oleh Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H. Juanda YHS (2022) dalam proses wawancara bahwa :

“... dalam proses pengelolaan unit – unit usaha atau kegiatan di bawah naungan Yayasan PDHI ini semua diberdayakan secara mandiri melalui usaha yang ataupun donasi yang diperoleh dalam proses kegiatannya, hal ini karena Yayasan PDHI ini menerapkan sistem otonomi untuk seluruh unit – unit kegiatan atau usaha baik dari kegiatan di bidang ekonomi, sosial, pendidikan ataupun dakwah.”

Adanya Yayasan PDHI sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat ini membuat terjadinya sebuah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka yayasan PDHI harus melakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Dalam konteks pembahasan lain, Sumodiningrat (2007) memandang bahwa konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi pada tataran ideologis dan praktis. Pada tataran ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara strategi pertumbuhan dan strategi berpusat pada

manusia. Sedangkan pada tataran praktis. Pemberdayaan merupakan hasil interaksi yang terjadi melalui perjuangan antar otonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemberdayaan mengandung makna keberpihakan kepada masyarakat sebagai kelompok yang tidak memiliki keberdayaan.

Disampaikan langsung oleh Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H. Juanda YHS (2022) dalam proses wawancara bahwa :

“... dalam proses pengelolaan dana donasi yang diperoleh dari kegiatan dakwah Yayasan PDHI berupa kajian rutin untuk jama'ah Yayasan PDHI. Biasanya dana yang dihimpun merupakan dana sedekah dan infaq akan didistribusikan secara langsung kepada pihak atau unit – unit kegiatan di bawah naungan Yayasan PDHI secara langsung.”

Yayasan PDHI sebagai lembaga sosial telah membuktikan perannya secara nyata di masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat membuat masyarakat yakin dengan mampu mengubah pola pikirnya menjadi yakin bahwa ternyata masyarakat memiliki kemampuan untuk bisa bertahan dan juga hidup secara mandiri baik dari sisi finansial maupun sosial. Namun dalam prosesnya, terdapat beberapa kendala yang timbul dan perlu mendapatkan perhatian. Sekretaris umum Yayasan PDHI menjelaskan bahwa PDHI masih memiliki kendala dalam manajemen sumber daya manusia (SDM), sistem kaderisasi dan sosialisasi lembaga. Sebagaimana diketahui, sebagian besar pengurus Yayasan PDHI merupakan tokoh yang telah berumur. Kegiatan-kegiatan di Yayasan PDHI lebih banyak terfokus pada kajian keislaman normatif, sehingga terjadi kesenjangan dengan generasi muda. Di samping itu, sosialisasi yang masih kurang membuat banyak kalangan, khususnya anak muda kurang merespon keberadaan Yayasan PDHI.

Dalam menangani berbagai kendala di atas, pengurus Yayasan PDHI telah menerapkan sistem evaluasi dalam rangka mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan suatu kegiatan serta mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Kegiatan evaluasi secara umum dilaksanakan setiap hari Jumat Legi dan membahas semua anak organisasi yang berada dibawah naungan Yayasan PDHI.

Selain mengadakan evaluasi, Yayasan PDHI perlu mengadakan sosialisasi kepada generasi muda untuk mempersiapkan kader-kader baru. Hal ini dapat dilakukan dengan merangkul organisasi pemuda serta ikut serta dalam kegiatan yang mereka adakan baik dalam bentuk dukungan moril maupun materiil. Sebaliknya, selain ikut serta dalam kegiatan generasi muda, Yayasan PDHI perlu mulai menyertakan anak-anak muda dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan PDHI. Dengan demikian, anak-anak muda tersebut akan merasa dihargai dan diakui karena telah diberikan tanggung jawab dan kepercayaan.

Untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap Yayasan PDHI, perlu adanya kampanye sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan nama PDHI pada berbagai kegiatan yang mendapat sponsor dari Yayasan PDHI beserta anak cabangnya. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang mengenal Yayasan PDHI dan akan semakin besar kemungkinan mereka untuk ikut berpartisipasi memajukan masyarakat lewat Yayasan PDHI.

Langkah Yayasan PDHI juga dapat disuarakan secara lebih jelas dan efektif dengan menunjuk seseorang yang bertugas secara khusus sebagai public relation. Tugas public relation dalam hal ini adalah membuat program untuk meyakinkan dan membangkitkan kesadaran sosial masyarakat tentang nilai aktivitas organisasi secara terus menerus agar mereka bersedia mendukung, terlibat serta memiliki kepercayaan terhadap Yayasan PDHI. Program-program tersebut dapat disebarkan

lewat tulisan, buku mini atau brosur. Selain itu, Yayasan PDHI dapat memanfaatkan media komunikasi dengan memasang iklan atau mengirimkan artikel pada majalah serta surat kabar.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berakar pada masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Dilihat dari sudut pandang penyelenggaraan Negara, pemberdayaan masyarakat bukan sekedar konsep ekonomi tetapi secara implisit mengandung arti menjunjung tinggi demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). modal, akses pasar dan keterampilan manajemen. Oleh karena itu, agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi tersebut harus diakomodir dan dirumuskan secara jelas oleh birokrasi pemerintahan dan tertuang dalam perumusan kebijakan publik (*public policy*) untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tujuan utamanya adalah:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk selalu mampu dalam berkembang
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkembang melalui berbagai bantuan pembiayaan, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana fisik dan sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah tersebut.
- c. Melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

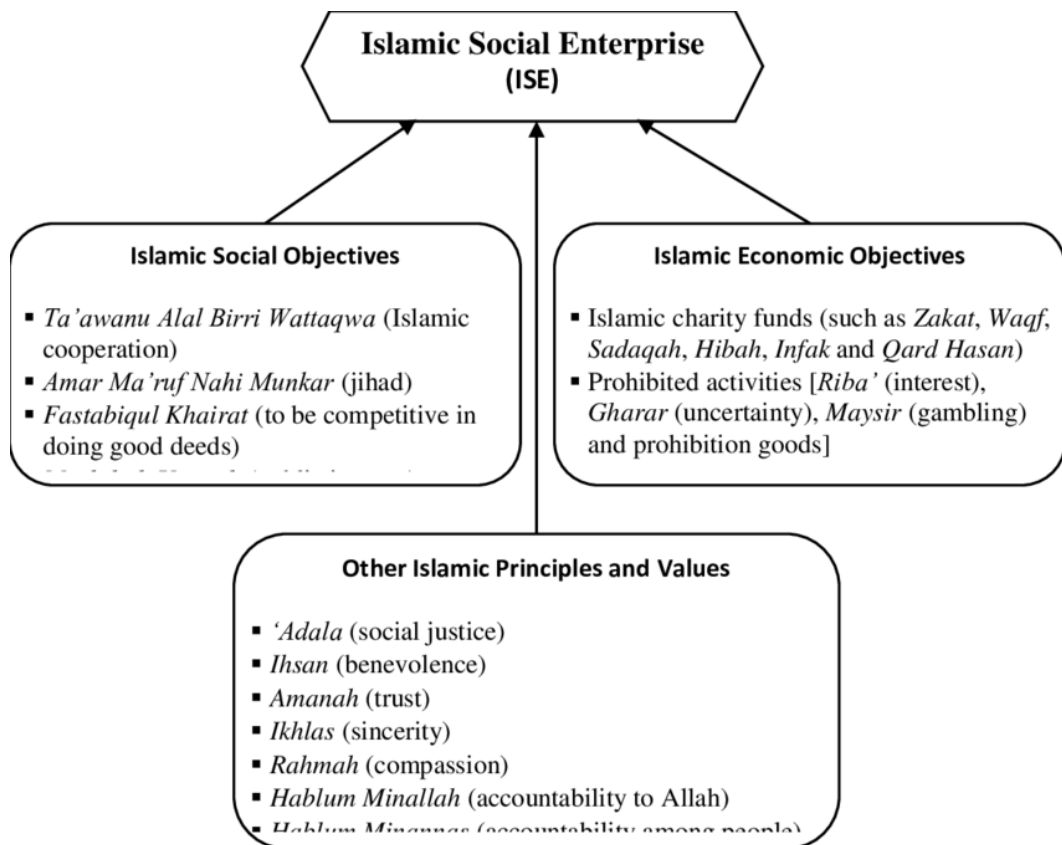
3. Konsep Islamic Social Enterprise

Memahami dasar ISE memungkinkan peserta sektor ketiga Islam dan pembuat kebijakan untuk memposisikan dan memperluas peran ISE. Saat ini, penelitian tentang ISE dapat dianggap masih dalam tahap awal, sehingga definisi entitas khusus ini belum dapat disimpulkan. Dibandingkan dengan SE, banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang definisi SE. Secara umum, SE dapat didefinisikan sebagai:

“Terutama tujuan sosial di mana surplusnya pada prinsipnya diinvestasikan kembali untuk tujuan itu dalam bisnis atau masyarakat, bukannya didorong untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham seperti di sektor swasta” (Tombaket al., 2009; Kerlin, 2006).

Sebagai bagian dari *Social Enterprise* (SE) dan *Islamic Social Enterprise* (ISE) dapat mengadopsi definisi yang mirip dengan *Social Enterprise* (SE) tetapi harus dibedakan dengan praktik Islam tambahan yang tertanam di dalam *Islamic Social Enterprise* (ISE) (Kamaruddin & Auzair, 2018). Oleh karena itu, berdasarkan definisi *Social Enterprise* (SE) di atas yang secara khusus menitik beratkan pada tujuan, sumber modal, kegiatan, perolehan pendapatan dan proses distribusinya, maka definisi ISE sebagai:

“Entitas berbasis Islam yang memperoleh pendanaan (dalam bentuk aset moneter dan non moneter) dari sumber amal Islam (melalui wakaf, sadaqah, hibah, dan qard) dan menyalurkannya ke dalam kegiatan bisnis (barang dan jasa) dengan tujuan untuk berkontribusi kepada yang membutuhkan dan pada saat yang sama mempertahankan kontribusi dalam jangka panjang.”



Gambar 4.12. Konsep ISE dalam perspektif Islam

Sumber : M Iqmal Hisham Kamaruddin, 2019

Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan bahwa, terdapat tiga aspek dalam mengkonseptualisasikan ISE dari perspektif Islam yaitu: (i) tujuan sosial Islam; (ii) tujuan ekonomi Islam; dan (iii) prinsip dan nilai Islam lainnya. Pertama, di bawah tujuan sosial, diyakini bahwa beberapa prinsip dan nilai Islam yang berkaitan dengan tujuan atau kegiatan sosial dapat dimasukkan menjadi tujuan sosial Islam ISE. Ini termasuk *ta'awanu alal birri wattaqwa* (kerja sama Islam), *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan atau dikenal dengan jihad), *fastabiqul khairat* (bersaing dalam melakukan kebaikan) dan *masalah ummah* (kepentingan umum) untuk tujuan sosial Islam (Kamaruddin & Auzair, 2018; Mohamed et al., 2016).

Berdasarkan definisi ini, terdiri dari empat unsur utama (Nurul Aini M & M Iqmal Hisyam Kamaruddin, 2018) : (i) tujuan ISE sebagai entitas berbasis Islam; (ii) kontrak amal Islam sebagai sumber modal, (iii) kegiatan; dan; (iv) penciptaan dan distribusi pendapatan. Definisi ini mengecualikan entitas berbasis Islam lainnya yang secara langsung menerima amal dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan, tanpa mengumpulkan dana tersebut.

a. Tujuan dan nilai-nilai yang mendasari

Islamic Social Enterprise (ISE) sebagai lembaga Islam harus didasarkan pada ibadah atau ketaatan kepada Allah SWT dan beroperasi berdasarkan ajaran Islam (Ahmad, 1988). Hal ini sesuai dengan prinsip Yayasan PDHI yang selalu mengutamakan ibadah di dalam proses semua kegiatan yang dijalani. Pencapaian tertinggi dari pendirian *Islamic Social Enterprise* (ISE) pada Yayasan PDHI adalah pencapaian al-falah, mengikuti tujuan pendiri dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip Islam harus tertanam dalam Yayasan PDHI ini karena harus didorong oleh tujuan agama Islam. Al-falah dapat diartikan sebagai kesuksesan di dunia dan akhirat. Segala bentuk usaha di dunia ini harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat karena dunia ini (semua perbuatan baik) adalah jembatan menuju kesuksesan di akhirat (Akram Khan, 1994). Prinsip-prinsip lain yang harus dimasukkan oleh BEI sebagai badan hukum bisnis seperti 'adala (keadilan), ihsan (kebajikan) dan khilafah (kekhilafahan), yang seharusnya menjadi bagian dari esensi *Islamic Social Enterprise* (ISE) (Hamid & Yaya, 2005).

Secara konsisten, dari perspektif hukum, Yayasan PDHI sebagai lembaga yang berbasis *Islamic Social Enterprise* (ISE) harus diarahkan oleh maqasid syariah. *Islamic Social Enterprise* (ISE) melayani masyarakat dengan menawarkan barang dan jasa

dengan harga yang terjangkau, atau dalam hal tertentu dengan harga gratis, yang memungkinkan anggota masyarakat miskin dan kelas menengah untuk mendapatkan kebutuhan dasar (setidaknya pada dharuriyyah tertentu). Dalam konteks kajian ini, *Islamic Social Enterprise* (ISE) pada lembaga yang dinaungi oleh Yayasan PDHI sebagai unit ekonomi kecil bekerja secara mandiri dalam menyalurkan surplus dari yang kaya ke yang miskin, dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Secara khusus, *Islamic Social Enterprise* (ISE) melayani para donatur dengan menerima dana (dalam bentuk barang dan dana moneter), dan menyalurkannya ke penerima melalui aktivitas bisnis untuk tujuan keberlanjutan, redistribusi dan reinvestasi. Dilihat lebih dekat, *Islamic Social Enterprise* (ISE) terlibat dalam pelestarian harta benda serta dimensi lain termasuk pelestarian nyawa, mengingat beberapa *Islamic Social Enterprise* (ISE) pada Yayasan PDHI juga menawarkan layanan kesehatan yaitu berupa Rumah Sakit Islam (RSI PDHI) Yogyakarta.

- b. Pemilihan kontrak amal untuk *Islamic Social Enterprise* (ISE) sebagai sumber modal

Memahami fitur dari setiap kontrak amal akan memudahkan proses untuk mengenali *Islamic Social Enterprise* (ISE) dan memberikan definisi yang solid. Selain itu, pemahaman akad dapat membantu peserta (pengelola) pada Yayasan PDHI untuk memenuhi kewajibannya dalam menangani dan mengelola dana. Karena karakteristik dasar *Islamic Social Enterprise* (ISE) terkait dengan pendapatan, beberapa kontrak amal Islam dikecualikan dari definisi *Islamic Social Enterprise* (ISE). Mengingat bahwa akad memiliki karakteristik yang berbeda dengan akad syariah dalam pandangannya, definisi mereka meskipun inklusif, namun relatif bertentangan dengan beberapa persyaratan kontrak. Sebagai contoh, zakat kontrak mensyaratkan bahwa koleksi dari donor harus

didistribusikan ke delapan jenis pos penerima dalam hal ini, koleksi tidak dapat disimpan dan digunakan oleh manajemen untuk menghasilkan pendapatan yang menyebabkan pembatasan penggunaan dana.

Namun, wakaf di Yayasan PDHI memiliki keunikan dan beberapa keterbatasannya memberikan potensi yang sangat besar untuk mendukung segala aktivitas dakwah oleh Yayasan PDHI. Membandingkan antara sedekah dan hibah dianggap sebagai kontrak paling fleksibel yang tidak memberikan batasan dan batasan dalam pengelolaannya. Akad memungkinkan *Islamic Social Enterprise* (ISE) untuk memperluas modal tanpa batasan apapun.

c. Kegiatan

Islamic Social Enterprise (ISE) pada Yayasan PDHI juga terlibat dalam bisnis sosial, dana amal Islam harus dikelola dengan baik dan hati-hati atas dasar kepercayaan. Tindakan moderat ini telah dinyatakan dalam ayat berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan [mereka] adalah orang-orang yang, ketika mereka membelanjakannya, tidak melakukannya secara berlebihan atau hemat, tetapi selalu, di antara itu, [secara adil] sedang-sedang saja”(Al-Furqan 25:67).

Dana amal Islam yang terkumpul dapat digunakan untuk investasi untuk keuntungan masa depan. Investasi dana yang terkumpul pada Yayasan PDHI dari para donatur dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan usaha seperti perdagangan barang dan penyediaan jasa di beberapa daerah yang memenuhi kebutuhan fakir miskin dan nasabah terkait. Alih-alih membatasi kegiatan *Islamic Social Enterprise* (ISE) pada Yayasan PDHI ke dalam ruang lingkup terbatas. Kegiatan bisnis ini sejalan dengan kegiatan bisnis sosial

Islamic Social Enterprise (ISE). Seperti yang telah dibahas shadaqah, wakaf, qardh hasan dan hibah dapat dimanfaatkan oleh Yayasan PDHI sebagai modal dalam kegiatan pemberdayaan sebagai bentuk dari *Islamic Social Enterprise* (ISE) untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan melalui bisnis, daripada didistribusikan langsung ke penerima, karena sifatnya yang fleksibel.

d. Penciptaan dan distribusi pendapatan

Ciri utama yang membedakan *Islamic Social Enterprise* (ISE) pada Yayasan PDHI ini dengan jenis lembaga *Islamic Social Enterprise* (ISE) lain terletak pada pendiriannya sebagai unit ekonomi yang menghasilkan pendapatan, dimana modalnya dikontribusikan melalui akad – akad sedekah yang memenuhi syarat. Pembagian pendapatan dilakukan kepada penerima (tergantung jenis kontrak) setelah dikurangi semua biaya yang terkait. Misalnya, untuk zakat, distribusi harus ditentukan hanya untuk asnaf (Rahim, 2013). Sedangkan untuk wakaf berdasarkan sumber, hasil bersih harus didistribusikan kepada penerima yang secara khusus disebabkan oleh pemberi, kecuali untuk wakaf yang diperuntukkan untuk semua. Untuk sedekah, hasil bersih dapat dibagikan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan tanpa ada batasan.

4. Maqasid Syariah Dasar Islamic Social Enterprise

Tujuan umat Islam adalah untuk mencapai al-falah, di dunia dan akhirat. Secara konsisten, untuk mencapai pencapaian ini, perilaku manusia harus dipandu oleh syariah (Hukum Islam). Meskipun tidak ada lembaga berbadan hukum khusus yang mengoperasikan kegiatan bisnis yang dapat ditemukan dalam tradisi Islam (Kuran, 2006), diasumsikan bahwa tujuan lembaga yang dikelola oleh Yayasan PDHI mengikuti tujuan pendiri, pengelola, atau pemangku kepentingannya.

Maqasid syariah atau tujuan hukum Islam digunakan secara luas untuk memandu keputusan hukum pada Yayasan PDHI, terutama ketika ada perubahan dinamis dalam masyarakat yang mungkin tidak ada di masa lalu. Tujuan utama dari syariah (maqasid syariah) adalah untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan di antara manusia, dan dengan demikian membimbing manusia ke jalan yang terbaik (Laldin, 2006). Seperti yang telah digaris bawahi oleh Ibnu Asyur, bahwa maqasid syariah adalah memperoleh apa yang baik dan bermanfaat (jalb al-masalih) dan penolakan terhadap apa yang jahat dan berbahaya (dar' al-mafasid).

Dalam proses wawancara ibu Dian Rahmawati. S.Pd selaku Kepala RA PDHI Bantul, Yogyakarta menyampaikan bahwa :

“... bentuk adanya Yayasan PDHI Yogyakarta ini memiliki peran penting di masyarakat yaitu adanya sistem Islamic Social Enterprise yang diwujudkan dengan bentuk RA PDHI ini yang dipercaya masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang sudah dipercaya sejak belasan tahun lama dengan tingkat pendidikan yang baik namun dengan biaya yang bisa dikatakan rendah, bahkan bagi siswa siswi yang menunggak pun tidak akan dikenakan denda ataupun dampak dari hal tersebut dalam proses belajar mengajar, hal ini kembali pada prinsip utama Yayasan PDHI bahwa semua kebaikan ini demi maslahat umat.”

Al-Shatibi mendefinisikan masalah sebagai 'suatu prinsip yang menyangkut penghidupan hidup manusia, penyelesaian penghidupan seseorang, dan perolehan atas apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya dari dirinya secara mutlak' (Dusuki & Abdullah, 2007). Konsep dari masalah selanjutnya dikonstruksikan menjadi tiga unsur dharuriyyah (penting), hajiyyah (pelengkap) dan tahsiniyyah (hiasan). Al-Ghazali dan diperluas oleh al-Shatibi (Ghazanfar & Islahi, 1997; Chapra, 1992) menguraikan lima elemen di bawah dharuriyyah

(penting); (i) pelestarian iman, (ii) pelestarian jiwa, (iii) pelestarian akal, (iv) pelestarian keturunan dan (v) pelestarian kekayaan. Dalam konteks ini, para ekonom Muslim seperti Chapra (1992) dan Siddiqi (2004) dengan tepat menyatakan bahwa maqasid syariah harus dilihat dari konteks yang luas dengan menghubungkannya dengan keadilan dan pemerataan melalui arus distribusi kekayaan di antara berbagai lapisan masyarakat. Chapra (1992) melangkah lebih jauh dengan mengusulkan bahwa orang kaya harus memberikan sebagian dari kekayaan mereka untuk membantu orang miskin mendapatkan kebutuhan mereka seminimal mungkin dharuriyyah.

Islamic Social Enterprise (ISE) yang terjadi pada Yayasan PDHI ini mampu memberikan dampak yang sangat luar biasa melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Yayasan, dengan sistem monitoring melalui sebuah kegiatan yaitu pengajian rutin. Dalam proses ini bukan hanya ada ikatan batin yang terjalin tapi juga membuat ukhuwah islamiyah dan juga silaturahmi yang terjalin dengan baik. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa bagi para jama'ah di Yayasan PDHI ini berupa relasi yang sangat luas. Kegiatan ini juga memiliki dampak positif bagi perjalanan perekonomian di lingkungan masyarakat dan jama'ah Yayasan PDHI. Rasa saling menolong dan menghormati merupakan hal yang lahir dari rasa saling menghormati dan rasa kepemilikan yang luar biasa. Terjadinya hal ini dilandasi oleh ukhuwah islamiyah dan falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) yang di dasari oleh Al-Qur'an dan Hadist.

Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan

bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (Qs. Al – Hujurat : 10)

Dalam proses penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI terhadap jamaah nya dilaksanakan secara musyawarah bersama melalui kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI setiap satu bulan sekali.

Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"...dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka" (Qs. Al-Syura': 38).

5. Tujuan adanya Islamic Social Enterprise (ISE)

Tujuan utama dari *Social Enterprise* adalah menghasilkan dampak sosial yang baik. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat dilihat dari bagaimana perusahaan secara konsisten menyampaikan serta mengkomunikasikannya kepada publik mengenai komitmennya untuk dampak sosial. Tujuan yang dimiliki *Social Enterprise* lalu diwujudkan dalam bentuk konkret seperti menciptakan lapangan kerja, memberikan pelatihan, komitmen membangun keterampilan dalam komunitas lokal, ataupun penyediaan layanan lokal. Adapun dana yang digunakan guna mewujudkan tujuan tersebut merupakan hasil keuntungan yang kemudian diinvestasikan kembali untuk memberi dampak sosial.

Tujuan dari adanya *Islamic Social Enterprise* (ISE) menurut M. Nursate Aziz, (2017) adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memecahkan masalah-masalah sosial, yang pada akhirnya akan

mengurangi ketimpangan sosial. “Menyelesaikan masalah sosial” termasuk memastikan fasilitas kesehatan (air minum bersih, gizi minimal), dukungan medis, dana pendidikan dan fasilitas perumahan bagi masyarakat miskin. *Islamic Social Enterprise* (ISE) juga dapat mengatasi masalah sosial lainnya di masyarakat. Sejumlah pendapatan tahunan dan kemandirian rumah tangga miskin dapat dianggap sebagai standar pengentasan kemiskinan. Ini mungkin berbeda di setiap negara.

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari hal tersebut Yayasan PDHI juga memiliki prinsip bagi jamaahnya yaitu sebagai berikut:

- a) Memupuk Ukhuwah Islamiyah , tasamuh dan gotong royong di dalam masyarakat
- b) Membangun dan memberikan bantuan pembangunan tempat peribadatan dan kemasyarakatan serta amal jariyah yang lainnya
- c) Mengadakan kunjungan silaturahmi kepada calon haji dan baru kembali dari ibadah haji
- d) Mengadakan pertemuan, ceramah, pengajian dan sebagainya, untuk menambah ilmu dan amal
- e) Segala usaha yang sah dan halal guna tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas.

6. Kerangka Islamic Social Enterprise (ISE)

Jika suatu konsep tidak bertentangan dengan hukum dasar Syariah, tidak perlu mengubah konsep itu. Oleh karena itu tidak adanya perubahan terkait dengan pengertian tentang “*Social Enterprise* (SE)”. Menurut Yunus dan Weber (2009) *Islamic Social Enterprise* (ISE) ini dibagi menjadi dua jenis yaitu *Islamic Social Enterprise* (ISE) Tipe I adalah bisnis yang akan ditangani oleh sekelompok pengusaha profesional, yang akan membiayai bisnis tersebut, tetapi tidak berhak atas keuntungan atau dividen apa pun. Penyedia modal untuk bisnis ini dapat menarik jumlah pokok setelah bisnis menjadi mandiri. Bisnis harus fokus pada produk yang memastikan tujuan sosial, etika, dan

lingkungan. Sebaliknya, *Islamic Social Enterprise* (ISE) Tipe II adalah bisnis berorientasi keuntungan yang dimiliki oleh masyarakat miskin dan kurang mampu.

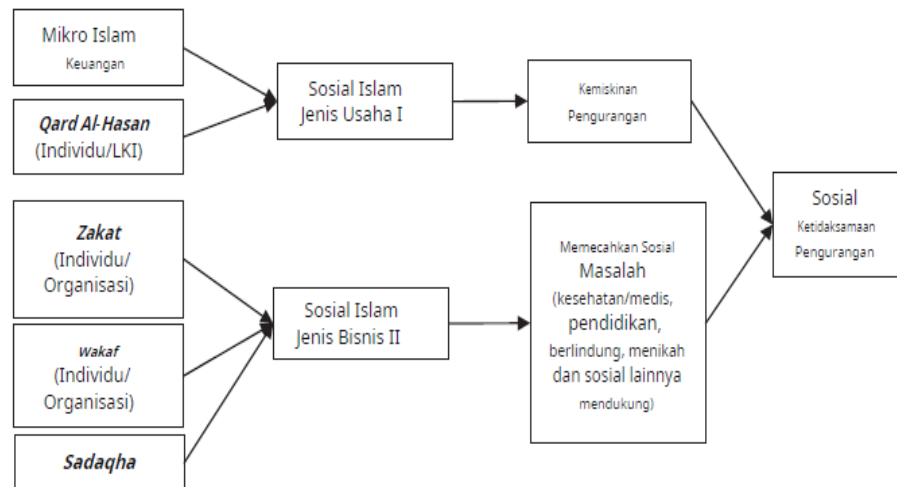
Jika dana masuk “Qard Al-Hassan” (atau keuangan mikro Islami), disebut dengan istilah bisnis ini “*Islamic Social Enterprise* (ISE)-T1”; dan jika dana dihasilkan dari Sedekah, Zakat, Wakaf atau donasi lainnya, kami menyebut bisnis ini “*Islamic Social Enterprise* (ISE) Tipe II”. Oleh karena itu, kerangka kerja berikut dapat disarankan untuk ISE.

ISE Tipe I menggunakan keuangan mikro Islam yang efisien dan ekstensif Qard Al-Hasan dana melalui ISE harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Organisasi pembangunan internasional, pemerintah dan lembaga keuangan dapat menyediakan pembiayaan (non-bunga) untuk mendirikan lembaga keuangan mikro Islam (di beberapa negara sudah ada, seperti Amanah Ikhtiar Malaysia). Bank syariah dapat mempertimbangkan pendirian proyek bisnis semacam itu *Islamic Social Enterprise* (ISE) sebagai tanggung jawab sosial mereka.

ISE Tipe II Lembaga keuangan Islam maupun organisasi amal Islam dapat mengumpulkan dan memanfaatkan secara efisien sumbangan wajib Islam serta sumbangan opsional, seperti, Zakat, Wakaf, Sadaqah Dan dana amal lainnya. Meskipun dana tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial, namun tidak boleh terbatas pada penyelesaian masalah sosial dan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Inisiatif kolektif oleh lembaga keuangan Islam dan organisasi amal Islam melalui *Islamic Social Enterprise* (ISE) akan secara signifikan mengurangi kemiskinan, dan karenanya, kesenjangan sosial.

Hal ini sesuai dengan uraian dari Osman bin Muhammad (2017) sebagai berikut:



Gambar 4.13. Kerangka ISE (Osman bin Muhammad, 2017)

5.1 Islamic Social Enterprise (ISE) Tipe I

a. (P1) *Not for Profit business*

(Bisnis nirlaba) lembaga keuangan Islam akan menyediakan “Qard Al-Hasan” untuk ISB. Sekelompok profesional akan menjalankan bisnis PLS biasa yang akan menerima remunerasi dari bisnis tersebut. Laba akan digunakan untuk membayar kembali “Qard Al-Hasan” secara sekaligus atau secara angsuran. Lembaga Kajian Indonesia (LKI) dapat mengubah jumlah biaya administrasi yang masuk akal selain jumlah pokok. Setelah total pinjaman dilunasi, keuntungan akan dibagi sebagian di antara orang miskin dan penerima dana akan didorong untuk menginvestasikannya di beberapa sektor produktif. Sisa keuntungan akan diinvestasikan kembali di ISE. Berkontribusi pada bisnis nirlaba akan menjadi peluang bagi IFI untuk menangani kewajiban sosial mereka, “CSR”.

b. (P2) *Islamic Social Enterprise (ISE)*

(produk ISE) lembaga keuangan syariah akan menyisihkan sejumlah dana untuk ISE. Bank itu sendiri akan menginvestasikan (Qard Al-Hasan) dana secara bersamaan dengan produk regulernya sendiri (investasi). Akun yang berbeda akan dipertahankan untuk bisnis pengelola sendiri dan untuk ISE. Ketika produk ISE jatuh tempo, yaitu produk ISE mulai menghasilkan laba, maka secara bertahap jumlah pokok akan ditarik dari ISE dan setelah pelunasan selesai, pengelola akan terus menjalankan produk ISE. Keuntungan sebagian akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan sisanya akan diinvestasikan kembali. Para profesional yang terlibat yang menjalankan produk ISE, akan diberikan remunerasi dari keuntungan ISE. Mirip dengan konsep I, hal ini juga dapat dipertimbangkan untuk pengelola sebagai layanan masyarakat.

c. (P3) *Microfinance Without Interest*

(Keuangan mikro tanpa bunga) lembaga keuangan Islam akan dilatih orang miskin dalam bisnis UMKM dan memberi mereka pinjaman ukuran kecil dan menengah sebagai Qard Al-Hasan. IFI akan memantau bisnis sampai jumlah pokok dibayarkan kembali. Atau, "jaminan sosial" (Besley dan Coate, 1995; Hulme dan Mosley, 1996) dapat digunakan untuk membiayai Qard Al-Hasan. Jumlah pokok bersama dengan biaya administrasi dapat diperoleh dari keuntungan bisnis. Setelah pelunasan selesai, maka orang miskin akan sepenuhnya bertanggung jawab atas usahanya sendiri. Meskipun tampaknya tidak ada insentif bagi pengelola, melalui mekanisme ini pengelola dapat melayani CSR-nya.

d. (P4) *Mudarabah Microfinance*

(Keuangan mikro dengan akad *Mudharabah*) lembaga keuangan syariah akan membiayai usaha mikro berdasarkan akad

Mudharabah dan klien yang bangkrut secara finansial akan mengelola usaha. Pembiayaan ini juga dapat didasarkan pada produk perbankan syariah lainnya, seperti *bay'-mu'ajjal*, *murabahah*, *ijarah* dan *ijarah wa iqtina'*. Baik pengelola dan masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari usaha atau bisnis yang dikelola.

e. (P5) *Pro-poor Human Capital*

(Sumber Daya Manusia (SDM)) Bagian dari keuntungan ISE, yang akan dihasilkan dari salah satu atau semua jenis usaha tersebut di atas, akan dimanfaatkan untuk mendirikan lembaga pelatihan kerja bagi masyarakat miskin. masyarakat akan diberikan pelatihan kejuruan secara gratis, yang akan mengarah pada pertumbuhan sumber daya manusia yang berpihak pada orang kurang berdaya di masyarakat.

5.2 Islamic Social Enterprise (ISE) Tipe II

a. (P6) *One of the Financial Institutions*

Setiap lembaga keuangan Islam (atau "khusus" Kepercayaan Zakat") dapat diambil tanggung jawab untuk mengumpulkan Zakat dari semua bank syariah di negara ini dan mendistribusikan dana dalam jumlah yang cukup besar ke beberapa rumah tangga miskin terpilih. Profesional dari pengelola dapat memandu penerima (dari zakat) mendirikan usaha kecil. Seperti yang diidentifikasi sebelumnya, ada beberapa jangka panjang Zakat sektor distribusi, seperti pembebasan tawanan dan pengeluaran untuk musafir, bukanlah fenomena biasa. Jika tidak ada penerima tersebut Zakat dana, lembaga keuangan Islam dapat menginvestasikan dana tersebut pada produk Bank Islam tertentu. Tidak seperti P2, investasi ini tidak memerlukan pengembalian apa pun untuk bank syariah kecuali remunerasi untuk para profesional yang terlibat.

b. (P7) Islamic Charity Organization

Organisasi amal Islam yang dapat mengumpulkan Wakaf, Sadaka dan Zakat dari orang umum dan lembaga. Pada saat dana ini dikumpulkan dari sumbernya, pengelola akan dengan jelas memberi tahu para donatur bahwa mereka Wakaf dan Shadaqah dana akan diinvestasikan di ISE, dan remunerasi staf yang akan terlibat di ISE, akan dibayarkan dari ISE. Keuntungan akan diinvestasikan kembali untuk perluasan ISE. Bagian dari keuntungan akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu setiap tahun. Namun, Zakat dana dapat digunakan sebagai berikut P6.

c. (P8) *Sadaqah and Zakat can be accumulated and can be partially disbursed among the poor for their consumption*

Akhirnya, Sedekah dan Zakat dapat diakumulasikan dan dapat disalurkan sebagian kepada fakir miskin untuk dikonsumsi. Namun, sisa dana tersebut tidak akan diberikan kepada orang miskin sebagai uang tunai, melainkan sebuah organisasi amal Islam yang akan mendirikan usaha untuk orang miskin dan akan memberi mereka pelatihan untuk bisnis UKM. Masyarakat miskin atau kurang mampu yang terpilih akan menjalankan bisnis mereka dan baik modal maupun keuntungan akan menjadi milik mereka.

Jika dilihat dari beberapa tipe lembaga amal sosial menurut Menurut Yunus dan Weber (2009) Yayasan PDHI ini justru memiliki tipe ke duanya yaitu *Islamic Social Enterprise* (ISE) Tipe I yang mana bisnis atau usaha akan dilaksanakan oleh sekelompok pengusaha profesional, yang akan membiayai bisnis tersebut, tetapi tidak berhak atas keuntungan atau dividen apa pun. Penyedia modal untuk bisnis ini dapat menarik jumlah pokok setelah bisnis menjadi mandiri. Bisnis harus fokus pada produk yang memastikan tujuan sosial, etika, dan

lingkungan. Serta memiliki tujuan yang sama untuk *Islamic Social Enterprise* (ISE) Tipe II yaitu usaha yang berorientasi keuntungan yang dimiliki oleh masyarakat miskin dan kurang mampu untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri. Hal inilah yang membuat Yayasan PDHI ini memiliki standar *Islamic Social Enterprise* (ISE) bagi pengelola dana amal di masyarakat dengan tujuan demi kemaslahatan umat tanpa adanya keuntungan yang diambil oleh pihak pemangku kepentingan di Yayasan PDHI Yogyakarta.

C. Hasil Pembahasan

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, konsep pemberdayaan masyarakat pada yayasan PDHI berbasis *Islamic Social Enterprise* (ISE) ini memiliki peran unik yakni memiliki dua peran secara formal dan non formal. Peran secara formal misalnya dengan mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren dan sekolah, sedangkan peran non formal contohnya dengan mengadakan pengajian-pengajian rutin di berbagai wilayah. Adanya pengajian ini juga menumbuhkan ukhuwah dan menumbuhkan solidaritas serta saling memiliki antar jama'ah Yayasan PDHI untuk tetap saling mengingatkan pada sebuah kebaikan dengan tujuan utamanya yaitu falah atau demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Aris Risdiana (2017), dengan judul melaksanakan analisis pada Yayasan PDHI “Peran PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) dalam Mengembangkan Peradaban Masyarakat (Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia)” dalam penelitiannya menemukan bahwa PDHI cukup aktif berpartisipasi dalam membangun peradaban, meskipun pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya masih relatif sederhana. Hal ini dibuktikan dengan Yayasan PDHI telah menginisiasi pembangunan masjid di berbagai daerah di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan mendirikan pendidikan rumah sakit, pusat Islam dan panti asuhan. Melalui peran dakwahlah Yayasan PDHI ini mampu memberikan kepercayaan

kepada masyarakat sehingga mempermudah Yayasan PDHI dalam memberdayakan jama'ahnya untuk bisa mandiri dari segi ekonomi serta sosial dan bisa memiliki usaha secara berkelanjutan.

Pada penelitian yang dilakukan ini memiliki sebuah *Maqasid syariah* dalam Islam digunakan secara luas untuk memandu keputusan hukum pada Yayasan PDHI, terutama ketika ada perubahan dinamis dalam masyarakat yang mungkin tidak ada di masa lalu. Tujuan utama dari syariah (maqasid syariah) adalah untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan di antara manusia, dan dengan demikian membimbing manusia ke jalan yang terbaik (Laldin, 2006). Seperti yang telah digaris bawahi oleh Ibnu Ashur, bahwa maqasid syariah adalah memperoleh apa yang baik dan bermanfaat (jalb al-masalih) dan penolakan terhadap apa yang jahat dan berbahaya (dar' al-mafasid).

Hal ini justru berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh M Ikmal Hisyam Kamarudin (2019) dari USIM menganalisis sebuah tujuan untuk menyajikan model akuntabilitas keuangan Islam yang terintegrasi. Dengan menggunakan ketiga aspek akuntabilitas yaitu: (i) akuntabilitas kepada siapa (kelompok akuntabilitas); (ii) akuntabilitas untuk apa (dimensi akuntabilitas); dan (iii) akuntabilitas tentang bagaimana (alat dan proses akuntabilitas) diintegrasikan ke dalam satu model. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini juga bisa dikatakan salah satu proses dengan tujuan untuk bisa mensejahterakan masyarakat dari sisi sosial maupun ekonomi secara mandiri tanpa bergantung terhadap orang lain di sekelilingnya. Sedangkan dari sisi *Islamic Social Enterprise* (ISE) di Yayasan PDHI ini berupa pengelolaan dana filantropi demi kepentingan masalah umat dengan tujuan yang dicapai yaitu falah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Yayasan PDHI ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat didukung dengan adanya dana donasi yang terhimpun dalam program kegiatan dakwah di Yayasan PDHI. Dalam

kegiatan ini menunjukkan bahwa Yayasan PDHI ini melaksanakan proses pengelolaan dana donasi yang diterima dengan proses yang langsung didistribusikan oleh lembaga atau unit – unit kegiatan dan usaha yang dinaungi oleh Yayasan PDHI.

Hal ini lah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada Yayasan PDHI Yogyakarta, jika pada penelitian yang dilaksanakan oleh Aris Risdiana (2015) dengan judul Peran PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) dalam Mengembangkan Peradaban Masyarakat (Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia). Pada penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian yang saat ini terletak pada tujuan penelitiannya yang lebih berfokus pada sistem analisis manajemen sumber daya manusianya sedangkan penelitian yang saat ini di laksanakan merupakan berfokus pada proses pemberdayaan ekonomi yang berbasis *Islami Social Enterprise* pada Yayasan PDHI. Walaupun sama – sama melibatkan pembahasan dengan adanya peran sumber daya manusia di dalamnya, namun pada penelitian ini tidak terlalu difokuskan pada hal tersebut untuk dibahas lebih rinci.

Pemberdayaan masyarakat sudah sejak lama hadir di kalangan masyarakat, hanya saja saat ini memiliki peran yang sangat luas. Jika pemberdayaan dulu dipelopori oleh pemerintah untuk mengentaskan sebuah kemiskinan dan menumbuhkan kesejahteraan di masyarakat saat ini justru banyak lembaga filantropi atau Yayasan sosial maupun Pendidikan yang juga menerapkan sistem pemberdayaan untuk mengelola anggota atau masyarakat yang memiliki peran didalamnya. Saat ini juga banyak ditemukan beberapa Yayasan yang mulai menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat pada proses pengelolaan dana filantropi yang terhimpun dari masyarakat.

Salah satunya adalah Yayasan Dompot Dhuafa Yogyakarta merupakan sebuah organisasi filantropi dan kemanusiaan yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat dan kemanusiaan. Walaupun jika dilihat secara sekilas ini merupakan sebuah Yayasan dengan memiliki program yang sama

yaitu pendidikan, ekonomi dan sosial. Namun, hal ini memiliki peran yang berbeda jika Yayasan PDHI ini fokus pada pengembangan keadaan masyarakat melalui program kegiatan jangka panjang seperti pendirian lembaga pendidikan, pembangunan rumah sakit hingga menjaga peradaban islam melalui pembangunan masjid di beberapa daerah. Hal ini merupakan sebuah pemberdayaan masyarakat dengan melayani masyarakat melalui program Yayasan PDHI melalui peran jangka panjang. Program – program ini kemudian dikelola langsung oleh jama'ah Yayasan PDHI atau umat yang bersangkutan di daerah tersebut melalui bimbingan dan mentoring dari pihak Yayasan. Sedangkan untuk Yayasan Dompot Dhuafa lebih memiliki dan melayani masyarakat melalui program yang dimiliki secara langsung menggunakan dana filantropi yang sudah dikelola dan proses pengelolaannya dilakukan langsung oleh pihak – pihak yang bersangkutan oleh Yayasan Dompot Dhuafa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islamic Social Enterprise (ISE) diyakini harus mengarah pada *al-falah* yang berpedoman pada maqasid syariah. Pemberdayaan masyarakat berbasis *Islamic Social Enterprise* ini memiliki peran dengan bentuk kegiatan perekonomian yang mampu menyokong kegiatan sosial di lembaga – lembaga atau mitra yang dimiliki oleh Yayasan PDHI. Yayasan PDHI memiliki sebuah aktivitas bisnis untuk mendukung kebutuhan operasional serta kegiatan dakwah Yayasan PDHI yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat antaranya : KSUS BMT PDHI Sasono Oro dan Rumah Sakit Islam Yogyakarta (RSIY) PDHI.

Sumber Dana dan Pembiayaan Yayasan PDHI (Drs. H. Juanda YHS, 2023 hasil wawancara) ini yaitu : (1) Semua biaya untuk pembangunan fisik , dakwah dan operasional , dibayar oleh jama'ah dengan “Uang Pas” (2) Pengurus menyampaikan kebutuhan macam-macam biaya kepada Jama'ah, Jama'ah langsung membayar , karena jama'ah “ Pas Ada Uang” (3) Hal ini sesuai dengan etos dakwah silaturahmi , tholabul ‘ilmi dan ‘amal jariyah.

Yayasan PDHI Yogyakarta memiliki sistem berdayaan secara mandiri terhadap semua mitra atau lembaga yang dinaunginya. Tujuan pemberdayaan masyarakat di PDHI kepada jama'ah yaitu mampu berkembang melalui berbagai bantuan pembiayaan, pelatihan, pembangunan sarana dan prasana, dan kelembagaan. Pencapaian tertinggi dari pendirian *Islamic Social Enterprise* (ISE) Yayasan PDHI sebagai yayasan sosial adalah pencapaian al-falah yang didasarkan pada ibadah atau ketaatan kepada Allah SWT. Maqasid syariah digunakan secara luas untuk memandu keputusan hukum pada Yayasan PDHI, terutama ketika ada perubahan dinamis dalam jama'ah yang mungkin tidak ada di masa lalu. ISE pada Yayasan PDHI memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan

kemandirian, mengentaskan kemiskinan dan memecahkan masalah sosial. *Islamic Social Enterprise* (ISE) pada Yayasan PDHI ini juga memiliki dua tipe jenis yaitu membiayai bisnis yang dilaksanakan tapi tidak berhak atas keuntungan nya dan orientasi keuntungan untuk memberdayakan masyarakat miskin secara mandiri.

B. Saran

Kendala yang dialami oleh PDHI berkaitan dengan sisi kaderisasi serta sosialisasi. Untuk mengatasinya, PDHI perlu memperluas jaringan kepada generasi muda, ikut serta dalam kegiatan mereka dan mengikut sertakan mereka dalam kegiatan PDHI. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lewat media tulis maupun media elektronik, serta pengadaan posisi public relation. Bukan Hanya itu saja yang perlu dilaksanakan oleh Yayasan PDHI. Diantaranya hal – hal yang perlu dilaksanakan oleh Yayasan PDHI kedepannya :

1. Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan yang mampu memberikan keuntungan secara finansial bagi jamaahnya.
2. Lebih aktif dalam mengembangkan segala bentuk perekonomian di unit jama'ah Yayasan PDHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purbathin Hadi, 'Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan', *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*, 1987, 2010 <[http://suniscome.50webs.com/32 Konsep Pemberdayaan Partisipasi Kelembagaan.pdf](http://suniscome.50webs.com/32_Konsep_Pemberdayaan_Partisipasi_Kelembagaan.pdf)>.
- Ahmad, SF (1988). Tanggung Jawab Etis Bisnis: Prinsip dan Implikasi Islam. *Jurnal Studi Objektif*, 3(1), 23 - 43.
- Akram Khan, M. (1994). *Pengantar Ekonomi Islam*. Pakistan: Institut Pemikiran Islam dan Institut Studi Kebijakan.
- Alarifi, G., & Alrubaishi, D. (2018). The social entrepreneurship landscape in Saudi Arabia. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 24(4), 2686.
- Alwi, M.A., M. M. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Al-Hikmah*, 18(1), 99–116. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.25>
- Andi Nugraha, 'Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi', *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5 (2009), 10 <<http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>>.
- Arikunto Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.', *Jakarta: Rineka Cipta*, 2013, p. 172 <<http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>>.
- Aris Risdiana, 'Peran Pdhi (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) Dalam Mengembangkan Peradaban Masyarakat (Analisa Manajemen Sumber Daya Manusia)', 2015, 37–52.
- Ashraf, M. A. (2019). Theory of islamic entrepreneurship: A conceptual paper. *International Journal of Entrepreneurship*, 23(3).
- Asif, M., Asghar, F., Younis, A., Mahmood, A., & Wang, L. Z. (2018). The Role of Social Entrepreneurship in Pakistan and its Impact on Economy. *International Journal of Business, Economics and Management*, 5(5), 117–127. <https://doi.org/10.18488/journal.62.2018.55.117.127>

- Boulven, M. A., Abdullah, S., Bahari, A., Ramli, A. J., Hussin, N. S., Jamaluddin, J., & Ahmad, Z. (2018). Model of Islamic Social Entrepreneurship: A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia. *MATEC Web of Conferences*, 150, 10–13. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201815005093>
- Chambers, R. (1985). *Rural development : putting the last first*. London ; New York: Longman.
- Chapra, MU (1992).Islam dan Tantangan Ekonomi. Hemdon: Institut Islam Internasional Pikiran (IIIT).
- Darmawan, ‘Mengukur Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Sektor Kesehatan Measuring Community Empowerment Level in Health Sector’, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7.2 (2012), 91–96
- Dees, JG (1998).Pengertian Kewirausahaan Sosial. Tersedia [Online] di, <http://www.gsb.stanford.edu> (Diakses pada 30 Juli 2017).
- Defourny, J., & Nyssens, M. (2010). Konsepsi Kewirausahaan Sosial dan Kewirausahaan Sosial di Eropa dan Amerika Serikat: Konvergensi dan Divergensi.*Jurnal Kewirausahaan Sosial*, 1(1), 32 - 53.
- Dewi, Ika nurani, Ida Royani, Sumarjan Sumarjan, and Husnul Jannah, ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga Menggunakan Metode Komposting’, *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 2.1 (2020), 12–18 <https://doi.org/10.36312/sasambo.v2i1.172>
- Di Domenico, M., Haugh, H., & Tracey, P. (2010). Brikolase Sosial: Berteori Penciptaan Nilai Sosial di Perusahaan Sosial.Kewirausahaan: Teori dan Praktek,34(4), 681 - 703.
- Doherty, B., Haugh, H., & Lyon, F. (2014). Usaha Sosial sebagai Organisasi Hibrida: Tinjauan dan Agenda penelitian.Tinjauan Jurnal Manajemen Internasional,16(4), 417 - 436.
- Dusuki, AW, & Abdullah, NI (2007). Maqasid al-Syariah, Masalah, dan Corporate Social Tanggung jawab.Jurnal Ilmu Sosial Islam Amerika,24(1), 25 - 44.

- Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, and Imam Hanafi, 'Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.4 (2013), 9–14.
- Fairizta, Yunia Arien, Suharno Suharno, and Nurul Anwar, 'Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11 (2020), 1207
- Fariq Wahyudi, 'Manajemen Wakaf Wakaf Produktif', *Tesis*, 2016, 2–8.
- Ferezagia, Debrina Vita, 'Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1.1 (2018), 1–6
<https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Friedman, John, 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Ghazanfar, SM, & Islahi, AA (1997). *Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*. Jeddah: Ekonomi Islam Pusat Penelitian.
- Hadiyanto Abdul Rachim, Dudi Dudi, and Meilanny Budiarti Santoso, 'Menggagas Social Enterprise Melalui Aktivitas Mesjid Kampus', *Share : Social Work Journal*, 8.2 (2019), 150 <<https://doi.org/10.24198/share.v8i2.19036>>.
- Hati, S. R. H., & Idris, A. (2019). The role of leader vs organisational credibility in Islamic social enterprise marketing communication. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1128–1150. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0018>
<https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i12.p04>
- Ife, Jim (1995), *Community Development : Creating Community, Alternatives, Vision, Analysis is and Praticce*, Longman, Australia.
- Jupp, D, S Ibn Ali, and C Barahona, *Measuring Empowerment? Ask Them. , Sida Studies in Evaluation*, 2010, 1 <papers2://publication/uuid/C80BA0D4-7620-492E-8F9F-7A167E30BA0A>
- Kadir, MABA, & Sarif, SM (2016). Kewirausahaan Sosial, Wirausaha Sosial dan Sosial Perusahaan: Tinjauan Konsep, Definisi, dan Pengembangan di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Berkembang & Riset Islam*, 4(2), 1 – 16.

- Kamaruddin, MIH, & Auzair, SM (2018). Klasifikasi Islamic Social Enterprises (ISE) di Malaysia Berdasarkan Sektor Ekonomi. *Tinjauan Manajemen & Akuntansi*, 17(2), 17 - 42.
- Kerlin, JA (2006). Perusahaan Sosial di Amerika Serikat dan Eropa: Memahami dan Belajar dari Perbedaan. *Voluntas: Jurnal Internasional Organisasi Sukarela dan Nirlaba*, 17(3), 247 - 263.
- Kuran, T. (2006). Ketidadaan Korporasi dalam Hukum Islam: Asal Usul dan Kegigihan. *Orang Amerika Jurnal Perbandingan Hukum*, 53(4), 785 - 834.
- Laldin, MA (2006). *Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Kuala Lumpur: Universitas Islam Internasional Malaysia.
- Laverack, Glenn, and Nina Wallerstein, 'Measuring Community Empowerment: A Fresh Look at Organizational Domains', *Health Promotion International*, 16.2 (2001), 179–85 <<https://doi.org/10.1093/heapro/16.2.179>>
- Maya, Siska, Sugeng Haryono, and Umi Kholisya, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis Dan Pembentukan Bank Sampah Di Kelurahan Tanjung Barat', *Proceeding of Community Development*, 1.2 (2018), 157 <https://doi.org/10.30874/comdev.2017.21>
- Merlyn Mourah Karuntu, David P.E Saerang, and Joubert B Maramis, 'Pendekatan Grounded Teori: Sebuah Kajian Prinsip, Prosedur, Dan Metodologi', *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10.2 (2022), 1070–81 <<https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41425>>.
- Mohd Adib Boulven and others, 'Model of Islamic Social Entrepreneurship: A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia', *MATEC Web of Conferences*, 150 (2018), 10–13 <<https://doi.org/10.1051/matecconf/201815005093>>.
- Muhammed, N. A., Kamaruddin, M. I. H., & Nasruddin, N. S. (2018). Positioning Islamic social enterprise (ISE). *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 6(3), 28. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v6i3.8785>
- Muhammed, Nurul Aini, Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin, and Nur Syazwani Nasruddin, 'Positioning Islamic Social Enterprise (ISE)', *Journal of Emerging*

- Economies and Islamic Research*, 6.3 (2018), 28
<<https://doi.org/10.24191/jeeir.v6i3.8785>>
- Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 'Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif', *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.2 (2021), 106–34
<<https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>>.
- Munawar Noor, 'Pemberdayaan Masyarakat', *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.2 (2011).
- Myrian Coelho Cunha da Cruz, *Undang - Undang RI NO.16, 43*, (2001) 8. العدد الحا.
- Narayan, Deepa, *Empowerment and Poverty Reduction; World Bank Source Book*, 2002
- Nindatu, Peininan Ireine, 'Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Persepektif Komunikatif*, 3.2 (2019), 91–103
- Nurul Aini, Muhamed, Ramli Nathasa Mazna, Abdul Shukor Syadiyah, and Kamaruddin Muhammad Iqmal Hisham, 'Governing the Islamic Social Enterprise (ISE)', *Critical Readings in Islamic Social Finance. Vol. 2, YTI Lecture Series*, 2016, 205–27.
- Prasetyawan, A. A., Asep, D., & Rohimat, M. (2019). Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren dan Social Entrepreneurship. *Arian Agung P & Asep Maulana R*) |, 163, 163–180. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v11i2.2281>
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Purwanto. (2018). Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah (1nd ed). Magelang. Staial Press
- Qs. Al-Furqan 25:67
- Rachim, H. A., Dudi, D., & Santoso, M. B. (2019). Menggagas Social Enterprise Melalui Aktivitas Mesjid Kampus. *Share : Social Work Journal*, 8(2), 150. <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.19036>

- Rahim, S. (2013). Keadilan Distributif: Perspektif Sastra Ekonomi Islam. Jurnal dari Ekonomi Berkembang dan
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasi*, 5(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v5i1.223>
- Siddiqi, MN (2004). Alamat Utama. Meja Bundar Ekonomi Islam: Keadaan Saat Ini Pengetahuan dan Pengembangan Disiplin. Jeddah: Institut Penelitian dan Pelatihan Islam.
- Sri Rahayu Hijrah Hati and Aida Idris, 'The Role of Leader vs Organisational Credibility in Islamic Social Enterprise Marketing Communication', *Journal of Islamic Marketing*, 10.4 (2019), 1128–50 <<https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0018>>.
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.', 2008, 334.
- Tombak, RG, Cornforth, CJ, & Aiken, M. (2009). Tantangan Tata Kelola Usaha Sosial: Bukti dari Studi Empiris Inggris. Jurnal Ekonomi Publik dan Koperasi, 80(2), 247 - 273.
- Utama, R. D. R., Fitrandasari, Z., Arifin, M., & Muhtadi, R. (2018). Can Mosque Fund Management for Community Economic Empowerment?: an Exploratory Study. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 3(2), 451. <https://doi.org/10.30659/ijibe.3.2.451-457>
- Zakariya, N. A. (2021). Filantropi Islam, Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim). *Tesis*.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara

a. Narasumber Pertama



b. Narasumber Kedua



c. Narasumber Ketiga



d. Narasumber Keempat



e. Narasumber Kelima



f. Narasumber Keenam



2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PEMBERDAYAA MASYARAKAT BERBASIS ISLAMIC SOCIAL ENTERPRISE PADA YAYASAN PDHI DI DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA

- Kepala Yayasan PDHI
- Penanggung Jawab bidang Pemberdayaan Yayasan PDHI
- Kepala atau Penanggung Jawab RS Islam Yogyakarta PDHI

Aspek Wawancara Fokus pada :

- Pemberdayaan
- *Islamic Social Enterprise*

Tanggal dan Waktu Wawancara :

Tempat :

A. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Asal Daerah :

B. Daftar Pertanyaan

I. Pemberdayaan

ASPEK	PERTANYAAN
Informasi Umum	1. Apa tujuan program pemberdayaan di PDHI? 2. Bagaimana sejarah program? 3. Siapa dan berapa penerima manfaat program pemberdayaan?
Akses terhadap Informasi	4. Apakah penerima manfaat diberikan informasi yang lengkap terkait program pemberdayaan? 5. Dengan adanya program pemberdayaan, apakah penerima manfaat lebih giat menggali informasi dari berbagai sumber? 6. Bagaimana upaya PDHI dalam memperkenalkan teknologi informasi kepada penerima manfaat?
Inklusivitas	7. Bagaimana upaya PDHI dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan para penerima manfaat? 8. Apakah PDHI turut melibatkan penerima manfaat untuk menyusun dan melaksanakan sebuah program pemberdayaan? 9. Apakah penerima manfaat diberi kesempatan untuk mengakses permodalan usaha? Bagaimana prosesnya?
Akuntabilitas	10. Apakah perkembangan pelaksanaan program pemberdayaan dilaporkan kepada para pemangku kepentingan? Bagaimana prosesnya? 11. Apakah PDHI membuat laporan keuangan yang memadai terkait program pemberdayaan dan bagaimana prosesnya?
Peningkatan kapasitas organisasi lokal	12. Bagaimana upaya yang dilakukan PDHI agar masyarakat yang diberdayakan memiliki organisasi yang kuat dan saling mendukung?

	13. Bagaimana langkah yang diupayakan oleh PDHI agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan?
--	---

II. *Islamic Social Enterprise*

ASPEK	PERTANYAAN
Pertanyaan Umum	1. Kapan Yayasan PDHI ini didirikan? 2. Apa latar belakang pendirian Yayasan PDHI ? 3. Mohon ceritakan sejarah berdirinya Yayasan PDHI !
Tujuan	4. Apa tujuan didirikan Yayasan PDHI ? 5. Apa yang menjadi nilai-nilai yang mendasari pendirian Yayasan PDHI ? 6. Apakah hasil yang diharapkan dari pendirian Yayasan PDHI ? 7. Apa langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan Yayasan PDHI ? 8. Apa nilai-nilai yang dibangun dalam pengelolaan Yayasan PDHI ?
Sumber dana	9. Darimana sumber dana utama pendirian Yayasan PDHI ? 10. Bagaimana perbedaan pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf, dan hibah yang diterima Yayasan dalam kaitannya pendirian dan pengembangan Yayasan PDHI ? 11. Bagaimanakah saat pendirian Yayasan PDHI mendapatkan persetujuan dari jamaah dan pemerintah ? 12. Bagaimana Rencana pengembangan Yayasan PDHI ke depan ?
Aktivitas	13. Apa saja usaha yang dijalankan oleh Yayasan PDHI ?

	<p>14. Siapa yang menjadi pengelola Yayasan PDHI ?</p> <p>15. Bagaimana jika Yayasan PDHI mengalami kerugian dan tanggung jawabnya terhadap jamaah ?</p>
Pendapatan	<p>16. Berapa pendapatan yang diperoleh Yayasan PDHI ?</p> <p>17. Bagaimana laba/rugi yang dialami Yayasan PDHI selama ini ?</p> <p>18. Bagaimana kontribusi Yayasan PDHI terhadap aktivitas program -program yang didirikannya ?</p> <p>19. Untuk apa saja keuntungan dari Yayasan PDHI terhadap program – program yang didirikan ?</p> <p>20. Bagaimana keuntungan Yayasan PDHI diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha lain ?</p>

3. Hasil Wawancara Narasumber

a. Narasumber I

Tanggal dan Waktu Wawancara : Rabu, 4 Januari 2023

Tempat : Kantor Yayasan PDHI

1. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Juanda YHS
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 69
Jabatan : Sekertaris Umum (Pengurus PDHI)
Pendidikan Terakhir : S3
Asal Daerah : Bantul

2. Daftar Pertanyaan

I. Pemberdayaan

ASPEK	PERTANYAAN
Informasi Umum	<p>14. Apa tujuan program pemberdayaan di PDHI?</p> <ol style="list-style-type: none">Memelihara hasil ibadah haji yang mabrur serta memperluas kemabruran tersebut kedalam masyarakat.Mengamalkan kemanfaatan yang terdapat dari ibadah haji dan sekitarnya.Membangun rasa wajib beribadah haji bagi pemeluk agama islam.Membimbing para calon haji kearah haji mabrur. <p>15. Bagaimana sejarah berdirinya program?</p> <p>Adanya perbedaan yang dirasakan pada umat islam di tanah air, menarik perhatian serombongan mengingat banyak hal yang terjadi di kalangan Ummat Islam di Tanah Air. Dengan harapan mereka dapat menjalankan ibadah bersama dengan tenteram dan tenang, meskipun ada perbedaan mengenai cara, faham dan madzhab yang dianutnya, seperti yang masalah kecil, kadang menjadi besar yang sukar teratasi, maka dengan rasa keinsyafan, kesadaran dan kemauan yang sama, suasana Ukhuwah Islamiyah, tenang dan damai, yang didapat selama perjalanan haji sengaja akan dipelihara, bukan saja untuk pribadi masing masing, bahkan akan dibawa pulang ke Tanah Air, sebagai hadiah atau oleh-oleh yang merupakan sebagian hikmah atau manfaat , ibadah haji yang</p>

	<p>mabrur, sesuai dengan Firman dalam surat Al Hajj ayat 26. LIYASYHADU MANAFI'A LAHUM ; yang artinya : agar mereka menyaksikan beberapa manfaat bagi mereka. Sebagai pedoman dalam melaksanakan maksud tersebut dalam ikrar ini, kami serombongan membuat sebuah garis ikrar. Dibat dan disetujui bersama serombongan di Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 Miladiyah , ditanda tangani oleh : ketua rombongan, wakil Bantul Timur, wakil Bantul Barat. Untuk merealisasikan ikrar para jama'ah Haji ini membuat sebuah program sosial dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut.</p> <p>16. Siapa dan berapa penerima manfaat program pemberdayaan? Seluruh umat terutama jama'ah PDHI yang membutuhkan</p>
Akses terhadap Informasi	<p>17. Apakah penerima manfaat diberikan informasi yang lengkap terkait program pemberdayaan? Iya, bahkan untuk memutuskan siapa yang akan di beri manfaat disampaikan dan diadakan rapat secara Bersama – sama</p> <p>18. Dengan adanya program pemberdayaan, apakah penerima manfaat lebih giat menggali informasi dari berbagai sumber? Jelas, (karena hal ini perlu adanya pembinaan dan juga diskusi secara bersama – sama dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan terutama di bidang perekonomian) hal ini juga menjadikan sebuah amal jariyah serta terjalinnya silaturahmi antar jama'ah PDHI, bukan itu saja hal ini juga dilakukan dalam proses dakwah kepengurusan PDHI terhadap jama'ah nya.</p> <p>19. Bagaimana upaya PDHI dalam memperkenalkan teknologi informasi kepada penerima manfaat? Upaya yang bisa dilakukan saat ini masih melalui aplikasi WA ini mampu mempermudah masyarakat dalam menjalin komunikasi antar jama'ah hingga adanya proses kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini bisa di ikuti oleh banyak masyarakat umum di berbagai daerah di sekitar Yogyakarta.</p>

Inklusivitas	<p>20. Bagaimana upaya PDHI dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan para penerima manfaat? Diawali dengan dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI, mulailah terjalin komunikasi antar masyarakat sehingga muncullah beberapa permasalahan yang ada disekitar daerah tersebut, hal inilah yang menjadi sebuah perhatian penting bagi pihak Yayasan sehingga dilaksanakan adanya sebuah pembinaan di daerah tersebut, bukan hanya saja pembinaan namun juga dukungan berupa materi serta ketrampilan dalam proses penyelesaian masalah yang ada. Seperti dalam proses peningkatan perekonomian di daerah tersebut pihak Yayasan PDHI memberikan sebuah bibit buah atau tanaman yang bisa di tanam di daerah tersebut dengan bimbingan dari para ahlinya, setelah berhasil melaksanakan panen dengan baik maka hal ini akan di pantau oleh pihak Yayasan PDHI.</p> <p>21. Apakah PDHI turut melibatkan penerima manfaat untuk menyusun dan melaksanakan sebuah program pemberdayaan? Iya betul, semua hal yang akan di berikan ke pada penerima manfaat maka akan ikut andil dalam proses penyusunan dan juga pelaksanaannya. Karena prinsip yang terjalin pada Yayasan PDHI ini merupakan “Dari umat untuk umat”. Dalam hal ini masyarakat yang akan lebih mengerti bagaimana keadaan masyarakat yang ada di daerah tersebut.</p> <p>22. Apakah penerima manfaat diberi kesempatan untuk mengakses permodalan usaha? Bagaimana prosesnya? Jarang dilaksanakan karena sistem yang digunakan merupakan sebuah sistem syaria’ah dan semua Lembaga yang dibawah naungan Yayasan PDHI ini di berikan kebebasan total dalam proses pengembangannya.</p>
Akuntabilitas	<p>23. Apakah perkembangan pelaksanaan program pemberdayaan dilaporkan kepada para pemangku kepentingan? Bagaimana prosesnya? Tidak di laporkan, karena sistem yang dilaksanakan oleh pihak Yayasan PDHI ini merupakan sebuah sistem sosial yang memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin berkembang dengan usaha dan</p>

	<p>kreativitas yang dimiliki untuk tetap bertahan, meskipun di awal akan tetap di beri pembinaan serta bantuan yang mampu di berikan.</p> <p>24. Apakah PDHI membuat laporan keuangan yang memadai terkait program pemberdayaan dan bagaimana prosesnya? Ini dilaksanakan pada setiap Lembaga atau instansi di bawah Yayasan PDHI, hanya saja tidak wajib di berikan kepada pihak Yayasan PDHI karena proses segala aktivitasnya sudah secara Mandiri (Otomi).</p>
Peningkatan kapasitas organisasi lokal	<p>25. Bagaimana upaya yang dilakukan PDHI agar masyarakat yang diberdayakan memiliki organisasi yang kuat dan saling mendukung? Membiasakan membangun silaturahmi antar jama'ah Yayasan PDHI melalui kegiatan yang di selenggarakan oleh Yayasan PDHI. Seperti kegiatan Pengajian Rutin Jum'at & Sabtu Pagi di PDHI, Pengajian Keliling Masjid Binaan PDHI, Pengajian Ahad Pon dan Pengajian Manasik Haji.</p> <p>26. Bagaimana langkah yang diupayakan oleh PDHI agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan? Hal ini diawali dengan adanya musyawarah, lalu mengerti titik permasalahan yang di hadapi lalu lah diadakan sebuah pembinaan demi mencapai tujuan yang telah di cetuskan.</p>

II. *Islamic Social Enterprise*

ASPEK	PERTANYAAN
Pertanyaan Umum	<p>1. Kapan Yayasan PDHI ini didirikan? Dibuat dan disetujui bersama serombongan di Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 Miladiyah</p> <p>2. Apa latar belakang pendirian Yayasan PDHI ? a. Para Jama'ah Haji dari Yogyakarta , khususnya dari Kabupaten Bantul, melihat suasana yang kurang menggembirakan , yang meliputi ummat Islam di Tanah Air Indonesia, dengan adanya perpecahan partai, khilaf <i>furu'iyah</i> diantara</p>

	<p>Zu'amma'ul Muslimin dan penonjolan kembali masalah-masalah khilafiyah yang menyebabkan timbulnya golongan-golongan bahkan terkadang terjadi clash di antara sesama Ummat Islam.</p> <p>b. Pada musim haji tahun 1371 Hijriyah atau tahun 1952 Masehi , dapat berkumpul dengan Ummat Islam dari segala bangsa yang berlainan kulit dan bahasa, tabiat, madzhab dan cara , akan tetapi satu agama : ISLAM, satu langkah : IBADAH, satu tujuan : MENCARI KERIDHOAN ALLAH RABBUL 'ALAMIN.</p> <p>c. Di Masjidil Haram Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 H bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 M , ditanda tangani IKRAR BERSAMA , bahwa para jama'ah haji setelah kembali ke tanah air , menghimpunkan diri dalam satu wadah yang diberi nama : PERSAUDARAAN DJAMA'AH HADJI INDONESIA disingkat PDHI, berkedudukan pusat di Yogyakarta.</p>
Tujuan	<p>3. Apa tujuan didirikan program – program Yayasan PDHI ?</p> <p>(a) Memelihara hasil ibadah haji yang mabrur serta memperluas kemabruran tersebut kedalam masyarakat.</p> <p>(b) Mengamalkan kemanfaatan yang terdapat dari ibadah haji dan sekitarnya.</p> <p>(c) Membangun rasa wajib beribadah haji bagi pemeluk agama islam.</p> <p>(d) Membimbing para calon haji kearah haji mabrur.</p> <p>4. Apa yang menjadi nilai-nilai yang mendasari pendirian Yayasan PDHI ?</p> <p>a. Memelihara Ukhuwah Islamiyah secara luas ;</p> <p>b. Ikhtiyar mencapai haji mabrur ;</p> <p>c. Memanfaatkan kemabruran ibadah haji dalam masyarakat ;</p> <p>d. Menggerakkan tholabul 'ilmi dan 'amal ;</p> <p>e. Mempelopori gotongroyong dan berdana untuk beramal jariyah ;</p> <p>f. Tidak mencampuri soal-soal politik ;</p> <p>g. Menitik beratkan masalah masalah kerohanian.</p> <p>5. Apakah hasil yang diharapkan dari pendirian Yayasan PDHI ?</p>

	<p>Tercapainya tujuan adanya pendirian Yayasan PDHI serta mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi banyak umat terutama bagi jama'ah Yayasan PDHI.</p> <p>6. Apa langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Memupuk Ukhuwah Islamiyah , tasamuh dan gotong royong di dalam masyarakat Membangun dan memberikan bantuan pembangunan tempat peribadatan dan kemasyarakatan serta amal jariyah yang lainnya Mengadakan kunjungan silaturahmi kepada calon haji dan baru kembali dari ibadah haji Mengadakan pertemuan, ceramah, pengajian dan sebagainya, untuk menambah ilmu dan amal Segala usaha yang sah dan halal guna tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas.
Sumber dana	<p>7. Darimana sumber dana utama pendirian Yayasan PDHI ?</p> <p>Dana donasi dari pengurus Yayasan PDHI dan rasa kepemilikan dengan wujud rasa ukuwah Islamiyah agar tercapainya kemaslahatan untuk umat.</p> <p>8. Bagaimana perbedaan pendayagunaan dana infak, wakaf, dan hibah yang diterima Yayasan dalam kaitannya pendirian dan pengembangan Yayasan PDHI ?</p> <p>Semua dana yang di himpun melalui kegiatan dakwah dengan wujud kegiatan pengajian rutin, kemudian di Kelola langsung oleh pihak jama'ah PDHI semua kemudia di distribusikan untuk pembangunan ataupun kegiatan sosialnya yang di butuhkan oleh masyarakat saat itu. Dengan berbagai macam pemantauan dari pihak Yayasan PDHI.</p> <p>9. Bagaimanakah saat pendirian Yayasan PDHI mendapatkan persetujuan dari jamaah dan pemerintah ?</p> <p>Iya betul, karena adanya Yayasan PDHI ini berdasarkan tujuan dan keresahan Bersama yang dirasakan oleh para Jama'ah Haji di DI Yogyakarta, yang kebetulan saat itu merasakan keresahan akan banyak nya perbedaan yang terjadi dikalangan ummat islam di Indonesia, dengan tujuan serta</p>

	<p>kepentingan Bersama maka Yayasan PDHI ini didirikan oleh Jama'ah Haji pada tahun 1952 M.</p> <p>10. Bagaimana Rencana pengembangan Yayasan PDHI ke depan ?</p> <p>Sampai saat ini sudah ada beberapa program yang akan dilaksanakan namun masih dalam proses perencanaan. Hingga saat ini Yayasan PDHI ini bisa berkembang dan siap membantu umat yang membutuhkan sesuai dengan kesiapan eksekutor di lapangan.</p>
Aktivitas	<p>11. Apa saja usaha yang dijalankan oleh Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Gedung PDHI “SASONO WORO “ Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra/Putri di Gandu, Sendangtirta, Berbah, Sleman dan Tegalyoso, Siti mulyo, Piyungan , Bantul. Madrasah Tsanawiyah di Girikarto, Panggang,GK Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI di Cupuwatu, Kalasan. Raudhatul Athfal Islam di Wirokerten dan TK Ibnul Qoyyim Pondok Hafidhu Dhu'afa di Girikarto,Panggang,GK Koperasi Serba Usaha Syariah – BMT PDHI Islamic Center di Balong, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman. Islamic Center di Playen , Gunung Kidul. Panti Asuhan HJ.SARWATI-PDHI di Margoluwih, Seyegan, Sleman. Tempat Pemakaman Bukan Umum /Makam Haji di Piyungan. Klinik Pratama –PDHI di Wonosari. <p>Siapa yang menjadi pengelola Yayasan PDHI ?</p> <p>Masyarakat yang ingin mengabdikan di PDHI dengan syarat sudah Haji atau Umroh</p> <p>12. Bagaimana jika Yayasan PDHI mengalami kerugian dan tanggung jawabnya terhadap jamaah ?</p> <p>Yayasan PDHI ini merupakan sebuah Lembaga sosial dan non profit jadi bisa dikatakan bahwa Yayasan PDHI ini tidak akan mengalami kerugian, bertepatan dengan hal itu Yayasan PDHI ini juga merupakan</p>

	<p>yayasan sosial yang memiliki banyak lembaga yang di naungi dan di kembangkan secara mandiri melalui otomi oleh Yayasan PDHI.</p>
Pendapatan	<p>13. Berapa pendapatan yang diperoleh Yayasan PDHI ? Tidak ada, meskipun ada dana yang masuk di Yayasan PDHI semua digunakan untuk keperluan dakwah dan oprasional Yayasan PDHI seperti membayar pajak, perawatan kendaraan dan juga beberapa ikhsan untuk yang berhak menerimanya. Untuk pengurus tidak mendapatkan sama sekali uang tersebut.</p> <p>14. Bagaimana laba/rugi yang dialami Yayasan PDHI selama ini ? Tidak ada Laba Rugi karena Yayasan ini merupakan Yayasan dibidang sosial dan bukan ekonomi</p> <p>15. Bagaimana kontribusi Yayasan PDHI terhadap aktivitas program -program yang didirikannya ? Memberikan bantuan semaksimal mungkin hanya saja bukan berupa materi nyata seperti uang, lebih terhadap sesautu yang bisa di kembangkan dan keberlangsungan aktivitas program yang ada. Seperti pemberian bibit tumbuhan untuk masyarakat yang membutuhkan di daerah tertentu yang hasilnya bisa di manfaatkan untuk keberlangsungan pengelolaan tanamannya dan juga kebutuhan masyarakat. Keuntungan tersebut juga tidak masuk ke dalam keuangan Yayasan PDHI sama sekali.</p> <p>16. Untuk apa saja keuntungan dari Yayasan PDHI terhadap program – program yang didirikan ? Yayasan PDHI ini tidak memiliki keuntungan, jika pun ada di dari beberapa program seperti BMT PDHI dan RSIY PDHI di gunakan untuk kepentingan Dakwah, Oprasioonal, pembayaran Pajak dll. Intinya dana yang didapatkan tidak di gunakan untuk kepentingan pengurus Yayasan PDHI.</p> <p>17. Bagaimana keuntungan Yayasan PDHI diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha lain ? Investasi terbesar Yayasan PDHI ini bukan berupa uang ataupun materi namun berupa mitra dan juga realsi masyarakat yang sangat luas, jama'ah yang</p>

	begitu banyak sehingga mampu memperluas dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI sehingga mampu mendukung segala program yang didirikan oleh Yayasan PDHI.
--	--

b. Narasumber II

Tanggal dan Waktu Wawancara : Selasa, 10 Januari 2023

Tempat : Arif Optic

1. Identitas Informan

Nama : H. M. Arifin S.E

Jenis Kelamin : Laki – laki

Umur : 55

Jabatan : Pemberdayaann Ekonomi

Pendiikan Terakhir : S1

Asal Daerah : Arif Optic, Jl. MT. Haryono No.83,
Suryodiningratan, Mantrijeron,
Yogyakarta City, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55133

2. Daftar Pertanyaan

I. Pemberdayaan

ASPEK	PERTANYAAN
Informasi Umum	<p>1. Apa tujuan program pemberdayaan di PDHI? Adanya pemberdayaan masyarakat ini untuk mensejahterakan masyarakat pada sector perekonomian dan kehidupan social.</p> <p>2. Bagaimana sejarah berdirinya ? Wah ini sangat panjang sekali ya jika di jelaskan karena pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Yayasan PDHI ini bukan hanya dalam satu program namun banyak sekali, hanya saja inti dari awal mula berdirinya pemberdayaan masyarakat ini berawal dari kegiatan dakwah berupa kegiatan pengajian rutin yang di laksanakan oleh Yayasan PDHI pada setiap bulannya.</p>

	<p>3. Siapa dan berapa penerima manfaat program pemberdayaan? Seluruh umat terutama jama'ah PDHI yang membutuhkan</p>
Akses terhadap Informasi	<p>4. Apakah penerima manfaat diberikan informasi yang lengkap terkait program pemberdayaan? Jelas di berikan, dalam memutuskan mustahik atau yang berhak menerima manfaat di putuskan secara bersama – sama melalui musyarah pada kegiatan kajian rutin PDHI.</p> <p>5. Dengan adanya program pemberdayaan, apakah penerima manfaat lebih giat menggali informasi dari berbagai sumber? Justru hal ini perlu adanya komunikasi yang baik antara penerima manfaat dan juga pihak PDHI, karena dalam proses pelaksanaan program yang dijalankan oleh PDHI ini perlu adanya pembinaan, pemantauan hingga evaluasi.</p> <p>6. Bagaimana upaya PDHI dalam memperkenalkan teknologi informasi kepada penerima manfaat? Hingga saat ini mungkin belum terlaksana secara maksimal, tapi dengan adanya aplikasi WA dan media sosial lain nya mampu mempermudah jama'ah PDHI ini menjalin komunikasi antar sesama. Tentunya hal ini mampu mempermudah segala akses kebutuhan yang berhubungan dengan proses pemberdayaan itu sendiri.</p>
Inklusivitas	<p>7. Bagaimana upaya PDHI dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan para penerima manfaat? PDHI ini merupakan sebuah Yayasan besar yang memiliki banyak jama'ah di daerah Yogyakarta, sehingga memiliki banyak pengurus dengan ketrampilan para anggota jama'ah PDHI. Hal inilah yang di manfaatkan oleh pihak Yayasan PDHI. Dengan SDM yang baik ini mampu mengelola SDA yang ada sesuai keadaan masyarakatnya hingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat baik di bidang perekonomian ataupun sosial.</p>

	<p>8. Apakah PDHI turut melibatkan penerima manfaat untuk menyusun dan melaksanakan sebuah program pemberdayaan? Dalam proses menyusun dan melaksanakan sebuah program pemberdayaan tentu saja penerima manfaat ikut di libatkan, karena dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini merupakan pemberdayaan yang dilaksanakan atas dasar keluhan yang dirasakan oleh pihak masyarakat kemudian di bahas secara bersama dan di berdayakan melalui dukungan pihak Yayasan PDHI. Berupa support materialistic ataupun non materialistic.</p> <p>9. Apakah penerima manfaat diberi kesempatan untuk mengakses permodalan usaha? Bagaimana prosesnya? Setahu saya Yayasan PDHI ini kan lebih fokus pada kegiatan sosial, jadi untuk penerima manfaat tidak akan di berikan akses permodalan usaha secara cuma – cuma berupa dana murni, kecuali melalui kegiatan dakwah yang nantinya aka nada infaq yang dikumpulkan untuk beberapa program yang membutuhkan dana.</p>
Akuntabilitas	<p>10. Apakah perkembangan pelaksanaan program pemberdayaan dilaporkan kepada para pemangku kepentingan? Bagaimana prosesnya? Untuk semu lembaga atau mitra di bawah naungan PDHI ini memiliki kewajiban untuk melaporkan semua kegiatan ataupun administrasi kepada pihak PDHI pada setiap tahunnya. Hanya saja belum semua mitra atau lembaga di bawah naungan Yayasan PDHI ini melaksanakan hal tersebut, dengan alasan beberapa keterbatasan seperti kantor PDHI yang jauh dan beberapa hal lainnya.</p> <p>11. Apakah PDHI membuat laporan keuangan yang memadai terkait program pemberdayaan dan bagaimana prosesnya? Untuk Yayasan PDHI sendiri belum membuat laporan keuangan rutin terkait dengan program pemberdayaannya, namun akan selalu ada laporan rutin setiap tahunnya yang seperti laporan kegiatan dan beberapa dana yang di dapatkan ketika proses pelaksanaan program dakwah yang dilaksanakan oleh</p>

	Yayasan PDHI di beberapa masjid ataupun pesantren yang di naungi oleh Yayasan PDHI.
Peningkatan kapasitas organisasi lokal	<p>12. Bagaimana upaya yang dilakukan PDHI agar masyarakat yang diberdayakan memiliki organisasi yang kuat dan saling mendukung? Membiasakan membangun silaturahmi antar jama'ah Yayasan PDHI melalui kegiatan yang di selenggarakan oleh Yayasan.</p> <p>13. Bagaimana langkah yang diupayakan oleh PDHI agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan? Hal ini diawali dengan adanya musyawarah dalam proses pelaksanaan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan PDHI di beberapa tempat yang di naunginya, kemudian membahas apa saja keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian hal inilah yang di tampung oleh pihak Yayasan PDHI kemudian di bahas secara Bersama dalam proses penyelesaian masalahnya.</p>

II. Islamic Social Enterprise

ASPEK	PERTANYAAN
Pertanyaan Umum	<p>1. Kapan Yayasan PDHI ini didirikan? Jadi Yayasan PDHI ini dibuat dan disetujui bersama serombongan jama'ah Haji di Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 Miladiyah</p> <p>2. Apa latar belakang Yayasan PDHI ? Awalnya para Jama'ah Haji dari Yogyakarta , khususnya dari Kabupaten Bantul, melihat suasana yang kurang menggembirakan , yang meliputi umat Islam di Tanah Air Indonesia, dengan adanya perpecahan partai, khilaf <i>furu'iyah</i> diantara Zu'amma'ul Muslimin dan penonjolan kembali masalah-masalah khilafiyah yang menyebabkan timbulnya golongan-golongan bahkan terkadang terjadi clash di antara sesama Ummat Islam. Kemudian di Masjidil Haram Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 H bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 M , ditanda tangani IKRAR BERSAMA , bahwa para jama'ah haji setelah</p>

	<p>kembali ke tanah air , menghimpunkan diri dalam satu wadah yang diberi nama : PERSAUDARAAN DJAMA'AH HADJI INDONESIA disingkat PDHI, berkedudukan pusat di Yogyakarta.</p>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Apa tujuan didirikan Yayasan PDHI ? <ol style="list-style-type: none"> a. Memelihara hasil ibadah haji yang mabrur serta memperluas kemabruran tersebut kedalam masyarakat. b. Mengamalkan kemanfaatan yang terdapat dari ibadah haji dan sekitarnya. c. Membangun rasa wajib beribadah haji bagi pemeluk agama islam. d. Membimbing para calon haji kearah haji mabrur. 4. Apa yang menjadi nilai-nilai yang mendasari pendirian Yayasan PDHI ? <ol style="list-style-type: none"> a. Memelihara Ukhuwah Islamiyah b. Ikhtiyar mencapai haji mabrur c. Memanfaatkan kemabruran ibadah haji dalam masyarakat d. Menggerakkan tholabul 'ilmi dan 'amal e. Mempelopori gotongroyong dan berdana untuk beramal jariyah f. Tidak mencampuri soal-soal politik 5. Apakah hasil yang diharapkan dari pendirian Yayasan PDHI ? <p>Harapan besar dari pendirian Yayasan PDHI ini mampu mewujudkan generasi haji yang mabrur dan berkelanjutan serta mampu mewujudkan segala nilai – nilai yang sudah di bangun oleh pihak Yayasan PDHI.</p> 6. Apa langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan Yayasan PDHI ? <ol style="list-style-type: none"> a. Memupuk Ukhuwah Islamiyah , tasamuh dan gotong royong di dalam masyarakat b. Membangun dan memberikan bantuan pembangunan tempat peribadatan dan kemasyarakatan serta amal jariyah yang lainnya c. Mengadakan kunjungan silaturahmi kepada calon haji dan baru kembali dari ibadah haji d. Mengadakan pertemuan, ceramah, pengajian dan sebagainya, untuk menambah ilmu dan amal

	<p>e. Segala usaha yang sah dan halal guna tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas.</p>
Sumber dana	<p>7. Darimana sumber dana utama pendirian Yayasan PDHI ? Dana donasi, seperti infaq dari setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak Yayasan PDHI, atau misalkan donasi rutin dari salah satu pengurus Yayasan PDHI dan beberapa lembaga atau mitra yang berprofit seperti BMT</p> <p>8. Bagaimana perbedaan pendayagunaan dana infak, wakaf, dan hibah yang diterima Yayasan dalam kaitannya pendirian dan pengembangan Yayasan PDHI ? Untuk dana infaq yang di dapatkan dari kegiatan pengajian yang di adakan oleh pihak Yayasan biasanya langsung di distribusikan kepada mitra atau lembaga yang membutuhkan dan untuk wakaf biasanya dilihat dari akad serta keadaan di lingkungan tersebut. Kebutuhan atau SDA apa yang bisa di kelola oleh pihak Yayasan PDHI.</p> <p>9. Bagaimanakah saat pendirian Yayasan PDHI mendapatkan persetujuan dari jamaah dan pemerintah ? Tentu saja, karena Yayasan PDHI in ikan memang berdiri atas keresahan para jama'ah Haji asal Yogyakarta lebih tepatnya di daerah Bantul sepulangnya Haji bertepatan pada tanggal 17 Syawal 1371 atau tanggal 22 Juni 1952 Miladiyah</p> <p>10. Bagaimana Rencana pengembangan Yayasan PDHI ke depan ? Kalau saat ini sudah banyak program – program yan di bahas namun masih dalam proses bertahap, mengingat dari pihak Yayasan PDHI juga membutuhkan dana dalam mensuport segala kegiatan sehingga hal ini tidak bisa dilaksanakan secara instan tapi harus bertahap.</p>
Aktivitas	<p>11. Apa saja usaha yang dijalankan oleh Yayasan PDHI ? a. Gedung PDHI “SASONO WORO “</p>

	<p>b. Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra/Putri di Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman dan Tegalyoso, Siti mulyo, Piyungan , Bantul.</p> <p>c. MTS di Girikarto, Panggang,GK</p> <p>d. RSIY PDHI di Cupuwatu, Kalasan.</p> <p>e. Raudhatul Athfal Islam di Wirokerten dan TK Ibnul Qoyyim</p> <p>f. Pondok Hafidhu Dhu'afa di Girikarto,Panggang,GK</p> <p>g. Koperasi Serba Usaha Syariah – BMT PDHI</p> <p>h. IC di Balong, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman.</p> <p>i. IC di Playen , Gunung Kidul.</p> <p>j. Panti Asuhan HJ.SARWATI-PDHI di Margoluwih, Seyegan, Sleman.</p> <p>k. Tempat Pemakaman Bukan Umum /Makam Haji di Piyungan.</p> <p>l. Klinik Pratama –PDHI di Wonosari.</p> <p>Siapa yang menjadi pengelola Yayasan PDHI ? Masyarakat yang ingin mengabdikan di PDHI dengan syarat sudah Haji atau Umroh.</p> <p>12. Bagaimana jika Yayasan PDHI mengalami kerugian dan tanggung jawabnya terhadap jamaah ? Sepertinya untuk masalah ini tidak akan dialami oleh Yayasan PDHI mengingat karena Yayasan ini merupakan Yayasan non profit.</p>
Pendapatan	<p>13. Berapa pendapatan yang diperoleh Yayasan PDHI ? Setahu saya tidak ada pendapatan rutinnya untuk Yayasan PDHI</p> <p>14. Bagaimana laba/rugi yang dialami Yayasan PDHI selama ini ? Tidak ada Laba Rugi</p> <p>15. Bagaimana kontribusi Yayasan PDHI terhadap aktivitas program-program yang didirikannya ? Kalau bantuan mungkin tidak langsung berupa materi nyata seperti uang, lebih terhadap sesuatu yang bisa dikembangkan dan keberlangsungan aktivitas program yang ada. Seperti mengadakan kegiatan pengajian dengan pengumpulan infaq melalui kegiatan tersebut yang keuangannya langsung di distribusikan secara</p>

	<p>langsung. Bisa dikatakan ini bukan sebuah keuntungan ya tapi pendapatan.</p> <p>16. Untuk apa saja keuntungan dari Yayasan PDHI terhadap program – program yang didirikan ? Setahu saya Yayasan PDHI ini tidak memiliki keuntungan, keuntungan untuk mitranya mungkin bisa berupa kenalan dan relasi yang banyak sehingga mampu menjadi donator di beberapa mitra atau lembaga sosial milik Yayasan PDHI.</p> <p>17. Bagaimana keuntungan Yayasan PDHI diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha lain ? Investasi yang di dapatkan Yayasan PDHI untuk pengembangan usahanya berupa relasi yang luas dan jama'ah yang begitu banyak.</p>
--	--

c. Narasumber III

Tanggal dan Waktu Wawancara : Kamis, 19 Januari 2022
Tempat : Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati
PDHI Yogyakarta

1. Identitas Informan

Nama : Heri Setiawan
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 46
Jabatan : Kepala Panti Asuhan LKAK Hj.
Sarwati
Pendidikan Terakhir : SLTA
Asal Daerah : Klaci I, Margoluwih, Kec. Seyegan,
Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55561

2. Daftar Pertanyaan

I. Pemberdayaan

ASPEK	PERTANYAAN
Informasi Umum	1. Apa tujuan program pemberdayaan di PDHI?

	<p>Tujuan utama adanya pemberdayaan masyarakat pada Yayasan PDHI ini untuk memper erat talisilaturahmi anatar jama'ah.</p> <p>2. Bagaimana sejarah program? Dari beberapa program yang di bawah nauangan Yayasan PDHI ini cukup banyak ya, dan berdirinya pun bertahap. Jadi kalau untuk sejarah pastinya secara keseluruhan belum begitu mengetahui, tapi kalau yang saya ketahui bahwa hampir semua program yang didirikan oleh Yayasan PDHI ini didirikan atas dasar kebutuhan dan keluhan masyarakat yang kemudian di kembangkan serta di naungi oleh Yayasan PDHI sehingga memiliki impect positif bagi masyarakat baik pada program berprofit ataupun non profit”</p> <p>3. Siapa dan berapa penerima manfaat program pemberdayaan? Jama'ah PDHI yang membutuhkan namun dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Seperti pembuatan masjid di beberapa tempat, pondok pesantren panti asuhan ini dll.</p>
Akses terhadap Informasi	<p>4. Apakah penerima manfaat diberikan informasi yang lengkap terkait program pemberdayaan? Tentu saja kami selaku salah satu penerima manfaat juga memiliki akses untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PDHI di berbagai tempat dan dari proses inilah kami menmperoleh banyak informasi.</p> <p>5. Dengan adanya program pemberdayaan, apakah penerima manfaat lebih giat menggali informasi dari berbagai sumber? Jelas, hal ini juga menjadikan sebuah amal jariyah serta terjalinnya silaturahmi antar jama'ah PDHI, hal ini juga dilakukan dalam proses dakwah kepengurusan PDHI terhadap jama'ahnya.</p> <p>6. Bagaimana upaya PDHI dalam memperkenalkan teknologi informasi kepada penerima manfaat? Mungkin saat ini applikasi yang baru digunakan oleh Yayasan PDHI ini hanya WA, hal ini mampu mempermudah masyarakat dalam menjalin komunikasi antar jama'ah dan memperoleh informasi terkait dengan kegiatan PDHI.</p>

Inklusivitas	<p>7. Bagaimana upaya PDHI dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan para penerima manfaat? Pemanfaatan relasi ataupun ketrampilan para anggota jama'ah PDHI sehingga mampu membantu proses pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI, baik itu di dunia ekonomi ataupun sosial</p> <p>8. Apakah PDHI turut melibatkan penerima manfaat untuk menyusun dan melaksanakan sebuah program pemberdayaan ? Iya betul, semua hal yang akan di berikan ke pada penerima manfaat maka juga ikut andil dalam proses penyusunan dan juga pelaksanaannya.</p> <p>9. Apakah penerima manfaat diberi kesempatan untuk mengakses permodalan usaha? Bagaimana prosesnya? Sepengetahuan saya sampai saat ini Yayasan PDHI ini tidak akan memberikan modal secara tunai, biasanya melalui sebuah kegiatan.</p>
Akuntabilitas	<p>10. Apakah perkembangan pelaksanaan program pemberdayaan dilaporkan kepada para pemangku kepentingan? Bagaimana prosesnya? Sebenarnya ada, hanya saja tidak terlaksana dengan baik dan rutin.</p> <p>11. Apakah PDHI membuat laporan keuangan yang memadai terkait program pemberdayaan dan bagaimana prosesnya? Membuat laporan keuangan, hanya saja seperti laporan tahunan biasa yang masih secara tradisional, seperti laporan pertanggung jawaban program selama 5 tahun.</p>
Peningkatan kapasitas organisasi lokal	<p>12. Bagaimana upaya yang dilakukan PDHI agar masyarakat yang diberdayakan memiliki organisasi yang kuat dan saling mendukung? Menumbuhkan rasa saling menghormati melalui kegiatan yang diadakan pada setiap mitra atau lembaganya untuk saling menghadiri agar terjalin silaturahmi yang baik.</p> <p>13. Bagaimana langkah yang diupayakan oleh PDHI agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan?</p>

	Biasanya di adakan ketika prosesi atau setelah kegiatan pengajian rutin di tempat seperti masjid yg di naungi oleh Yayasan PDHI, membahas tentang bagaimana keadaan masyarakat baik dari sisi ekonomi ataupun sosialnya.
--	--

II. *Islamic Social Enterprise*

ASPEK	PERTANYAAN
Pertanyaan Umum	<p>1. Kapan Yayasan PDHI ini didirikan? Pada tanggal 17 Syawal 1371 H bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 M Yayasan PDHI ini resmi didirikan.</p> <p>2. Apa latar belakang pendirian Yayasan PDHI ? Sepengetahuan saya : Pertama adanya perpecahan partai, khilaf <i>furu'iyah</i> diantara Zu'amma'ul Muslimin dan penonjolan kembali masalah-masalah khilafiyah yang menyebabkan timbulnya golongan-golongan bahkan terkadang terjadi clash di antara sesama Ummat Islam Kedua pelaksanaan musim Haji pada tahun 1371 H bertepatan dengan tahun 1952 M, yang memiliki tujuan yang sama yaitu beragama Islam, satu langkah Ibadah, dan mencari ridho Allah SWT. Ke tiga, saat itulah Di Masjidil Haram Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 H bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 M, jama'ah Haji ini kembali ke Indonesia saat itu juga berdirilah Yayasan PDHI.</p>
Tujuan	<p>3. Apa tujuan didirikan Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Memelihara hasil ibadah haji yang mabrur Mengamalkan kemanfaatan yang terdapat dari ibadah haji Membangun rasa wajib beribadah haji bagi pemeluk agama islam. Membimbing para calon haji kearah haji mabrur. <p>4. Apa yang menjadi nilai-nilai yang mendasari pendirian Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Memelihara Ukhuwah Islamiyah secara luas

	<ul style="list-style-type: none"> b. Ikhtiyar mencapai haji mabrur c. Memanfaatkan kemabruran ibadah haji dalam masyarakat d. Tholabul ‘ilmi e. Menitik beratkan masalah masalah kerohanian. <p>5. Apakah hasil yang diharapkan dari pendirian Yayasan PDHI ? Hasil yang di harapkan dengan adanya pendirian Yayasan PDHI ini yaitu tercapainya ikrar yang sudah di sepakati sejak awal berdirinya Yayasan PDHI ini oleh para jama’ah Haji dari Yogyakarta terutama Bantul.</p> <p>6. Apa langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan Yayasan PDHI ?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memupuk Ukhuwah Islamiyah , tasamuh dan gotong royong di dalam masyarakat b. Mengadakan kunjungan silaturahmi kepada calon haji dan baru kembali dari ibadah haji c. Mengadakan pertemuan, ceramah, pengajian dan sebagainya, untuk menambah ilmu dan amal
Sumber dana	<p>7. Darimana sumber dana utama pendirian Yayasan PDHI ? Kalau selama ini itu dana dari donator oleh pengurus Yayasan PDHI dan beberapa infaq dari kegiatan pengajian rutin Yayasan PDHI.</p> <p>8. Bagaimana perbedaan pendayagunaan dana infak, wakaf, dan hibah yang diterima Yayasan dalam kaitannya pendirian dan pengembangan Yayasan PDHI ? Biasanya kalau untuk infaq setahu saya langsung di berikan kepada mitra atau lembaga yang membutuhkan, kalua untuk wakaf biasanya di kelola oleh pihak Yayasan secara bertahapa.</p> <p>9. Bagaimanakah saat pendirian Yayasan PDHI mendapatkan persetujuan dari jamaah dan pemerintah ? Iya itu pasti, karena adanya Yayasan PDHI ini berdasarkan tujuan dan keresahan bersama yang dirasakan oleh para Jama’ah Haji di DI Yogyakarta.</p>

	<p>10. Bagaimana Rencana pengembangan Yayasan PDHI ke depan ?</p> <p>Ini sempat di bahas di rapat tahunan, hanya saja saya kurang begitu mengerti untuk kedepannya bagaimana progress kedepannya</p>
Aktivitas	<p>11. Apa saja usaha yang dijalankan oleh Yayasan PDHI ?</p> <p>Usaha di bidang Ekonomi itu ada BMT PDHI, Gedung PDHI</p> <p>Usaha Di bidang Sosial ada (1) RSIY PDHI di Cupuwatu, Kalasan. (2) Panti Asuhan HJ.SARWATI-PDHI di Margoluwih, Seyegan, Sleman. (3) Klinik Pratama –PDHI di Wonosari.</p> <p>Siapa yang menjadi pengelola Yayasan PDHI ?</p> <p>Masyarakat yang ingin mengabdikan di PDHI dengan syarat sudah Haji atau Umroh</p> <p>12. Bagaimana jika Yayasan PDHI mengalami kerugian dan tanggung jawabnya terhadap jamaah ?</p> <p>Hal ini mungkin tidak akan terjadi oleh Yayasan PDHI karena Yayasan ini merupakan sebuah Yayasan yang cukup lama dengan relasi yang cukup banyak.</p>
Pendapatan	<p>13. Berapa pendapatan yang diperoleh Yayasan PDHI ?</p> <p>Sepengetahuan saya Yayasan tidak memiliki pendapatan sama sekali kalau adapun untuk keperluan operasional dan dakwah.</p> <p>14. Bagaimana laba/rugi yang dialami Yayasan PDHI selama ini ?</p> <p>Setahu sampai saat ini tidak ada.</p> <p>15. Bagaimana kontribusi Yayasan PDHI terhadap aktivitas program-program yang didirikannya ?</p> <p>Mungkin kontribusi Yayasan PDHI terhadap segala program – programnya lebih pada sebuah aktivitas yang memberikan dampak positif demi perkembangan programnya dan impeknya berkelanjutan</p> <p>16. Untuk apa saja keuntungan dari Yayasan PDHI terhadap program – program yang didirikan ?</p> <p>Yayasan PDHI ini tidak memiliki keuntungan</p>

	<p>17. Bagaimana keuntungan Yayasan PDHI diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha lain ?</p> <p>Saya tidak terlalu mengetahui hal ini, yang pasti investasi terbesar Yayasan PDHI ini ya untuk akhirat.</p>
--	--

d. Narasumber IV

Tanggal dan Waktu Wawancara : Jum'at, 27 Januari 2022

Tempat : Islamic Center PDHI, Playen

Gunung Kidul

1. Identitas Informan

Nama : Ustadzah Tiktik Sulastri

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 44

Jabatan : Kepala Sekolah TK Al-Kahfi

Pendidikan Terakhir : SMA (D2)

Asal Daerah : Bekasi

2. Daftar Pertanyaan

I. Pemberdayaan

ASPEK	PERTANYAAN
Informasi Umum	<p>1. Apa tujuan program pemberdayaan di PDHI?</p> <p>Mewujudkan harapan dan cita – cita salah satu pengurus Yayasan PDHI dalam melanggengkan kegiatan social ini sebagai amal jariyah di akhirat.</p> <p>2. Bagaimana sejarah program?</p> <p>Kalau untuk pemberdayaan masyarakat yang didirikan oleh Yayasan PDHI ini sebenarnya sejarahnya berbeda – beda ya sehingga saya kurang mengetahui bagaimana details nya, namun yang saya ketahui terkait dengan proses pendirian dari <i>Islamic Center</i> Playen Gunung Kidul ini. Bermula dari hanya sekedar TPQ yang di mulai di rumah saya kemudian berpindah ke musolla masyarakat sampai adanya iuran masyarakat untuk membangun masjid di sini secara dikit demi sedikit hingga akhirnya bisa sampai seperti ini. Saat ini di tanah kosong milik Yayasan PDHI ini menjadi berubah dan menjadi pusat keagamaan dan Pendidikan sesuai dengan harapan pihak Yayasan PDHI walaupun belum 100% sesuai harapan.</p>

	<p>3. Siapa dan berapa penerima manfaat program pemberdayaan? Seluruh masyarakat yang membutuhkan</p>
Akses terhadap Informasi	<p>4. Apakah penerima manfaat diberikan informasi yang lengkap terkait program pemberdayaan? Kalau itu jelas, karena program yang akan di selenggarakan pasti butuh koordinasi dari pihak Yayasan PDHI.</p> <p>5. Dengan adanya program pemberdayaan, apakah penerima manfaat lebih giat menggali informasi dari berbagai sumber? Iya betul, karena hal ini perlu adanya pembinaan dan juga diskusi dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat.</p> <p>6. Bagaimana upaya PDHI dalam memperkenalkan teknologi informasi kepada penerima manfaat? Upaya yang dilakukan PDHI ini masih terbilang minim karena teknologi yang digunakan saat ini masih berupa Aplikasi WA, namun hal ini mampu mempermudah segala koordinasi antar mitra, jama'ah dan juga Yayasan PDHI terkait dengan segala program kegiatan yang diselenggarakan.</p>
Inklusivitas	<p>7. Bagaimana upaya PDHI dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan para penerima manfaat? Melalui kegiatan selapanan atau pengajian rutin yang di adakan oleh Yayasan PDHI diberbagai tempat binaan yang dinaungi oleh Yayasan PDHI ini memberikan peluang baik bagi masyarakat dalam mengeluarkan anspirasinya. Hal inilah yang membuat pihak Yayasan mengetahui hal apa yang perlu di perbaiki dan di tingkatkan. Hal inilah yang membuat pihak Yayasan perlu adanya pembinaan untuk masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.</p> <p>8. Apakah PDHI turut melibatkan penerima manfaat untuk menyusun dan melaksanakan sebuah program pemberdayaan? Tentu saja, untuk penerima manfaat akan andil dalam proses penyusunan dan pelaksanaan programnya.</p>

	<p>9. Apakah penerima manfaat diberi kesempatan untuk mengakses permodalan usaha? Bagaimana prosesnya? Kalau setahu saya kok ini jarang sekali dilaksanakan oleh semua mitra atau lembaga yang di bawah naungan Yayasan PDHI.</p>
Akuntabilitas	<p>10. Apakah perkembangan pelaksanaan program pemberdayaan dilaporkan kepada para pemangku kepentingan? Bagaimana prosesnya? Seharusnya dilaporkan, hanya saja tidak secara rutin dan mungkin cukup dengan beberapa data dan juga niat untuk bersilaturahmi kepada pihak Yayasan PDHI.</p> <p>11. Apakah PDHI membuat laporan keuangan yang memadai terkait program pemberdayaan dan bagaimana prosesnya? Membuat laporan keuangan, hanya saja tidak selalu di laporkan kepada kepada semua lembaga atau mitra.</p>
Peningkatan kapasitas organisasi lokal	<p>12. Bagaimana upaya yang dilakukan PDHI agar masyarakat yang diberdayakan memiliki organisasi yang kuat dan saling mendukung? Meningkatkan rasa kekeluargaan antar mitra atau lembaga untuk saling bersilaturahmi.</p> <p>13. Bagaimana langkah yang diupayakan oleh PDHI agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan? Melalui kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI kemudian di sela – sela kegiatan tersebut di buka sebuah forum untuk slaing berdiskusi membahas hal – hal yang perlu di perbaiki baik disisi ekonomi ataupun sosial. Hal inilah yang membuat tidak adanya jarak antara jama'ah PDHI dengan pihak Yayasan PDHI.</p>

II. *Islamic Social Enterprise*

ASPEK	PERTANYAAN
Pertanyaan Umum	1. Kapan Yayasan PDHI ini didirikan?

	<p>Tanggal 22 Juni 1952 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1371 H.</p> <p>2. Apa latar belakang pendirian Yayasan PDHI ? Saat itu Jama'ah Haji dari Yogyakarta , khususnya dari Kabupaten Bantul, melihat suasana yang kurang menyenangkan di Indonesia, dengan adanya perpecahan partai, khilaf Muslimin dan penonjolan kembali masalah-masalah khilafiyah yang menyebabkan timbulnya golongan-golongan bahkan terkadang terjadi perselisihan di antara sesama Ummat Islam. Pada tahun 1371 Hijriyah atau tahun 1952 Masehi di musim Haji , dengan segala perbedaan namun satu agama : Islam, satu langkah Ibadah, satu tujuan : mencari ridho Allah SWT. Atas dasar ke gelisahan serta ke khawatiran dengan tujuan yang sama di bentuklah Yayasan PDHI. Setelah ke pulangan dari tanah suci pada tanggal 17 Syawal 1371 H bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 M. Jama'ah Haji ini berikrar bersama dan beridirilah Yayasan PDHI.</p>
Tujuan	<p>3. Apa tujuan didirikan Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Memelihara hasil ibadah haji Mengamalkan kemanfaatan yang terdapat dari ibadah haji Membimbing para calon haji kearah haji mabrur. <p>4. Apa yang menjadi nilai-nilai yang mendasari pendirian Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Memelihara Ukhuwah Islamiyah Ikhtiyar mencapai haji mabrur Memanfaatkan kemabruran ibadah haji Menggerakkan tholabul 'ilmi dan 'amal Mementingkan permasalahan kerohanian. <p>5. Apakah hasil yang diharapkan dari pendirian Yayasan PDHI ?</p> <p>Saya sebagai yang ikut berjuang pada naungan Yayasan PDHI menurut saya hasil yang ingin di dapatkan oleh Yayasan PDHI ini berupa sebuah kemandirian dalam sisi perekonomian dan sosial namun di iringi dengan dakwah serta memupuknya dengan ukuwah islamiyah.</p>

	<p>6. Apa langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Memupuk Ukhuwah Islamiyah , tasamuh dan gotong royong di dalam masyarakat Mengadakan pertemuan, ceramah, pengajian dan sebagainya, untuk menambah ilmu dan amal Segala usaha yang sah dan halal guna tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas.
Sumber dana	<p>7. Darimana sumber dana utama pendirian Yayasan PDHI ? Dana donasi dari jama'ah dan pengurus Yayasan PDHI dengan tujuan bersama untuk kepentingan umat.</p> <p>8. Bagaimana perbedaan pendayagunaan dana infak, wakaf, dan hibah yang diterima Yayasan dalam kaitannya pendirian dan pengembangan Yayasan PDHI ? Selama ini yang saya tahu dana infaq yang di peroleh dari kegiatan pengajian Yayasan PDHI ini langsung di distribusikan kepada pihak mitra atau lembaga yang membutuhkan.</p> <p>9. Apakah saat pendirian Yayasan PDHI, mendapat persetujuan dari jamaah dan pemerintah ? Tentu saja adanya Yayasan PDHI ini berdasarkan persetujuan jama'ah dan pemerintah, yang bermula dari keresahan Bersama yang dirasakan oleh para Jama'ah Haji di DI Yogyakarta. Sejak saat itulah Yayasan PDHI ini didirikan oleh Jama'ah Haji pada tahun 1952 M.</p> <p>10. Bagaimana Rencana pengembangan Yayasan PDHI ke depan ? Kalua untuk permasalahan ini saya kurang tahu</p>
Aktivitas	<p>11. Apa saja usaha yang dijalankan oleh Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Gedung PDHI Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra/Putri di Bantul. Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI di Kalasan. Pondok Hafidhu Dhu'afa di Girikarto,Panggang,GK BMT PDHI

	<p>f. Islamic Center di Playen , Gunung Kidul. g. Panti Asuhan HJ.SARWATI-PDHI di Sleman. h. Klinik Pratama – PDHI di Wonosari.</p> <p>Siapa yang menjadi pengelola Yayasan PDHI ? Masyarakat yang ingin mengabdikan di PDHI dengan syarat sudah Haji atau Umroh</p> <p>12. Bagaimana jika Yayasan PDHI mengalami kerugian dan tanggung jawabnya terhadap jamaah ? Yayasan PDHI insyallah tidak akan mengalami kerugian karena memang dari awal berdirinya sudah berkembang secara mandiri melalui peran pengurus – pengurus Yayasan bukan adanya keuntungan yang didapatkan berupa profit yayasan.</p>
Pendapatan	<p>13. Berapa pendapatan yang diperoleh Yayasan PDHI ? Bisa dikatakan bahwa Yayasan PDHI ini tidak memiliki pendapatan, meskipun ada dana yang masuk di Yayasan PDHI semua digunakan untuk keperluan Dakwah dan operasional Yayasan PDHI.</p> <p>14. Bagaimana laba/rugi yang dialami Yayasan PDHI selama ini ? Tidak ada Laba Rugi</p> <p>15. Bagaimana kontribusi Yayasan PDHI terhadap aktivitas program-program yang didirikannya ? Memberikan bantuan hanya saja bukan berupa materi nyata seperti uang, lebih terhadap sesuatu yang bisa dikembangkan dan keberlangsungan aktivitas program yang ada. Seperti dampak untuk <i>Islamic Centre Playen</i> ini sendiri dengan adanya nama Yayasan PDHI mampu memberikan dampak positif dan memperkuat branding di masyarakat terkait dengan segala program dan aktivitas yang dilakukan.</p> <p>16. Untuk apa saja keuntungan dari Yayasan PDHI terhadap program – program yang didirikan ? Yayasan PDHI ini tidak memiliki keuntungan nyata seperti materi keuntungan ini lebih pada relasi serta jama'ah yang begitu banyak.</p>

	17. Bagaimana keuntungan Yayasan PDHI diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha lain ? Kalau menurut saya investasi terbesar Yayasan PDHI ini berupa pahala amal jariyah.
--	--

e. Narasumber V

Tanggal dan Waktu Wawancara : Ahad, 29 Januari 2022

Tempat : PPIQ Putri, Gunung Kidul

1. Identitas Informan

Nama : Atik Maliha Masruroh. S.Pd.M.Pd.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 50

Jabatan : Kepala Direktur

Pendidikan Terakhir : S2

Asal Daerah : Jl. Gandu, RT.05/RW.08, Gandu,
Sendangtirto, Kec. Berbah,
Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55573

2. Daftar Pertanyaan

I. Pemberdayaan

ASPEK	PERTANYAAN
Informasi Umum	<p>1. Apa tujuan program pemberdayaan di PDHI? Melanggengkan harapan para jama'ah haji yaitu pendiri Yayasan PDHI terdahulu untuk membuat islam ini bisa terasa damai meskipun dengan banyaknya perbedaan.</p> <p>2. Bagaimana sejarah program? Sejarah program pemberdayaan masyarakat pada Yayasan PDHI ini cukup Panjang ya, dari yang saya tahu berawal dari pengurus Yayasan PDHI yang terdahulu untuk melanggengkan ibadah Hajinya sebagai Haji yang mabrur sehingga membuat banyak program melalui proses dakwah yang dilakukan oleh</p>

	<p>pihak Yayasan PDHI, hal ini sekaligus melihat keadaan jama'ah melalui pertemuan rutin di berbagai tempat yang di naungi oleh pihak Yayasan, dari sinilah pihak Yayasan mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk mensejahterakan umat baik dari sisi sosial ataupun ekonomi.</p> <p>3. Siapa dan berapa penerima manfaat program pemberdayaan? Seluruh masyarakat</p>
Akses terhadap Informasi	<p>4. Apakah penerima manfaat diberikan informasi yang lengkap terkait program pemberdayaan? Tentu saja di berikan informasi lengkap, karena dalam proses penyelenggaraan kegiatan akan di pantau dan di bimbing oleh pihak Yayasan PDHI.</p> <p>5. Dengan adanya program pemberdayaan, apakah penerima manfaat lebih giat menggali informasi dari berbagai sumber? Menurut saya, harusnya memang selaku penerima manfaat lebih giat dalam mencari informasi apapun itu bentuknya, baik dari sisi informasi pihak internal Yayasan PDHI ataupun dari pihak eksternal karena hal ini akan sangat mempengaruhi proses berjalannya program – program di PDHI.</p> <p>6. Bagaimana upaya PDHI dalam memperkenalkan teknologi informasi kepada penerima manfaat? Alhamdulillah, dengan adanya teknologi saat ini mampu mempermudah segala aktivitas Yayasan PDHI. Seperti dengan adanya HP di lengkapi dengan fitur WA mampu mempermudah koordinasi atau penyampaian informasi terkait dengan kegiatan yang akan di selenggarakan oleh pihak Yayasan PDHI. Sehingga kegiatan dakwah bisa di ikuti oleh banyak jama'ah yang bahkan di luar kota Yogyakarta.</p>
Inklusivitas	<p>7. Bagaimana upaya PDHI dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan para penerima manfaat? Melakukan pembinaan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Informasi atau data yang di dapatkan melalui</p>

	<p>kegiatan pengajian rutin yang diadakan oleh pihak Yayasan PDHI.</p> <p>8. Apakah PDHI turut melibatkan penerima manfaat untuk menyusun dan melaksanakan sebuah program pemberdayaan? Tentu saja dalam proses ini Yayasan PDHI melibatkan penerima manfaat untuk Menyusun dan melaksanakan programnya, karena dalam hal ini masyarakat yang akan lebih mengerti bagaimana keadaan masyarakat yang ada di daerah tersebut.</p> <p>9. Apakah penerima manfaat diberi kesempatan untuk mengakses permodalan usaha? Bagaimana prosesnya? Permodalan di awal biasanya di bebaskan pada prose penghimpunan dana donasi seperti infa yang dikumpulkan saat proses dakwah ataupun kajian di masjid – masjid ataupun tempat yang di naungi oleh pihak Yayasan PDHI. Di beberapa mitra atau lembaga sendiri lebih sering mengumpulkan dana donasi secara mandiri dari pihak masyarakat.</p>
Akuntabilitas	<p>10. Apakah perkembangan pelaksanaan program pemberdayaan dilaporkan kepada para pemangku kepentingan? Bagaimana prosesnya? Harusnya di laporkan</p> <p>11. Apakah PDHI membuat laporan keuangan yang memadai terkait program pemberdayaan dan bagaimana prosesnya? Setiap Lembaga atau mitra di bawah Yayasan PDHI memang diwajibkan membuat laporan keuangan tahunan. Namun, tidak selalu di publikasikan pada semua mitra dan Yayasan PDHI.</p>
Peningkatan kapasitas organisasi lokal	<p>12. Bagaimana upaya yang dilakukan PDHI agar masyarakat yang diberdayakan memiliki organisasi yang kuat dan saling mendukung? Menekankan mitra atau lembaga di bawah naungan Yayasan PDHI untuk selalu mengikut kegiatan yang di adakan oleh Yayasan.</p> <p>13. Bagaimana langkah yang diupayakan oleh PDHI agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan?</p>

	Membahas secara bersama permasalahan masyarakat yang di hadapi sehingga di temukan titik terangnya.
--	---

II. *Islamic Social Enterprise*

ASPEK	PERTANYAAN
Pertanyaan Umum	<p>1. Kapan Yayasan PDHI ini didirikan? Setahu saya dibuat dan disetujui di Makkah al Mukaromah oleh jama'ah Haji Yogyakarta saat itu, pada tanggal 17 Syawal 1371 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 Miladiyah</p> <p>2. Apa latar belakang pendirian Yayasan PDHI ? Di Awali dengan adanya perpecahan partai dan penonjolan kembali masalah-masalah khilafiyah yang menyebabkan timbulnya pertikaian di antara sesama Ummat Islam Kedua, pelaksanaan musim Haji pada tahun 1371 H bertepatan dengan tahun 1952 M, memiliki tujuan yang sama yaitu beragama Islam, satu langkah Ibadah, dan mencari ridho Allah SWT. Ke tiga, saat itulah di Masjidil Haram Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 H bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 M, jama'ah Haji ini kembali ke Indonesia terhimpun pada Yayasan PDHI.</p>
Tujuan	<p>3. Apa tujuan didirikan Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Memelihara hasil ibadah haji yang mabrur Mengamalkan kemanfaatan yang terdapat dari ibadah haji. Membangun rasa wajib beribadah haji bagi pemeluk agama islam. Membimbing para calon haji kearah haji mabrur. <p>4. Apa yang menjadi nilai-nilai yang mendasari pendirian Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Memelihara Ukhuwah Islamiyah secara luas Ikhtiyar mencapai haji mabrur Menggerakkan tholabul 'ilmi dan 'amal Tidak mencampuri soal-soal politik <p>5. Apakah hasil yang diharapkan dari pendirian Yayasan PDHI ?</p>

	<p>Sepengetahuan saya dengan melihat sejarah berdirinya Yayasan PDHI ini bisa di simpulkan bahwa harapan besar berdirinya Yayasan PDHI ini merupakan terwujudnya sebuah perdamaian antar umat mulis meskipun kita menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada tapi setidaknya tidak untuk saling menjatuhkan.</p> <p>6. Apa langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Memupuk Ukhuwah Islamiyah, tasamuh dan gotong royong di dalam masyarakat Membangun dan memberikan bantuan pembangunan tempat peribadatan dan kemasyarakatan Mengadakan pertemuan, ceramah, pengajian Segala usaha yang sah dan halal guna
Sumber dana	<p>7. Darimana sumber dana utama pendirian Yayasan PDHI ?</p> <p>Dana donasi dan dana dari pihak pengurus Yayasan PDHI dengan rasa kepemilikan dengan wujud rasa ukuwah Islamiyah agar tercapainya kemaslahatan untuk umat.</p> <p>8. Bagaimana perbedaan pendayagunaan dana infak, wakaf, dan hibah yang diterima Yayasan dalam kaitannya pendirian dan pengembangan Yayasan PDHI ?</p> <p>Untuk danainfaq dan hibah biasanya langsung di berikan kepada mitra atau lembaga yang membuthkan dana, sedangkan di kelola langsung oleh pihak Yayasan PDHI.</p> <p>9. Bagaimanakah saat pendirian Yayasan PDHI mendapatkan persetujuan dari jamaah dan pemerintah ?</p> <p>Iya memang harus ada persetujuan bersama.</p> <p>10. Bagaimana Rencana pengembangan Yayasan PDHI ke depan ?</p> <p>Sampai saat ini memang saya belum mengetahui bagaimana progress kedepannya, namun insyallah</p>

	Yayasan PDHI ini siap memberikan pelayanan terbaik untuk jama'ahnya.
Aktivitas	<p>11. Apa saja usaha yang dijalankan oleh Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Gedung PDHI “SASONO WORO “ Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra/Putri di Bantul. Madrasah Tsanawiyah di Gunung Kidul RSIY PDHI di Kalasan. RA Islam di Wirokerten dan TK Ibnul Qoyyim Pondok Hafidhu Dhu'afa di Girikarto,Panggang,GK IC di Playen , Gunung Kidul. Panti Asuhan HJ.SARWATI-PDHI di Margoluwih, Seyegan, Sleman. <p>Siapa yang menjadi pengelola Yayasan PDHI ? Masyarakat yang ingin mengabdikan diri di Yayasan PDHI secara sukarela dengan syarat sudah Haji atau Umroh</p> <p>12. Bagaimana jika Yayasan PDHI mengalami kerugian dan tanggung jawabnya terhadap jamaah ? Sepertinya ini tidak akan terjadi, karena jika dilihat kebangkrutan ini terjadi karena adanya keuntungan dalam sebuah lembaga atau perusahaan sedangkan Yayasan PDHI ini memang tidak memiliki sebuah keuntungan.</p>
Pendapatan	<p>13. Berapa pendapatan yang diperoleh Yayasan PDHI ? Sampai saat ini sih setahu saya tidak ada ya, karena Yayasan PDHI ini lebih fokus pada kegiatan sosial. Yayasan PDHI pun juga tidak meminta keuntungan dari setiap mitra atau lembaganya.</p> <p>14. Bagaimana laba/rugi yang dialami Yayasan PDHI selama ini ? Tidak ada laba rugi karena Yayasan PDHI merupakan Yayasan yang fokus dibidang sosial dan bukan ekonomi</p> <p>15. Bagaimana kontribusi Yayasan PDHI terhadap aktivitas program-program yang didirikannya ? Memberikan bantuan semaksimal mungkin hanya saja bukan berupa materi nyata seperti uang, lebih terhadap sesuatu yang bisa dikembangkan dan keberlangsungan aktivitas program yang ada. Seperti penyelenggaraan kegiatan kemudian konsumsinya</p>

	<p>atau air minumnya berasal dari PPIQ sehingga hal ini bisa menambah nilai keuangan di PPIQ, Keuntungan tersebut juga tidak masuk ke dalam keuangan Yayasan PDHI sama sekali. Hal inilah yang dimaksud bahwa PDHI ini tidak memberikan dana secara langsung tetapi melalui suatu kegiatan yang memberi dampak baik untuk mitra – mitra atau lembaganya.</p> <p>16. Untuk apa saja keuntungan dari Yayasan PDHI terhadap program – program yang didirikan ? Yayasan PDHI ini tidak memiliki keuntungan dan Yayasan PDHI ini juga tidak meminta keuntungan dari mitra atau lembaga yang dinaunginya.</p> <p>17. Bagaimana keuntungan Yayasan PDHI diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha lain ? Investasi berupa materi tidak ada</p>
--	---

f. Narasumber VI

Tanggal dan Waktu Wawancara : Kamis, 2 Februari 2023

Tempat : RA PDHI

1. Identitas Informan

Nama : Dian Rahmawati. S.Pd
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 44 Th
 Jabatan : Kepala RA PDHI
 Pendidikan Terakhir : S1
 Asal Daerah : Jawa Timur (Domisili Bantul)

2. Daftar Pertanyaan

I. Pemberdayaan

ASPEK	PERTANYAAN
Informasi Umum	<p>1. Apa tujuan program pemberdayaan di PDHI? ...Tujuan adanya pemberdayaa di masyarakat di Yayasan PDHI yang satahu itu yang ikhlas lilahita'ala demi kepentingan umat.</p> <p>2. Bagaimana sejarah program?</p>

	<p>Hal ini saya kurang begitu mengetahui karena disini saya baru sekitar 8 tahun bergabung dengan pihak Yayasan PDHI. Yang saya ketahui itu bahwa adanya pemberdayaan masyarakat ini didirikan atas dasar kemanusiaan dan demi kemaslahatn umat terutama jama'ah Yayasan PDHI. Justru yang saya ketahui itu proses pendirian RA PDHI ini</p> <p>3. Siapa dan berapa penerima manfaat program pemberdayaan? Masyarakat umum juga turut merasakan manfaat dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini.</p>
Akses terhadap Informasi	<p>4. Apakah penerima manfaat diberikan informasi yang lengkap terkait program pemberdayaan? Iya, Bahkan untuk memutuskan siapa yang akan di beri manfaat disampaikan dan diadakan rapat secara bersama – sama</p> <p>5. Dengan adanya program pemberdayaan, apakah penerima manfaat lebih giat menggali informasi dari berbagai sumber? Tentu saja, karena hal ini perlu adanya koordinasi dengan pihak Yayasan PDHI ataupun dari mitra yang lain, baik terkait dengan dana ataupun kegiatan yang akan di selenggarakan.</p> <p>6. Bagaimana upaya PDHI dalam memperkenalkan teknologi informasi kepada penerima manfaat? Adanya teknologi yang memadai saat ini bisa mempermudah segala akses kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Yayasan PDHI bisa berjalan dan di ikuti oleh banyak jama'ahnya.</p>
Inklusivitas	<p>7. Bagaimana upaya PDHI dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan para penerima manfaat? Melalui dakwah yang dilakukan dengan kegiatan pengajian rutin akan memberikan data bahwa apa saja permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga sekira itu berat maka akan di bahas secara bersama dan perlu dilaksanakan sebuah pembinaan untuk memajukan perekonomiannya serta standar sosialnya.</p>

	<p>8. Apakah PDHI turut melibatkan penerima manfaat untuk menyusun dan melaksanakan sebuah program pemberdayaan? Iya benar, penerima manfaat akan ikut dalam proses menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan .</p> <p>9. Apakah penerima manfaat diberi kesempatan untuk mengakses permodalan usaha? Bagaimana prosesnya? Setahu saya akses permodalan bagi penerima manfaat ini tidak ada di Yayasan PDHI.</p>
Akuntabilitas	<p>10. Apakah perkembangan pelaksanaan program pemberdayaan dilaporkan kepada para pemangku kepentingan? Bagaimana prosesnya? Semua mitra atau lembaga di bawah naungan Yayasan PDHI wajib membuat laporan perkembangan dari mitra atau lembaganya. Hanya saja kadang semua tidak berjalan dengan baik, karena adanya beberapa kendala seperti tempat yang jauh, atau padatnya kegiatan di beberapa mitra atau lembaga yang biasanya juga bertepatan dengan pengajian rutin PDHI. Justru jika ada waktu dari pihak IC lebih sering menjalin silaturahmi dengan pihak Yayasan sekaligus dengan laporan kegiatan.</p> <p>11. Apakah PDHI membuat laporan keuangan yang memadai terkait program pemberdayaan dan bagaimana prosesnya? Ada pastinya, namun hanya untuk pihak mitra atau lembaga nya sendiri.</p>
Peningkatan kapasitas organisasi lokal	<p>12. Bagaimana upaya yang dilakukan PDHI agar masyarakat yang diberdayakan memiliki organisasi yang kuat dan saling mendukung? Memupuk rasa kekeluargaan untuk saling membantu dengan cara mensupport semua kegiatan dari setiap mitra atau lembaganya.</p> <p>13. Bagaimana langkah yang diupayakan oleh PDHI agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan? Langkah awal yang di lakukan oleh pihak Yayasan adalah mengetahui kondisi masyarakat kemudian di bahas secarabersama dan di temukan solusi terbaiknya.</p>

II. *Islamic Social Enterprise*

ASPEK	PERTANYAAN
Pertanyaan Umum	<p>1. Kapan Yayasan PDHI ini didirikan? Saya ingatnya tanggal Nasional nya itu tanggal 22 Juni 1952 M dan bulan syawal tahunnya saya lupa.</p> <p>2. Apa latar belakang pendirian Yayasan PDHI ? Sepengetahuan saya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Saat itu jama'ah Haji Yogyakarta berangkat, kemudian mendengar adanya perpecahan partai dan khilafah b. Pada musim haji tahun 1371 Hijriyah atau tahun 1952 Masehi, Ummat Islam dari segala bangsa yang berbeda berkumpul mejadi satu dengan tujuan ibadah dan mencari ridho Allah. c. Di Masjidil Haram Makkah, tanggal 17 Syawal 1371 H atau tanggal 22 Juni 1952 M, jama'ah Haji berikrar bersama dan lahirlah Yayasan PDHI
Tujuan	<p>3. Apa tujuan didirikan Yayasan PDHI ?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memelihara hasil ibadah haji. b. Mengamalkan kemanfaatan selama haji. c. Membimbing para calon haji kearah haji mabrur. <p>4. Apa yang menjadi nilai-nilai yang mendasari pendirian Yayasan PDHI ?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memelihara Ukhuwah Islamiyah secara luas b. Ikhtiyar mencapai haji mabrur ; c. Menggerakkan tholabul 'ilmi dan 'amal <p>5. Apakah hasil yang diharapkan dari pendirian Yayasan PDHI ? Tercapainya tujuan awal adanya pendirian Yayasan PDHI serta adanya kesejahteraan bagi umat.</p> <p>6. Apa langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan Yayasan PDHI ?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memupuk Ukhuwah Islamiyah dan gotong royong b. Mengadakan pertemuan, ceramah, pengajian dan sebagainya, untuk menambah ilmu dan amal c. Segala usaha yang sah dan halal
Sumber dana	<p>7. Darimana sumber dana utama pendirian Yayasan PDHI ?</p>

	<p>Dana donasi dari pengurus Yayasan PDHI dan infaq dari kegiatan selapanan ahad pon.</p> <p>8. Bagaimana perbedaan pendayagunaan dana infak, wakaf, dan hibah yang diterima Yayasan dalam kaitannya pendirian dan pengembangan Yayasan PDHI ?</p> <p>Semua dana yang di himpun melalui kegiatan dakwah seperti pengajian rutin, kemudian di distribusikan secara langsung dan wakaf di kelola secara bertahap oleh Yaysan PDHI.</p> <p>9. Bagaimanakah saat pendirian Yayasan PDHI mendapatkan persetujuan dari jamaah dan pemerintah ?</p> <p>Selama ini yang saya tahu Yayasan PDHI ini yang memang mendapat persetujuan bersama oleh jama'ah Haji Yogyakarta di bawah nauangannya pasca Haji.</p> <p>10. Bagaimana Rencana pengembangan Yayasan PDHI ke depan ?</p> <p>Sampai saat ini sudah ada beberapa program yang akan dilaksanakan namun masih dalam proses perencanaan. Hingga saat ini Yayasan PDHI ini bisa berkembang dan siap membantu umat yang membutuhkan kebutuhan sesuai dengan kesiapan eksekutor di lapangan.</p>
Aktivitas	<p>11. Apa saja usaha yang dijalankan oleh Yayasan PDHI ?</p> <ol style="list-style-type: none"> PPIQ Putra/Putri di Bantul. Madrasah Tsanawiyah di Girikarto, Panggang, GK Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI di Cupuwatu, Kalasan. Raudhatul Athfal Islam di Wirokerten dan TK Ibnul Qoyyim Pondok Hafidhu Dhu'afa di Girikarto, Panggang, GK Koperasi Serba Usaha Syariah – BMT PDHI Islamic Center di Balong, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman. Islamic Center di Playen, Gunung Kidul. Panti Asuhan HJ.SARWATI-PDHI di Margoluwih, Seyegan, Sleman. Tempat Pemakaman Bukan Umum /Makam Haji di Piyungan.

	<p>k. Klinik Pratama –PDHI di Wonosari.</p> <p>Siapa yang menjadi pengelola Yayasan PDHI ? Masyarakat yang ingin mengabdikan di PDHI dengan syarat sudah Haji atau Umroh</p> <p>12. Bagaimana jika Yayasan PDHI mengalami kerugian dan tanggung jawabnya terhadap jamaah ? Sepertinya ini tidak akan terjadi, mengingat Yayasan PDHI ini sudah cukup lama berdiri dengan jamaah yang begitu banyak</p>
Pendapatan	<p>13. Berapa pendapatan yang diperoleh Yayasan PDHI ? Kalau itu sepertinya tidak ada ya.</p> <p>14. Bagaimana laba/rugi yang dialami Yayasan PDHI selama ini ? Tidak ada laba rugi</p> <p>15. Bagaimana kontribusi Yayasan PDHI terhadap aktivitas program-program yang didirikannya ? Mungkin bisa dikatakan memberi bantuan, hanya saja kami yang terkadang belum mempersiapkan keperluan. Contohnya begini di RA ini banyak kadang siswa nya yang belum membayar sehingga membuat banyak kegiatan operasional tidak bisa dilaksanakan dengan baik, untuk solusi yang diberikan Yayasan adalah mencatat nama – nama dan total keseluruhan kemudian di mintakan uang ganti kepada pihak Yayasan, namun sampai saat ini kami belum melakukan hal ini, kami pada lebih ya sudahlah.</p> <p>16. Untuk apa saja keuntungan dari Yayasan PDHI terhadap program – program yang didirikan ? Setahu saya Yayasan PDHI ini tidak memiliki keuntungan.</p> <p>17. Bagaimana keuntungan Yayasan PDHI diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha lain ? Saya, tidak mengetahui terkait hal ini ya. Yang saya tahu investasi besar untuk para pengurusnya yang bisa lillahita’ala, yang insyallah menjadi amal jariyah bagi beliau – beliau.</p>

4. Coding Hasil Wawancara

I. Pemberdayaan

Kode	Aspek	Transkrip	Interpretasi
A	Informasi Umum	<p>“ Tujuan program pemberdayaan di PDHI : (1) Memelihara hasil ibadah haji yang mabrur serta memperluas kemabruran tersebut kedalam masyarakat, (2) Mengamalkan kemanfaatan yang terdapat dari ibadah haji dan sekitarnya. (3) Membangun rasa wajib beribadah haji bagi pemeluk agama islam. (4) Membimbing para calon haji kearah haji mabrur”</p> <p>“Adanya pemberdayaan masyarakat ini untuk mensejahterakan masyarakat pada sector perekonomian dan kehidupan social”</p> <p>“Tujuan utama adanya pemberdayaan masyarakat pada Yaysan PDHI ini untuk memper erat talisilaturahmi anatar jama’ah”</p> <p>“Mewujudkan harapan dan cita – cita salah satu pengurus Yayasan PDHI dalam melanggengkan kegiatan sosial ini sebagai amal jariyah di akhirat”</p> <p>“Melanggengkan harapan para jama’ah haji yaitu pendiri Yayasan PDHI terdahulu untuk membuat islam ini bisa terasa damai</p>	<p>“Pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya yang ada melalui Yayasan PDHI demi kemaslahatan umat” (A1)</p>

		<p>meskipun dengan banyaknya perbedaan”</p> <p>“..,Tujuan adanya pemberdayaa di masyarakat di Yayasan PDHI yang satahu itu yang ikhlas lilahita’ala demi kepentingan umat”</p>	
		<p>“Adanya perbedaan yang dirasakan pada umat islam di tanah air, namun meiliki harapan dapat menjalankan ibadah Haji bersama dengan tenteram dan tenang. Dengan suasana Ukhuwah Islamiyah, tenang dan damai, yang didapat selama perjalanan haji sengaja akan dipelihara, sehingga menjadikan ibadah haji yang mabrur, sesuai dengan Firman dalam surat Al Hajj ayat 26. Dalam melaksanakan maksud tersebut dalam ikrar ini, satu rombongan membuat sebuah garis ikrar. Dibat dan disetujui bersama di Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 Miladiyah. Untuk merealisasikan ikrar para jama'ah Haji ini membuat sebuah program sosial dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. ”</p> <p>“...inti dari awal mula berdirinya pemberdayaan masyarakat ini berawal dari</p>	<p>“Sejarah berdirinya program pemberdayaan ini berawal dari kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI melalui kegiatan pengajian rutin yang diadakan dengan peserta dari berbagai daerah di Yogyakarta di beberapa tempat atau masjid yang di naungi oleh pihak Yayasan PDHI, berawal dari keluhan dan juga kebutuhan masyarakat PDHI ini mencoba memberikan solusi melalui pemberdayaan yang kemudian di kelola oleh pengurus Yayasan yang sesuai dengan bidang permasalahan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial serta perekonomian dari jama'ah dan masyarakatnya” (A2)</p>

		<p>kegiatan dakwah berupa kegiatan pengajian rutin yang di laksanakan oleh Yayasan PDHI pada setiap bulannya.”</p> <p>“...program yang didirikan oleh Yayasan PDHI ini didirikan atas dasar keluhan masyarakat yang kemudian di kembangkan serta di naungi oleh Yayasan PDHI sehingga memiliki impect positif bagi masyarakat baik pada program berprofit ataupun non profit”</p> <p>“Untuk pemberdayaan masyarakat yang didirikan oleh Yayasan PDHI saya kurang mengetahui bagaimana details nya, namun yang saya ketahui terkait dengan proses pendirian dari <i>Islamic Center Playen Gunung Kidul</i>...”</p>	
		<p>“Seluruh umat terutama jama’ah PDHI yang membutuhkan”</p> <p>“Jama’ah PDHI yang membutuhkan namun dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat umum.”</p> <p>“Seluruh masyarakat yang membutuhkan”</p> <p>“Seluruh masyarakat”</p>	<p>“Penerima manfaat dalam program pemberdayaan masyarakat ini hamper dampaknya bisa di rasakan oleh banyak masyarakat, meskipun yang di berdayakan tidak secara keseluruhan namun memiliki dampat yang baik bagi masyarakat sekitarnya” (A3)</p>
B		<p>“Jelas di berikan, dalam memutuskan mustahik atau</p>	<p>“Dalam proses pemberdayaan</p>

	Akses terhadap Informasi	<p>yang berhak menerima manfaat di putuskan secara bersama – sama melalui musyaarah pada kegiatan kajian rutin PDHI”</p> <p>“Tentu saja diberikan informasi lengkap, selaku salah satu penerima manfaat memiliki akses untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PDHI di berbagai tempat dan dari proses inilah kami memperoleh banyak informasi.”</p> <p>“Kalau itu jelas, karena program yang akan di selenggarakan pasti butuh koordinasi dari pihak Yayasan PDHI.”</p> <p>“Tentu saja di berikan informasi lengkap, karena dalam proses penyelenggaraan kegiatan akan di pantau dan di bimbing oleh pihak Yayasan PDHI”</p>	<p>masyarakat tentu saja bahwa penerima manfaat akan di berikan informasi yang lengkap, karena dalam segala proses pelaksanaan kegiatannya di pantau dan di bombing oleh salah satu pengurus yayasan PDHI yang memiliki kemampuan di bidang tersebut” (B1)</p>
		<p>“Justru hal ini perlu adanya komunikasi yang baik antara penerima manfaat dan juga pihak PDHI, karena dalam proses pelaksanaan program yang dijalankan oleh PDHI ini perlu adanya pembinaan, pemantauan hingga evaluasi”</p> <p>“Menurut saya, harusnya memang selaku penerima manfaat lebih giat dalam mencari informasi apapun itu bentuknya, baik dari sisi</p>	<p>“Dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak Yayasan PDHI sebagai penerima manfaat wajib mencari banyak informasi baik dari pihak Yayasan PDHI ataupun beberapa instansi terkait pemberdayaan tersebut bukan hanya tentang dana tapi proses pengembangannya atau</p>

		<p>informasi pihak internal Yayasan PDHI ataupun dari pihak eksternal karena hal ini akan sangat mempengaruhi proses berjalannya program – program di PDHI.”</p> <p>“Tentu saja, karena hal ini perlu adanya koordinasi dengan pihak Yayasan PDHI ataupun dari mitra yang lain, baik terkait dengan dana ataupun kegiatan yang akan di selenggarakan”</p>	<p>misalkan cara memenejemen yang baik, baik pada bidang administrasinya ataupun pengelolaannya” (B2)</p>
		<p>“Hingga saat ini mungkin belum terlaksana secara maksimal, tapi dengan adanya aplikasi WA dan media sosial lain nya, mampu mempermudah jama’ah PDHI ini menjalin komunikasi antar sesama. Tentunya hal ini mampu mempermudah segala akses kebutuhan yang berhubungan dengan proses pemberdayaan tersebut.”</p> <p>“...yang dilakukan PDHI ini masih terbilang minim karena teknologi yang digunakan saat ini masih berupa Aplikasi WA, namun hal ini mampu mempermudah segala koordinasi antar mitra, jama’ah dan juga Yayasan PDHI terkait dengan segala program kegiatan yang diselenggarakan.”</p>	<p>“Upaya yang dilakukan oleh Yayasan PDHI ini dalam memperkenalkan teknologi bisa dikatakan masih belum maksimal karena sampai saat ini masih fokus pada aplikasi WA saja, walaupun begitu informasi yag disampaikan melalui WA sudah cukup lengkap untuk semua kegiatan PDHI. Namun Yayasan PDHI ini belum memiliki akun sosial media lain seperti <i>Wibsite</i> resmi, <i>Instagram</i>, <i>Twitter</i> ataupun tiktok sebagai media dakwahnya” (B3)</p>

		<p>“...adanya HP di lengkapi dengan fitur WA mampu mempermudah koordinasi atau penyampaian informasi terkait dengan kegiatan yang akan di selenggarakan oleh pihak Yayasan PDHI. Sehingga kegiatan dakwah bisa di ikuti oleh banyak jama’ah yang bahkan di luar kota Yogyakarta”</p>	
C	Inklusivitas	<p>“Di awali dengan dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI, mulailah terjalin komunikasi anatar masyarakat sehingga muncullah beberapa permasalahan yang ada disekitar daerah tersebut, hal ini lah yang menjadi sebuah perhatian penting bagi pihak Yayasan sehingga dilaksanakan adanya sebuah pembinaan didaerah tersebut, bukan hanya saja pembinaan namun juga dukungan berupa materi serta ketrampilan dalam proses penyelesaian masalah yang ada. Seperti dalam proses peningkatan perekonomian di daerah tersebut pihak Yayasan PDHI memberikan sebuah bibit buat atau tanaman yang bisa di tanam di daerah tersebut dengan bimbingan dari para ahlinya, setelah berhasil melaksanakan panen dengan baik maka hal ini akan di pantau oleh pihak Yayasan PDHI.”</p>	<p>“Berawal dari dakwah atau program selapanan atau bisa di katakana pengajian rutin setiap bulannya, disinilah di buka forum untuk mengetahui apa saja permasalahan yang sedang di hadapi oleh penerima manfaat. Itu merupakan salah satu bentuk Yayasan PDHI dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan penerima manfaat yang juga di dukung oleh SDM yang berkualitas oleh pihak pengurus Yayasan ataupun mitra dari Yayasan PDHI. (C1)</p>

		<p>“... banyaknya pengurus dengan ketrampilan para anggota jama’ah PDHI. Hal ini lah yang di manfaatkan oleh pihak Yayasan PDHI. Dengan SDM yang baik ini mampu mengelola SDA yang ada sesuai keadaan masyarakatnya hingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat baik di bidang perekonomian ataupun sosial.”</p> <p>“Pemanfaatan relasi ataupun ketrampilan para anggota jama’ah PDHI sehingga mampu membantu proses pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI, baik itu di dunia ekonomi ataupun sosial.”</p> <p>“Melakukan pembinaan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya...”</p> <p>“Melalui dakwah yang dilakukan dengan kegiatan pengajian rutin akan memberikan data bahwa apa saja permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga sekira itu berat maka akan di bahas secara bersama dan perlu dilaksanakan sebuah pembinaan untuk memanjukan</p>	
--	--	--	--

		perekonomiannya serta standar sosialnya.”	
		<p>“Iya betul, semua hal yang akan di berikan ke pada penerima manfaat maka akan ikut andil dalam proses penyusunan dan juga pelaksanaannya. Karena prinsip yang terjalin pada Yayasan PDHI ini merupakan “Dari umat untuk umat”. Dalam hal ini masyarakat yang akan lebih mengerti bagaimana keadaan masyarakat yang ada di daerah tersebut”</p> <p>“... tentu saja penerima manfaat ikut di libatkan, karena dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini merupakan pemberdayaan yang dilaksanakan atas dasar keluhan yang dirasakan oleh pihak masyarakat kemudian di bahas secara bersama dan di berdayakan melalui dukungun pihak Yayasan PDHI. Berupa support materialistic ataupun non materialistic.”</p> <p>“Tentu saja, untuk penerima manfaat akan andil dalam proses penyusunan dan pelaksanaan programnya”</p>	<p>“Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak Yayasan PDHI ini selalu mengikut sertakan pihak penerima manfaat baik dalam proses penyusunan atau proses pelaksanaan kegiatannya. Hal ini karena yang lebih mengetahui keadaan yang sesungguhnya di lapangan adalah penerima manfaat tersebut” (C2)</p>
		“Jarang dilaksanakan karena sistem yang digukan	“Yayasan PDHI selama berdiri puluhan tahun

		<p>merupakan sebuah system syari'ah dan semua Lembaga yang dibawah naungan Yayasan PDHI ini di berikan kebebasan dotomi dalam proses pengembangannya.”</p> <p>“... Yayasan PDHI ini kan lebih fokus pada kegiatan sosial, jadi untuk penerima manfaat tidak akan di berikan akses permodalan usaha secara cuma – cuma berupa dana murni, kecuali melalui kegiatan dakwah yang nantinya akan ada infaq yang dikumpulkan untuk beberapa program yang membutuhkan dana.”</p> <p>“... Yayasan PDHI ini tidak akan memberikan modal secara tunai, biasanya melalui sebuah kegiatan.”</p> <p>“Permodalan di awal biasanya di bebaskan pada prose penghimpunan dana donasi seperti infa yang dikumpulkan saat proses dakwah ataupun kajian di masjid – masjid ataupun tempat yang di naungi oleh pihak Yayasan PDHI. Di beberapa mitra atau lembaga sendiri lebih sering mengumpulkan dana donasi secara mandiri dari pihak masyarakat.”</p>	<p>belum pernah memberikan akses permodalan secara tunai bagi penerima manfaat, namun Yayasan PDHI ini lebih sering menggunakan metode penyelenggaraan kegiatan yang hasil infaq dari masyarakat di berikan kepada pihak lembaga atau penerima manfaat yang membutuhkan. Namun begitu juga sebaliknya Yayasan PDHI ini juga tidak meminta sedikitpun keuntungan yang dimiliki oleh pihak penerima manfaatnya”</p> <p>(C3)</p>
D	Akuntabilitas	<p>“Tidak di laporkan, karena sistem yang dilaksanakan oleh pihak Yayasan PDHI</p>	<p>“Dalam peraturan yang tertulis pada Yayasan PDHI, laporan kegiatan</p>

		<p>ini merupakan sebuah sistem sosial yang memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin berkembang dengan usaha dan kreativitas yang dimiliki untuk tetap bertahan, meskipun di awal akan tetap di beri pembinaan serta bantuan yang mampu di berikan”</p> <p>“Untuk semu lembaga atau mitra di bawah naungan PDHI ini memiliki kewajiban untuk melaporkan semua kegiatan ataupun administrasi kepada pihak PDHI pada setiap tahunnya. Namun, belum semua mitra atau lembaga di bawah naungan Yayasan PDHI ini melaksanakan hal tersebut,”</p> <p>“...jika ada waktu dari pihak lembaga atau mitra lebih sering menjalin silaturahmi dengan pihak Yayasan sekaligus dengan laporan kegiatan”</p>	<p>yang dilaksanakan dari setiap mitra atau lembaga di bawah naungan Yayasan PDHI wajib melaksanakan laporan tahunan, hanya saja sampai saat ini belum terlaksana dengan baik.” (D1)</p>
		<p>“Ini dilaksanakan pada setiap Lembaga atau instansi di bawah Yayasan PDHI, hanya saja tidak wajib di berikan kepada pihak Yayasan PDHI karena proses segala aktivitasnya sudah secara Mandiri (Otomi).”</p> <p>“Untuk Yayasan PDHI sendiri belum membuat laporan keuangan rutin terkait dengan program</p>	<p>“Untuk laporan keuangan Yayasan PDHI di buat pada setiap 5 tahun sekali beserta dengan program – program yang sudah dilaksanakan hanya saja bentuk nya masih tradisional dan belum begitu detail” (D2)</p>

		<p>pembeerdayaannya, namun akan selalu ada laporan rutin setiap tahunnya yang seperti laporan kegiatan dan beberapa dana yang di dapatkan ketika proses pelaksanaan program dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI di beberapa masjid ataupun pesantren yang di naungi oleh Yayasan PDHI”</p> <p>“Membuat laporan keuangan, hanya saja seperti laporan tahunan biasa yang masih secara tradisional”</p> <p>“Membuat laporan keuangan, hanya saja tidak selalu di laporkan kepada kepada semua lembaga atau mitra”</p> <p>“...Namun, tidak selalu di publikasikan pada semua mitra dan pihak Yayasan PDHI.”</p>	
E	Peningkatan kapasitas organisasi lokal	<p>“Membiasakan membangun silaturahmi antar jama’ah Yayasan PDHI melalui kegiatan yang di selenggarakan oleh Yayasan PDHI. Seperti kegiatan Pengajian Rutin Jum’at & Sabtu Pagi di PDHI, Pengajian Keliling Masjid Binaan PDHI, Pengajian Ahad Pon dan Pengajian Manasik Haji”</p> <p>“Menekankan rasa saling menghormati melalui kegiatan yang diadakan pada</p>	<p>“melakukan branding yang baik antar mitra untung saling membantu dan juga menselaraskan tujuan yang sama apapun yang dilakukan demi untuk kepentingan umat” (E1)</p>

		<p>setiap mitra atau lembaganya untuk saling menghadiri agar terjalin silaturahmi yang baik”</p> <p>“Menumbuhkan rasa saling menghormati melalui kegiatan yang diadakan pada setiap mitra atau lembaganya untuk saling menghadiri agar terjalin silaturahmi yang baik”</p> <p>“Memupuk rasa kekeluargaan untuk saling membantu dengan cara mensupport semua kegiatan dari setiap mitra atau lembaganya”</p>	
		<p>“Hal ini diawali dengan adanya musyawarah, lalu mengerti titik permasalahan yang di hadapi lalu lah diadakan sebuah pembinaan demi mencapai tujuan yang telah di cetuskan.”</p> <p>“...proses pelaksanaan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan PDHI di beberapa tempat yang di naunginya, kemudian membahas apa saja keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian hal inilah yang di tampung oleh pihak Yayasan PDHI kemudian di bahas secara Bersama dalam proses penyelesaian masalahnya.”</p> <p>“Biasanya di adakan ketika prosesi atau setelah kegiatan pengajian rutin di tempat</p>	<p>“Langkah yang harus dilakukan oleh pihak Yayasan PDHI ini harus mengetahui kondisi masyarakat saat itu dan mengetahui kebutuhannya, kemudian di bahas bersama untuk menemukan sebuah solusi terbaik.” (D2)</p>

		<p>seperti masjid yg di naungi oleh Yayasan PDHI, membahas tentang bagaimana keadaan masyarakat baik dari sisi ekonomi ataupun sosialnya”</p> <p>“...berdiskusi membahas hal – hal yang perlu di perbaiki baik disisi ekonomi ataupun sosial. Hal inilah yang membuat tidak adanya jarak antara jama’ah PDHI dengan pihak Yayasan PDHI”</p> <p>“Langkah awal yang di lakukan oleh pihak Yayasan yaitu mengetahui kondisi masyarakat kemudian di bahas secara bersama dan di temukan solusi terbaiknya</p>	
--	--	---	--

II. *Islamic Social Enterprise*

Kode	Aspek	Transkrip	Interpretasi
A	Pertanyaan Umum	“Dibuat dan disetujui bersama serombongan di Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 Miladiyah”	“Dibuat dan disetujui di Makkah al Mukaromah oleh jama’ah Haji Yogyakarta saat itu, pada tanggal 17 Syawal 1371 H bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 M ini merupakan awal mula di sepakati berdirinya Yayasan PDHI dengan ikrar bersama demi memupuk ukhuwah Islamiyah, ke imanan dan ke islaman” (A1)
		“(1) Para Jama’ah Haji dari Yogyakarta , khususnya dari Kabupaten Bantul, melihat	(1) Berawal dari para Jama’ah Haji dari Yogyakarta , khususnya

		<p>suasana yang kurang menggembirakan , yang meliputi ummat Islam di Tanah Air Indonesia, dengan adanya perpecahan partai, khilaf <i>furu'iyah</i> diantara Zu'amma'ul Muslimin dan penonjolan kembali masalah-masalah khilafiyah yang menyebabkan timbulnya golongan-golongan bahkan terkadang terjadi clash di antara sesama Ummat Islam.</p> <p>(2) Pada musim haji tahun 1371 Hijriyah atau tahun 1952 Masehi , dapat berkumpul dengan Ummat Islam dari segala bangsa yang berlainan kulit dan bahasa, tabiat, madzhab dan cara , akan tetapi satu agama : ISLAM, satu langkah : IBADAH, satu tujuan : MENCARI KERIDHOAN ALLAH RABBUL 'ALAMIN.</p> <p>(3) Di Masjidil Haram Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 H bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 M , ditanda tangani IKRAR BERSAMA , bahwa para jama'ah haji setelah kembali ke tanah air , menghimpunkan diri dalam satu wadah yang diberi nama : PERSAUDARAAN DJAMA'AH HADJI INDONESIA disingkat PDHI, berkedudukan pusat di Yogyakarta.”</p> <p>“</p>	<p>dari Kabupaten Bantul, melihat suasana yang kurang menggembirakan , yang meliputi ummat Islam di Tanah Air Indonesia, dengan adanya perpecahan partai, khilaf <i>furu'iyah</i> diantara Zu'amma'ul Muslimin dan penonjolan kembali masalah-masalah khilafiyah yang menyebabkan timbulnya golongan-golongan bahkan terkadang terjadi clash di antara sesama Ummat Islam.</p> <p>(2) Kemudian pada musim haji tahun 1371 Hijriyah atau tahun 1952 Masehi , dapat berkumpul dengan Ummat Islam dari segala bangsa yang berlainan kulit dan bahasa, tabiat, madzhab dan cara , akan tetapi satu agama : Islam, satu langkah : Ibadah, satu tujuan : Mencari Ridho Allah SWT.</p> <p>(3) Bertempat di Masjidil Haram Makkah al Mukaromah, pada tanggal 17 Syawal 1371 H bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1952 M , ditanda tangani Ikrar Bersama, bahwa para jama'ah haji setelah kembali ke tanah air , menghimpunkan diri dalam satu wadah yang diberi nama : Persaudaraan Djama'ah</p>
--	--	---	---

			Hadji Indonesia (PDHI ” (A2)
B	Tujuan	(e) “Memelihara hasil ibadah haji yang mabrur serta memperluas kemabruran tersebut kedalam masyarakat. (f) Mengamalkan kemanfaatan yang terdapat dari ibadah haji dan sekitarnya. (g) Membangun rasa wajib beribadah haji bagi pemeluk agama islam. (h) Membimbing para calon haji kearah haji mabrur.”	(a) “Memelihara hasil ibadah haji yang mabrur serta memperluas kemabruran tersebut kedalam masyarakat. (b) Mengamalkan kemanfaatan yang terdapat dari ibadah haji dan sekitarnya. (c) Membangun rasa wajib beribadah haji bagi pemeluk agama islam. (d) Membimbing para calon haji kearah haji mabrur.” (B1)
		(a) “Memelihara Ukhuwah Islamiyah secara luas (b) Ikhtiyar mencapai haji mabrur (c) Memanfaatkan kemabruran ibadah haji dalam masyarakat (d) Menggerakkan tholabul ‘ilmi dan ‘amal (e) Mempelopori gotongroyong dan berdana untuk beramal jariyah (f) Tidak mencampuri soal-soal politik (g) Menitik beratkan masalah masalah kerohanian.”	(a) “Memelihara Ukhuwah Islamiyah secara luas (b) Ikhtiyar mencapai haji mabrur (c) Memanfaatkan kemabruran ibadah haji dalam masyarakat (d) Menggerakkan tholabul ‘ilmi dan ‘amal (e) Mempelopori gotongroyong dan berdana untuk beramal jariyah (f) Tidak mencampuri soal-soal politik (g) Menitik beratkan masalah masalah kerohanian.” (B2)

		<p>“Tercapainya tujuan adanya pendirian Yayasan PDHI serta mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi banyak umat terutama bagi jama’ah Yayasan PDHI”</p> <p>“... mampu mewujudkan generasi haji yang mabrur dan berkelanjutan serta mampu mewujudkan segala nilai – nilai yang sudah di bangun oleh pihak Yayasan PDHI”</p> <p>“... tercapainya ikrar yang sudah di sepakati sejak awal berdirinya Yayasan PDHI ini oleh para jama’ah Haji dari Yogyakarta terutama Bantul”</p> <p>“... terwujudnya sebuah perdamaian antar umat mulis meskipun kita menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada tapi setidaknya tidak untuk saling menjatuhkan.</p> <p>“... kemandirian dalam sisi perekonomian dan sosial namun di iringi dengan dakwah serta memupuknya dengan ukuwah islamiyah.”</p>	<p>“Memiliki banyak jama’ah, mampu mewujudkan para jama’ah Haji yang mabrur dan mampu melanggengkan hal tersebut dengan berbagai kegiatan yang baik di masyarakat” (B3)</p>
		<p>(a) “Memupuk Ukhuwah Islamiyah , tasamuh dan gotong royong di dalam masyarakat</p> <p>(b) Membangun dan memberikan bantuan pembangunan tempat peribadatan dan kemasyarakatan serta</p>	<p>(f) “Memupuk Ukhuwah Islamiyah , tasamuh dan gotong royong di dalam masyarakat</p> <p>(g) Membangun dan memberikan bantuan pembangunan tempat peribadatan dan kemasyarakatan</p>

		<p>amal jariyah yang lainnya</p> <p>(c) Mengadakan kunjungan silaturahmi kepada calon haji dan baru kembali dari ibadah haji</p> <p>(d) Mengadakan pertemuan, ceramah, pengajian dan sebagainya, untuk menambah ilmu dan amal</p> <p>(e) Segala usaha yang sah dan halal guna tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas.”</p>	<p>serta amal jariyah yang lainnya</p> <p>(h) Mengadakan kunjungan silaturahmi kepada calon haji dan baru kembali dari ibadah haji</p> <p>(i) Mengadakan pertemuan, ceramah, pengajian dan sebagainya, untuk menambah ilmu dan amal</p> <p>(j) Segala usaha yang sah dan halal guna tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas.” (B3)</p>
C	Sumber dana	<p>“Dana donasi dari pengurus Yayasan PDHI dan rasa kepemilikan dengan wujud rasa ukuwah Islamiyah agar tercapainya kemaslahatan untuk umat”</p> <p>“Dana donasi, seperti infaq dari setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak Yayasan PDHI, atau misalkan donasi rutin dari salah satu pengurus Yayasan PDHI dan beberapa lembaga atau mitra yang berprofit seperti BMT”</p> <p>“... pengurus Yayasan PDHI dan beberapa infaq dari kegiatan pengajian rutin Yayasan PDHI”</p> <p>“Dana donasi dari jama’ah dan pengurus Yayasan PDHI ...”</p>	<p>“Sumber dana yang di dapatkan untuk membangun Yayasan PDHI ini berasal dari donasi pengurus Yayasan sendiri dan beberapa infaq masyarakat dari kegiatan pengajian rutin yang diadakan oleh Yayasan” (C1)</p>

		<p>“Semua dana yang di himpun melalui kegiatan dakwah dengan wujud kegiatan pengajian rutin, kemudian di Kelola langsung oleh pihak jama’ah PDHI semua kemudia di distribusikan untuk pembangunan ataupun kegiatan sosialnya yang di butuhkan oleh masyarakat saat itu. Dengan berbagai macam pemantauan dari pihak Yayasan PDHI”</p> <p>“Untuk dana infaq yang di dapatkan dari kegiatan pengajian yang di adakan oleh pihak Yayasan biasanya langsung di distribusikan kepada mitra atau lembaga yang membutuhkan dan untuk wakaf biasa nya dilihat dari akad serta keadaan di lingkungan tersebut. Kebutuhan atau SDA apa yang bisa di kelola oleh pihak Yayasan PDHI.”</p> <p>“... untuk wakaf biasanya di kelola oleh pihak Yayasan secara bertahapa.”</p>	<p>“Prosee pengelolaan dana infaq, hibah dan juga wakaf itu berbeda – beda, untuk infaq dan hibah jika itu berupa uang tunai langsung di tasyarufkan kepada pihak mitra atau lembaga yang membutuhkan dan wakaf di kelola secara bertahap oleh Yayasan PDHI” (C2)</p>
		<p>“Iya betul, karena adanya Yayasan PDHI ini berdasarkan tujuan dan keresahan bersama yang dirasakan oleh para Jama’ah Haji di DI Yogyakarta, yang kebetulan saat itu merasakan keresahan akan banyak nya perbedaan yang terjadi dikalangan ummat islam di Indonesia, dengan tujuan serta kepentingan Bersama maka Yayasan PDHI ini</p>	<p>“Tentu saja hal ini adanya persetujuan bersama yang dilakukan jama’ah Haji saat itu pada tahun 1952 M dari Yogyakarta lebih tepatnya daerah Bantul pasca Haji” (C3)</p>

		<p>didirikan oleh Jama'ah Haji pada tahun 1952 M.”</p> <p>“Tentu saja...”</p> <p>“Iya pasti itu...”</p>	
		<p>“Sampai saat ini sudah ada beberapa program yang akan dilaksanakan namun masih dalam proses perencanaan. Hingga saat ini Yayasan PDHI ini bisa berkembang dan siap membantu umat yang membutuhkan sesuai dengan kesiapan eksekutor di lapangan.”</p> <p>“...mengingat dari pihak Yayasan PDHI juga membutuhkan dana dalam mensupport segala kegiatan sehingga hal ini tidak bisa dilaksanakan secara instan tapi harus bertahap”</p> <p>“Ini sempat di bahas di rapat tahunan, hanya saja saya kurang begitu mengerti untuk kedepannya bagaimana progress kedepannya”</p> <p>“... pelayanan terbaik untuk jama'ahnya”</p>	<p>“Untuk pengembangan Yayasan PDHI akan lebih focus pada pemberdayaan ekonominya karena belum terlaksana secara maksimal mengingat Yayasan ini memiliki relasi yang cukup namun belum di manfaatkan secara maksimal” (C4)</p>
D	Aktivitas	<p>(a) “Gedung PDHI “SASONO WORO “</p> <p>(b) Pondok Pesantren Ibnu Qoyyim Putra/Putri di Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman dan Tegalyoso, Siti mulyo, Piyungan , Bantul.</p>	<p>“Di Bidang Pendidikan : MA & MTS PPIQ, MTS Panggang Gunung Kidul, TK <i>Ibnul Qoyyim</i> Sleman, TK Islam PDHI <i>Ibnul Qoyyim</i>, PPIQ, Pondok Pesantren Hafidz Dhuafa Gunung Kidul ; Di bidang Sosial : RSIY PDHI, Makan Haji Piyungan</p>

		<p>(c) Madrasah Tsanawiyah di Girikarto, Panggang, GK</p> <p>(d) Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI di Cupuwatu, Kalasan.</p> <p>(e) Raudhatul Athfal Islam di Wirokerten dan TK Ibnul Qoyyim</p> <p>(f) Pondok Hafidhu Dhu'afa di Girikarto, Panggang, GK</p> <p>(g) Koperasi Serba Usaha Syariah – BMT PDHI</p> <p>(h) Islamic Center di Balong, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman.</p> <p>(i) Islamic Center di Playen, Gunung Kidul.</p> <p>(j) Panti Asuhan HJ.SARWATI-PDHI di Margoluwih, Seyegan, Sleman.</p> <p>(k) Tempat Pemakaman Bukan Umum /Makam Haji di Piyungan.</p> <p>(l) Klinik Pratama –PDHI di Wonosari”</p> <p>“Usaha di bidang Ekonomi itu ada BMT PDHI, Gedung PDHI</p> <p>Usaha Di bidang Sosial ada</p> <p>(1) RSIY PDHI di Cupuwatu, Kalasan. (2) Panti Asuhan HJ.SARWATI-PDHI di Margoluwih, Seyegan, Sleman. (3) Klinik Pratama –PDHI di Wonosari.”</p>	<p>Bantul ; di bidang Dakwah : IC Playen Gunung Kidul, IC Cangkringan Sleman, Pengajian rutin sabtu & ahad di PDHI, Pengajian Ahad pon; di bagian Ekonomi : KSUS BMT PDHI Sumowono.” (D1)</p>
		<p>“Masyarakat yang ingin mengabdikan di PDHI dengan syarat sudah Haji atau Umroh”</p>	

		<p>“Yayasan PDHI ini merupakan sebuah Lembaga sosial dan non profit jadi bisa dikatakan bahwa Yayasan PDHI ini tidak akan mengalami kerugian, bertepatan dengan hal itu Yayasan PAHI ini juga merupakan yayaasan sosial yang memiliki banyak lembaga yang di naungi dan di kembangkan secara mandiri melalui otomi oleh Yayasan PDHI”</p> <p>“Sepertinya untuk masalah ini tidak akan dialami oleh Yayasan PDHI...”</p> <p>“Hal ini mungkin tidak akan terjadi oleh Yayasan PDHI karena Yayasan ini merupkan sebuah Yayasan yang cukup lama dengan relasi yang cukup banyak”</p> <p>“... awal berdirinya sudah berkembang secara mandiri melalui peran pengurus – pengurus Yayasan bukan adanya keuntungan yang di dapatkan berupa profit Yayasan.”</p> <p>“... kebangkrutan ini terjadi karena adanya keuntungan dalam sebuah lembaga atau perusahaan ...”</p> <p>“... Yayasan PDHI ini sudah cukup lama berdiri dengan jama’ah yang begitu banyak”</p>	<p>“Yayasan PDHI ini bukan sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki profit dari mitra atau usaha yang didirikan, yayasan ini merupakan sebuah Yayasan sosial dengan segala ke mampuan dan keterbatasan yang dimiliki berusaha melayani jama’ahnya dengan baik”(D2)</p>
E	Pendapatan	<p>“Tidak ada, meskipun ada dana yang masuk di Yayasan</p>	<p>“Yayasan PDHI ini memang tidak memiliki</p>

		<p>PDHI semua digunakan untuk keperluan dakwah dan oprasional Yayasan PDHI seperti membayar pajak, perawatan kendaraan dan juga beberapa ikhsan untuk yang berhak menerimanya. Untuk pengurus tidak mendapatkan sama sekali uang tersebut.”</p> <p>“... Yayasan PDHI pun juga tidak meminta keuntungan dari setiap mitra atau lembaganya.”</p>	<p>pendapatan, walaupun bisa di katan, sudah mulai beberapa tahun Yayasan PDHI ini mendapatkan dana dari BMT dan juga RSIY PDHI namun hal itu juga di gunakan untuk keperluan oprasional Yayasan dan keperluan dakwah sekitar 30% dari dana yang di dapatkan” (E1)</p>
		<p>“Tidak ada Laba Rugi karena Yayasan ini merupakan Yayasan dibidang sosial dan bukan ekonomi”</p>	<p>“Jika Yayaasan PDHI ini tidak memiliki pendapatan bisa dikatakan Yayasan PDHI ini tidak memiliki laba dan rugi, apalagi jika melihat dari peran Yayasan PDHI yang lebih focus di bidang sosial dari pada ekonomi” (E2)</p>
		<p>“Memberikan bantuan semaksimal mungkin hanya saja bukan berupa materi nyata seperti uang, lebih terhadap sesautu yang bisa di kembangkan dan keberlangsungan aktivitas program yang ada. Seperti pemberian bibit tumbuhan untuk masyarakat yang membutuhkan di daerah tertentu yang hasilnya bisa di manfaatkan untuk keberlangsungan pengelolaan tanamannya dan juga kebutuhan masyarakat. Keuntungan tersebut juga</p>	<p>“Yayasan PDHI ini memiliki banyak program dakwah hal inilah yang di manfaatkan oleh pihaknya untuk saling mensupport semua kegiatannya, support kegiatan ini berupa pada dampak positif untuk mitra atau lembaganya baik dari sisi pendanaan ataupun kemajuan program pada setiap lembaganya” (E3)</p>

		<p>tidak masuk ke dalam keuangan Yayasan PDHI sama sekali.”</p> <p>“... mengadakan kegiatan pengajian dengan pengumpulan infaq melalui kegiatan tersebut yang keuangannya langsung di distribusikan secara langsung”</p> <p>“.... aktivitas yang memberikan dampak positif demi perkembangan programnya dan impeknya berkelanjutan”</p> <p>“... penyelenggaraan kegiatan kemudian konsumsinya atau air minumnya berasal dari PPIQ sehingga hal ini bisa menambah nilai keuangan di PPIQ, Keuntungan tersebut juga tidak masuk ke dalam keuangan Yayasan PDHI sama sekali. Hal inilah yang dimaksud bahwa PDHI ini tidak memberikan dana secara langsung tetapi melalui suatu kegiatan yang memberi dampak baik untuk mitra – mitra atau lembaganya”</p>	
		<p>“Yayasan PDHI ini tidak memiliki keuntungan, jika pun ada di dapatkan dari beberapa program seperti BMT PDHI dan RSIY PDHI di gunakan untuk kepentingan Dakwah, Oprasioonal, pembayaran Pajak dll. Intinya dana yang didapatkan tidak di gunakan</p>	<p>“Keuntungan yang di dapatkan oleh pihak Yayasan PDHI ini berupa relasi dan kepercayaan jama’ah PDHI, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi mitra atau lembaga yang bergerak</p>

		<p>untuk kepentingan pengurus Yayasan PDHI. Bisa dikatakan ini bukan sebuah keuntungan ya tapi pendapatan”</p> <p>“..., keuntungan untuk mitranya yang bisa berupa kenalan dan relasi yang banyak sehingga mampu menjadi donator di beberapa mitra atau lembaga sosial milik Yayasan PDHI.”</p> <p>“... Yayasan PDHI ini juga tidak meminta keuntungan dari mitra atau lembaga yang dinaunginya”</p>	<p>di bidang pendidikan, ekonomi dan lebih baiknya lagi di bidang sosial karena mampu memberikan support dana untuk di kelola” (E4)</p>
		<p>“Investasi terbesar Yayasan PDHI ini bukan berupa uang ataupun materi namun berupa mitra dan juga realsi masyarakat yang sangat luas, jama’ah yang begitu banyak sehingga mampu memperluas dakwah yang dilaksanakan oleh Yaysasan PDHI sehingga mampu mendukung segala program yang didirikan oleh Yayasan PDHI.”</p> <p>“Saya tidak terlalu mengetahui hail ini, yang pasti investasi terbesar Yayasan PDHI ini ya untuk akhirat”</p> <p>“Kalau menurut saya investasi terbesar Yayasan PDHI ini berupa pahala amal jariyah”</p> <p>“Investasi berupa materi tidak ada “</p>	<p>“Secara materi Yayaasan PDHI ini tidak memiliki materi untuk mengembangkan usaha atau mitra – mitranya namun hal ini bukan menjadi masalah untuk PDHI terus berkembang, karena Yayasan PDHI ini memiliki beberapa tanah wakaf ataupun mitra – mitra yang dinaunginya keuntungan yang begitu besar sehingga bisa di gunakan proses pengembangan mitra atau lembaga di bawah naungan Yayasan PDHI” (E5)</p>

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Demak pada tanggal 17 Mei 1998 sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ali Murtandlo dan Ibu Nani Nasikah. Saat ini ia bertempat tinggal di Desa Mojosimo Rt.02 Rw.01 Kec. Gajah Kab. Demak Jawa Tengah, No. Hp : 08584866515 Alamat E-mail : umidinurr24573@gmail.com. Pendidikan SMA di tempuh di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Putri 1, Mantingan Ngawi Jawa Timur. Lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan program berkhitmat setelah lulus KMI untuk menjadi ustadzah di Pondok Pesantren Gontor Putri 7 Pekanbaru Riau, dan selesai berkhidmat pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada tahun yang sama penulis juga tinggal di pesantren selama proses kuliah yaitu di Asrama Mahasiswa Komplek 6 Pondok Pesantren Sunan Pandanaran.

Selama proses kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis juga aktif menjadi anggota organisasi Tim Markething And Communicatin FIAI UII dari tahun 2019 sebagai bendahara, aktif di organisasi UII Ayo Mengajar sejak tahun 2019 sebagai bendahara pusat yang merupakan salah satu organisasi di bawah Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam (DPPAI) UII, penulis juga aktif di organisasi di tingkat universitas yaitu LABMA UII yang secara langsung di koordinir oleh pihak Direktorat pendidikan, bukan itu saja penulis juga sempat menjabat sebagai organisasi Badan Pengelola Aset UII sejak tahun 2020 di bagian Inflow dan Administrasi.

Penulis juga aktif dalam kegiatan kajian dan penelitian, bahkan penulis sudah memiliki 5 hasil penelitian yang sudah di publikasi di Jurnal At-Tulab FIAI UII. Salah satu hasil penelitian dengan judul “*The Concept Of 'An-Taradhin Minkum In' Perspective Of The Qur'an And Hadith*” masuk dalam kegiatan *Conference on Islamic Studies and Social Sciences (ICONISSS) 2021*.